

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN**



**STRATEGI PEMBENAHAN DATABASE KENDARAAN BERMOTOR DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA DI POLDA METRO JAYA**

**NASKAH KARYA PERORANGAN
(NASKAP)**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan Kurikuler Sekolah Staf dan Pimpinan Polri
Tahun Pelajaran 2004, sesuai dengan Surat Perintah Kepala Sekolah Staf dan
Pimpinan Polri No. Pol : Sprin/ 112/ VI /2004
Tanggal , 2 Juni 2004**

BHAKTI • DHARMA • WASPADA

OLEH :

R. NURHADI YUWONO. Sik, MSi.

KOMISARIS POLISI NRP. 67050432

**PERWIRA SISWA SESPIM POLRI DIKREG KE-40
T.P. 2004**

PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Naskah Akademik Perorangan
Perwira Siswa Sespim Polri Dikreg Ke – 40 T.P. 2004

Pada Tanggal 28 September 2004

KETUA



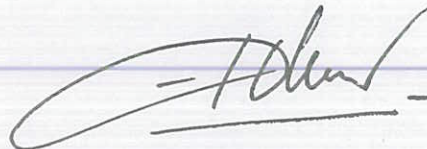
Drs. SYARIF MULYANA
KOMBES POL NRP. 49100189

ANGGOTA



Drs. H.R. BUDHI SUTRISNO
KOMBES POL NRP. 50110135

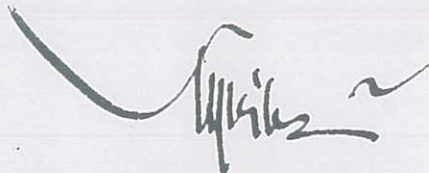
ANGGOTA / SEKRETARIS



Dra. CH. MARIA S. SUMARTI
KOMBES POL NRP. 51050155

**STRATEGI PEMBENAHAN DATABASE KENDARAAN BERMOTOR
DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA DI POLDA METRO JAYA**

DISETUJUI OLEH PEMBIMBING MATERI

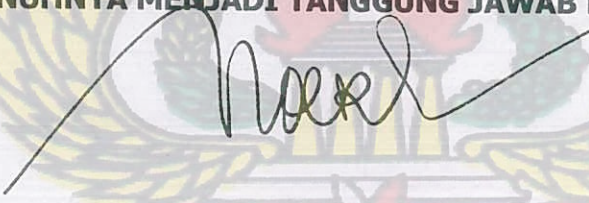


Drs. SUPRIHADI SAHADI

BRIGADIR JENDRAL POLISI



**ISI NASKAH KARYA PERORANGAN INI
SEPENUHNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB PENULIS**



R. NURHADI YUWONO, SIK, MSi.

KOMISARIS POLISI NRP. 67050432

**PERWIRA SISWA SESPIM POLRI DIKREG KE - 40
T.P. 2004**

PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA

ABSTRAKSI

Perkembangan Ilmu kepolisian sangat pesat seiring dengan perkembangan masyarakat, fenomena yang terjadi ditengah – tengah masyarakat sangat menuntut institusi polri untuk meningkatkan sumber daya manusia, sistem dan manajemen serta kultur yang sampai sekarang masih mewarnai sikap dan perilaku anggota kepolisian, Reorganisasi telah bergulir, pembenahan dalam bidang manajemen sudah dilakukan, struktur organisasi terus menerus dilaksanakan penyempurnaan namun pembangunan sistem belum banyak dilakukan pembenahan padahal sistem ini sangat mempengaruhi roda organisasi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Peningkatan pelayanan harus diberi makna dan dipahami oleh setiap anggota polisi karena itu harus diwujudkan dalam suatu tindakan nyata. Naskah ini mengantarkan sebuah sistem yang harus dimiliki oleh Institusi Polri mengingat Samsat merupakan aset Polri yang harus dipertahankan dan mampu diimplementasikan secara nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengungkapan suatu tindak pidana dalam menggunakan sarana kendaraan bermotor sangat memerlukan informasi database Samsat, oleh sebab itu penyempurnaan sistem pada database yang tersedia saat ini di Samsat, harus dapat pula mengakses kebutuhan informasi dalam mendukung tugas operasional Kepolisian.

Bila sistem ini dapat tergelar, maka tidak hanya bermanfaat bagi pelayanan pada Direktorat Lalulintas, tetapi bermanfaat pula untuk input data Pusat Informasi Kriminal Nasional.

Program database kendaraan bermotor yang harus dimiliki oleh Polri ini sangat strategis apabila program ini dapat digelar secara On-line Sistem di seluruh polda se-Indonesia sehingga data yang dibutuhkan tentang kendaraan bermotor oleh Polri sendiri maupun masyarakat dapat diakses secara cepat dan akurat. Banyak fasilitas program yang dapat dikembangkan mulai pendataan sesuai KTP (Kartu Tanda penduduk), merk, jenis, type, tahun pembuatan, fasilitas kendaraan yang digunakan (CBU / CKD) (Completely Built Up / Completely Knock Down), sampai pada no form "A", form "B" dan form "C".

Foto kendaraan dan foto kepemilikan (sejarah kepemilikan) mulai dari pemilik pertama sampai pemilik kendaraan tercantum dalam file database. Hal ini akan sangat mendukung dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana terutama dukungan informasi terhadap pengungkapan jaringan Teroris dalam hal ini yang menggunakan sarana kendaraan bermotor. Database ini tidak merubah format STNK yang ada sesuai dengan INBERS No:24/INS/03/M/X/1999. tetapi disempurnakan mulai entry data kendaraan bermotor di Kantor Samsat guna kepentingan Polri dalam upaya mendukung pengungkapan kasus pelanggaran atau tindak pidana (terorisme).

Dengan demikian, Samsat kedepan merupakan "*one stop service registrasi & identifikasi ranmor*" yang memiliki dua dimensi yaitu *prosperity* (ekonomis) berkaitan dengan aspek pajak dalam mendukung APBD serta *security* berkaitan dengan aspek keamanan dalam mendukung operasional Kepolisian mengungkap kasus pelanggaran dan tindak pidana.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat, berkah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Naskah Akademis Perorangan (NASKAP) yang merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi kurikulum di Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri Dikreg ke-40 TP. 2004 sesuai waktu yang ditetapkan.

Adapun judul penulisan Naskah Akademis Perorangan (NASKAP) ini adalah :
"STRATEGI PEMBENAHAN DATABASE KENDARAAN BERMOTOR
DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA DI POLDA METRO
JAYA".

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan selama melaksanakan tugas di lapangan masih banyak kekurangan maupun kelemahan di dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada, berbagai masukan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis berusaha menyempurnakan dan menyelesaikan NASKAP ini tepat pada waktunya.

NASKAP ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kritik dan saran penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan ini, dengan harapan Naskah ini dapat bermanfaat bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Direktorat Lalu lintas yang mengemban fungsi Regristrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor , Database kendaraan bermotor Samsat ini akan bermanfaat bagi mendukung tugas – tugas Kepolisian dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Dari lubuk hati yang paling dalam dan penuh rasa hormat serta ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, **Irjen Pol. Drs. BUDI SETYAWAN, Msc** dan staf atas bimbingan dan tuntunannya selama penulis mengikuti pendidikan di Lembaga Sespim Polri.
2. Bapak **BRIGJEN POL Drs. SUPRIHADI SAHADI** selaku Pendamping / Konsultasi diskusi NASKAP yang dengan penuh kesabaran kepada penulis hingga selesainya penulisan NASKAP ini tepat pada waktunya.
3. Bapak **Kombes Pol Drs. Budhi Sutrisno**, Bapak **Kombes Pol Drs. Syarif Mulyana** dan **Kombes Pol Dra. Ch. Maria S. Sumantri** selaku penguji.
4. Panca Chandrawati SH ,istriku tercinta dan kedua mutiara hatiku titipan Illahi , Ilham Ferdianto, Adinda Oriza Sativa yang tercinta selalu memberikan energi batin yang tidak ada nilainya serta do'a selama mengikuti pendidikan di lembaga tercinta ini dari awal hingga terselesaikannya penulisan NASKAP ini.
5. Rekan - rekan Perwira Siswa Sespim Polri Dikreg ke-40 TP. 2004 yang telah banyak memberikan kritikan yang membangun dan dorongan semangat dalam penulisan Naskah Karya Perorangan ini .

Semoga Tuhan YME selalu membimbing dan melindungi kita sekalian, Amin.

Lembang, September 2004

Penulis

MOTTO:

" BELAJARLAH DARI SEBUAH PROSES MAKA KAMU AKAN MENGETI
DAN MEMAHAMI PROSES ITU PENTING "

Untuk Kita Renungkan bersama

Apakah kita sudah memberikan kontribusi kepada Institusi tercinta ini ?

Ada suatu ungkapan dalam yang perlu kita renungkan.....

Dalam alam semesta ini
ada dua macam susah,
mau ke langit susah,
tapi lebih susah minta tolong
pada orang lain.

Dunia ini dua macam pahit,
pahit pertama adalah obat terpahit,
tapi masih lebih pahit orang miskin.

Di dalam dunia ini ada dua macam bahaya,
bahaya dalam kehidupan sehari-hari,
tapi lebih bahaya hati manusia.

Di alam ini ada dua macam tipis,
tipis kertas tapi lebih tipis hati manusia.

R. Nurhadi Yuwono, S.IK, M.Si.

DAFTAR GAMBAR

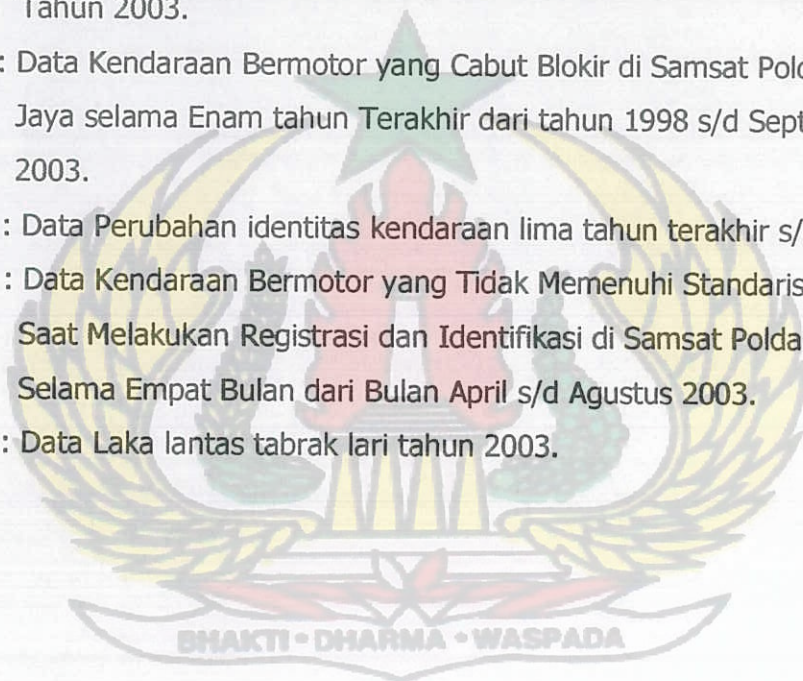
- Gambar 1 : Gambar yang direkam oleh CCTV di gedung Plasa Kuningan.
- Gambar 2 : Dokumentasi nomor mesin kendaraan (Bom J.W. Marriot).
- Gambar 3 : Nomor rangka kendaraan (Bom J.W. Marriot).
- Gambar 4 : Nomor Polisi kendaraan (Bom J.W. Marriot).
- Gambar5 : Program tampilan Data Kendaraan Bermotor Berdasarkan Nomor Polisi.
- Gambar 6 : Program Tampilan yang Menggambarkan Foto Ranmor.
- Gambar 8 : Program Tampilan yang Menggambarkan Foto Pemilik Ranmor Terakhir .
- Gambar 9 : Program Tampilan yang Menggambarkan Data Ranmor Berdasarkan Merek .
- Gambar 10 : Aplikasi Pencarian Data Ranmor yang Menampilkan Foto Pemilik dan Foto Ranmor.
- Gambar 11 : Aplikasi Pencarian Data Ranmor Melalui Jenis Ranmor.
- Gambar 12 : Aplikasi Pencarian Data Kendaraan Bermotor Melalui Merek Ranmor
- Gambar 13 : Aplikasi Pencarian Kndaraan Bermotor Melalui Nama Pemilik Kendaraan Bermotor.
- Gambar 14 : Aplikasi Pencarian Data Kendaraan Bermotor Melalui Merek dan Warna Kendaraan Bermotor
- Gambar 15 : Aplikasi Pencarian Data Kendaraan Bermotor Melalui Nomor Rangka dan Nomor Mesin.
- Gambar 16 : Aplikasi Pencarian Data Kendaraan Bermotor Melalui Alamat Pemilik
- Gambar 17 : Aplikasi Pencarian Data Kendaraan Bermotor yang Diblokir
- Gambar 18 : Jaringan Komunikasi Data Samsat Polda Metro Jaya
- Gambar 19 : Kode Pengamanan Komunikasi Data Samsat Polda Metro Jaya
- Gambar 20 : Jaringan Komunikasi Data Polda Metro Jaya – Samsat – Mobile Device.
- Gambar 21 : Jaringan Komunikasi Data AntarPolda dengan Menggunakan Satelit VSAT.

Gambar 21 : Aplikasi Program Data Ranmor Samsat Polda Metro Jaya dengan Fungsi Reserse, Intel & Instansi-instansi Terkait.



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Data Jumlah Ranmor s/d Bulan Mei Tahun 2004 dalam Enam Tahun Terakhir.
- Tabel 2 : PetambahanData Jumlah Ranmor s/d Bulan September Tahun 2003 dalam Enam Tahun Terakhir .
- Tabel 3 : Mutasi Kendaraan Bermotor Per Tahun s/d Bulan Mei 2003 dalam Enam Tahun Terakhir.
- Tabel 4 : Data Crime total unit ranmor tiga tahun terakhir 2003.
- Tabel 5 : Data Kendaraan Bermotor yang Diblokir Polisi di Samsat Polda Metro Jaya dari Tahun dalam Enam Tahun Terakhir dari Tahun 1998 s/d Tahun 2003.
- Tabel 9 : Data Kendaraan Bermotor yang Cabut Blokir di Samsat Polda Metro Jaya selama Enam tahun Terakhir dari tahun 1998 s/d September 2003.
- Tabel 10 : Data Perubahan identitas kendaraan lima tahun terakhir s/d 2002.
- Tabel 11 : Data Kendaraan Bermotor yang Tidak Memenuhi Standarisasi Pada Saat Melakukan Registrasi dan Identifikasi di Samsat Polda Metro Jaya Selama Empat Bulan dari Bulan April s/d Agustus 2003.
- Tabel 12 : Data Laka lintas tabrak lari tahun 2003.



DAFTAR ISI

	Hal.
Lembaran Pengesahan Pembimbing	
Lembaran Pengesahan Penguji.....	
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Permasalahan	6
3. Pokok-Pokok Persoalan.....	6
4. Dasar kebijakan.....	7
5. Maksud dan Tujuan.....	7
6. Metode Pendekatan.....	8
7. Pengertian-Pengertian.....	8
8. Ruang lingkup.....	11
9. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN.....	15
BAB III DATABASE KENDARAAN BERMOTOR SAAT INI	18
1. Samsat	18
2. Perkembangan Kendaraan Bermotor	20
3. Mekanisme Pelayanan	28
4. Sumber Daya Manusia	49
5. Materil / Fasjas	50

6.	Sistem dan Metoda.....	51
7.	Aspek Hukum	52
8.	Akuntabilitas.....	53
9.	Peranan Registrasi dan Identifikasi.....	54
10.	Polres / Polsek.....	61
11.	Dokumen Kendaraan Bermotor Kasus Peledakan.....	62
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		65
1.	Bagan Kuadran.....	67
2.	Strength (Kekuatan)	67
3.	Weeakness (Kelemahan)	69
4.	Oppertunities (Peluang).....	71
5.	threats (Kendala)	72
6.	Aplikasi program database.....	75
BAB V DATABASE KENDARAAN BERMOTOR YANG DIHARAPKAN		96
1.	Mekanisme registrasi identifikasi	96
2.	Pembenahan Penerbitan STNK.....	98
3.	Sumber Daya Manusia	116
4.	Matfasjas	116
5.	Sistem dan Metoda.....	117
6.	Aspek Hukum	118
7.	Akuntabilitas	119
8.	Peran Registrasi dan Identifikasi.....	119
9.	Peran Registrasi dan Identifikasi di dalam keterpaduan.....	125

BAB VI STRATEGI PEMBENAHAN DATA BASE	128
1. Pembenahan Database	128
a. Jangka Pendek (1-2 Tahun)	128
b. Jangka Sedang (2-3 Tahun)	131
c. Jangka Panjang (-5 Tahun).....	133
 BAB VII PENUTUP	 135
1. Kesimpulan.....	135
2. Rekomendasi.....	136

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Data kendaraan bermotor yang dipakai pada program pajak progresif.

Data kendaraan bermotor yang merupakan aset PT. Qsar.

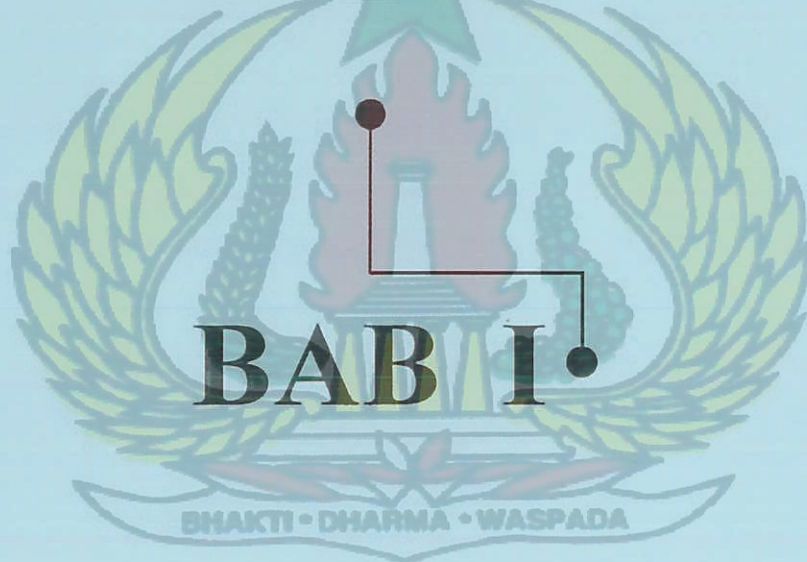
Pola Pikir

Alur Pikir

Daftar Pustaka

Riwayat Hidup





BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya dalam upaya penegakan hukum, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara profesional, hal ini terlihat dengan adanya kecenderungan peningkatan kriminalitas baik kuantitas maupun kualitas sejalan dengan makin meningkatnya pengangguran akibat dari krisis yang belum terselesaikan serta adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Polri adalah penyelenggara fungsi pemerintahan bertugas memelihara kamtibmas, melaksanakan penegak hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Makna supremasi hukum antara lain adalah bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equal before the law*). Penegakan hukum harus dilaksanakan secara transparan, menghormati hak azasi manusia dan setiap anggota Polri harus patuh terhadap hukum.

Tugas direktorat lalu lintas pada dasarnya merupakan bagian Integral dari tugas Polri yang melaksanakan fungsi Registrasi dan Identifikasi, yang senantiasa berorientasi pada prinsip cepat dan tepat waktu dengan tidak mengabaikan kepentingan identifikasi, keamanan (*security*) dan kualitas

produk pelayanan. Dalam aplikasinya dapat memanfaatkan teknologi *manajemen information sistem* (MIS) melalui Samsat sebagai database kendaraan bermotor.

Pada kenyataannya pengelolaan pajak kendaraan bermotor oleh Dispenda hanya mengelola pada aspek *prosperity* (ekonomis), yaitu meningkatkan pendapatan daerah (PAD) saja, tetapi belum menyentuh pada aspek *security* (keamanan) atau untuk mendukung tugas-tugas Kepolisian/fungsi operasional di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selama kondisi tersebut masih berlangsung, maka Polri akan mengalami kendala keterlambatan untuk memperoleh data kendaraan bermotor dalam memberikan informasi secara lengkap, cepat dan akurat guna kepentingan penyelidikan/penyidikan atas kejahatan atau tindak pidana terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, termasuk kebutuhan informasi yang diperlukan langsung oleh publik / masyarakat berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Data pencurian kendaraan bermotor yang belum terungkap di Polda Metro Jaya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir :

Tabel 1
DATA UNIT RANMOR
Yang Tidak Terungkap per Tahun 2000 s/d 2003

NO	TAHUN	TDK TERUNGKAP	KETERANGAN
1	2000	269	Data yg
2	2001	320	Dihimpun unit
3	2003	395	Ranmor Dit
Jumlah		984	Reskrim

Masih ditemukan adanya data yang di himpun oleh Biro Operasi Polda Metro Jaya dari wilayah hukum Polda Metro Jaya dari (Polres, Polsek), yang belum dilakukan pemblokiran terhadap kendaraan bermotor oleh masyarakat ,kurang lebih 40.000 kasus dalam kurun waktu 6 tahun sedangkan yang baru melakukan pemblokiran sebanyak 7.192 kendaraan bermotor, berarti dari data pencurian kendaraan bermotor yang belum terungkap di tambah dengan data laporan dari masyarakat yang belum melakukan pemblokiran kendaraan bermotornya, Polri khususnya Direktorat Reserse Kriminal belum melakukan kinerjanya secara maksimal didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat . Hal ini akan berimplikasi kepada tingkat profesionalisme Polri.

Stabilitas keamanan di Indonesia masih dipengaruhi oleh politik dunia khususnya aksi terorisme. Mobilitas yang tinggi dalam melalukan aksi teror masih menggunakan sarana kendaraan bermotor, berbagai peristiwa peledakan bom di Indonesia baik di Bali maupun di hotel JW MARRIOT bahkan yang terakhir tanggal 09 September 2004 di kedutaan besar Australia (Kuningan Jakarta), di identifikasi masih menggunakan sarana kendaraan bermotor jenis Daihatsu Zebra (Pick up / Box), kesulitan Polri untuk mengidentifikasi pemilik kendaraan bermotor tetap menjadi kendala bagi Polri dalam melakukan penyidikan/ penyelidikan aksi terorisme tersebut. Contoh gambar photo yang direkam oleh CCTV gedung Plasa Kuningan samping kanan Kedubes Australia sebelum meledak.

Masih ditemukan adanya data yang di himpun oleh Biro Operasi Polda Metro Jaya dari wilayah hukum Polda Metro Jaya dari (Polres, Polsek), yang belum dilakukan pemblokiran terhadap kendaraan bermotor oleh masyarakat ,kurang lebih 40.000 kasus dalam kurun waktu 6 tahun sedangkan yang baru melakukan pemblokiran sebanyak 7.192 kendaraan bermotor, berarti dari data pencurian kendaraan bermotor yang belum terungkap di tambah dengan data laporan dari masyarakat yang belum melakukan pemblokiran kendaraan bermotornya, Polri khususnya Direktorat Reserse Kriminal belum melakukan kinerjanya secara maksimal didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat . Hal ini akan berimplikasi kepada tingkat profesionalisme Polri.

Stabilitas keamanan di Indonesia masih dipengaruhi oleh politik dunia khususnya aksi terorisme. Mobilitas yang tinggi dalam melalukan aksi teror masih menggunakan sarana kendaraan bermotor, berbagai peristiwa peledakan bom di Indonesia baik di Bali maupun di hotel JW MARRIOT bahkan yang terakhir tanggal 09 September 2004 di kedutaan besar Australia (Kuningan Jakarta), di identifikasi masih menggunakan sarana kendaraan bermotor jenis Daihatsu Zebra (Pick up / Box), kesulitan Polri untuk mengidentifikasi pemilik kendaraan bermotor tetap menjadi kendala bagi Polri dalam melakukan penyidikan/ penyelidikan aksi terorisme tersebut. Contoh gambar photo yang direkam oleh CCTV gedung Plasa Kuningan samping kanan Kedubes Australia sebelum meledak.

data kendaraan bermotor tersebut secara lengkap yang umumnya diperlukan dalam penyelidikan tindak pidana.

Kesulitan memperoleh data kendaraan bermotor pada Samsat oleh Polri antara lain disebabkan oleh perangkat database yang dioperasikan oleh pemda (Dispenda) waktu operasionalnya sangat terbatas, sehingga di luar waktu operasionalnya ,Polri tidak dapat memanfaatkan database kendaraan bermotor yang tersimpan di Samsat.

Berangkat dari latar belakang pemikiran dan berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka masih terdapat banyak kelemahan pada sistem database yang dikelola oleh Dispenda perlu disempurnakan, termasuk kemampuan profesionalisme SDM Polri dalam melakukan tugas di lingkungan Samsat , belum adanya dukungan perangkat sistem informasi pengolahan data kendaraan bermotor yang layak dibawah operasional langsung Samsat Polda Metro Jaya, berdampak terhadap keterbatasan Ditlantas dalam memberikan informasi data kendaraan bermotor yang cepat dan akurat untuk kepentingan pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maupun tindak pidana lainnya serta peningkatan layanan kendaraan bermotor yang lebih optimal bagi kepentingan masyarakat.

Dalam rangka menciptakan profesionalisme dan meningkatkan kinerja SDM Polri dilingkungan Samsat agar memiliki kemampuan teknis operasional dalam menyelesaikan dengan baik tugas-tugas Registrasi dan Identifikasi . Untuk itu perlu dilakukan pembenahan database kendaraan bermotor yang

dapat bermanfaat bagi masing-masing instansi baik Polri, Dispenda maupun pihak terkait lainnya, melalui pembenahan sistem dan penerapan "Database Kendaraan Bermotor Samsat Polda Metro Jaya", maka akan terwujudnya adanya kepastian hukum di dalam memberikan informasi tentang Kendaraan Bermotor.

2. Permasalahan.

Berawal dari latar belakang permasalahan yang di gambarkan oleh penulis maka didapatkan suatu Permasalahan yaitu :

" Bagaimana Strategi pembenahan database kendaraan bermotor dalam pengungkapan Tindak Pidana di Polda Metro Jaya ?"

3. Pokok – Pokok Persoalan.

Sedangkan pokok – pokok persoalan dari permasalahan diatas :

- a. Bagaimana Database kendaraan bermotor dalam pengungkapan Tindak Pidana di Polda Metro Jaya saat ini ?
- b. Faktor–faktor yang mempengaruhi Strategi pembenahan database kendaraan bermotor dalam pengungkapan Tindak Pidana di Polda Metro Jaya ?
- c. Bagaimana Database kendaraan bermotor dalam Pengungkapan Tindak Pidana di Polda Metro Jaya yang diharapkan ?
- d. Bagaimana Strategi pembenahan database kendaraan bermotor dalam pengungkapan Tindak Pidana di Polda Metro Jaya ?

4. Dasar Kebijakan.

- a. UU No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan.
- b. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP.
- c. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Kep Men PAN No : 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang standar mutu pelayanan publik.
- e. INPRES RI No : INS/07/VI/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.
- f. INBERS No :29/INS/03/M/X/1999. Tentang pelaksanaan SAMSAT.
- g. Strategi bijak KaPolri 2002 – 2004 tentang Visi dan Misi.
- h. Action Plan Kapolda Metro Jaya.

5. Maksud Dan Tujuan.

a. Maksud.

Penulisan ini untuk memberikan gambaran tentang penyempurnaan sistem pada database yang tersedia di Samsat agar dapat pula mengakses kebutuhan informasi dalam mendukung tugas operasional Kepolisian , sekaligus merupakan penerapan kemampuan berfikir berdasarkan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di Sespim Polri.

b. Tujuan.

Adapun tujuannya adalah guna memenuhi tugas dalam pembuatan Naskah Perorangan (Naskap) bagi peserta Pendidikan Reguler ke- 40 Sekolah Staf dan Pimpinan Polri T.P.2004.

6. Metode Dan Pendekatan.

Metoda yang digunakan dalam penulisan ini dilaksanakan melalui observasi, wawancara dengan pendekatan deskriptif analitis.

7. Pengertian – Pengertian.

a. Database.

Adalah Database adalah sekumpulan informasi yang saling berhubungan (Suharto, 1995 : 1). Dalam database kendaraan bermotor Polda Metro Jaya maka informasi-informasi yang akan disampaikan adalah data-data tentang kendaraan dengan segala aspek yang ada di dalamnya seperti informasi nomor mesin, nomor rangka, jenis kendaraan, spesifikasi kendaraan dan lain-lain termasuk historical kepemilikan kendaraan dari awal sampai akhir, sehingga dengan database kendaraan bermotor nantinya setiap bentuk kejahatan yang menggunakan kendaraan bermotor dapat cepat teridentifikasi melalui layanan database kendaraan bermotor tersebut.

b. Sistem dan Informasi.

Sistem adalah komponen-komponen, elemen-elemen dan sub-sub komponen yang saling berhubungan, saling berkaitan, saling ketergantungan, dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya secara komprehensif dan terintegrasi.

Informasi adalah data (*input*) yang tetap diolah atau diproses melalui penghitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran akun (*updating*

account), dan lain-lainnya; dan akhirnya memperoleh informasi sebagai keluaran (*output*).

c. Database kendaraan bermotor yang on-line sistem (SAMSAT).

Data registrasi (pencatatan) dan identifikasi (pengenalan) kendaraan bermotor dapat ditampilkan secara akurat dan cepat harus memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan database kendaraan bermotor yang dapat diandalkan. Implementasi database kendaraan bermotor adalah penggabungan sistem komputer dan sistem telekomunikasi yang membentuk sistem jaringan komputer (*computerized network sistem*), sehingga memungkinkan proses pengaksesan data setiap saat dan dari manapun dengan cepat dan akurat (*on-Line sistem*). Pengaksesan data dilakukan antara lain untuk mengetahui identitas kendaraan bermotor dan pemilik, baik dalam rangka pelayanan, penyidikan dan untuk keperluan transaksi bisnis sekalipun, sebagai contoh kendaraan bermotor yang akan dibeli sah atau terlibat dalam Tindak Pidana.

d. Pelayanan.

Adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi.

e. File / arsip.

Adalah kumpulan data informasi yang mempunyai nama yang disusun secara teratur yang biasanya berupa naskah.

f. Akuntabilitas.

Kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggung jawaban.

g. Pencurian bermotor / pencurian.

Adalah suatu kegiatan yang di lakukan oleh seorang atau kelompok dengan melakukan perbuatan pencurian terhadap kendaraan bermotor roda dua atau roda empat.

b. Penyelundupan.

Adalah suatu kegiatan yang di lakukan oleh seorang atau kelompok dengan memasukan barang atau kendaraan bermotor dari luar negeri ke dalam negeri tanpa di lengkapi dengan dokumen yang sah.

c. Pemalsuan.

Adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan memalsukan atau meniru surat atau dokumen untuk kepentingan pribadi atau kelompok. **BHAKTI • DHARMA • WASPADA**

d. Dokumen.

Adalah sesuatu yang di tulis atau yang tercetak, yang dapat di sebagai bukti atau keterangan dalam menjelaskan keabsahan atau legalitas daripada barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

e. Kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang terjadi di jalan raya dengan tidak terduga atau tidak disengaja serta terjadi secara tiba tiba yang melibatkan pengguna jalan baik pejalan kaki, kendaraan bermotor atau tidak, mengakibatkan kerugian materil, luka atau jiwa manusia.

8. Ruang lingkup.

Ruang lingkup penulisan ini meliputi bidang registrasi identifikasi di Samsat Polda Metro Jaya yang dilaksanakan melalui Entry Data dan peran fungsi reg – ident di dalam pengungkapan tindak pidana antara lain:

1. Mekanisme penerbitan STNK.

- a). Kelemahan pada mekanisme penerbitan STNK
- b). Kendaraan yang menggunakan fasilitas CBU / CKD.
- c). Form "A", form "B" dan form "C".
- d). Kendaraan hasil lelang, dump TNI/Polri dan hasil hibah.
- e). Mutasi kendaraan luar dan dalam daerah.
- f). Pemblokiran kendaraan bermotor. • WASPADA
- g). Data pengeluaran faktur dari ATPM.
- h). Data KTP dengan kode lokasi (menghindari KTP palsu).
- i). Ganti warna / ganti nomor polisi.
- j). STNK Rahasia dan STNK khusus.
- k). STNK dan BPKB duplikat.

2. Sumber Daya Manusia.
3. Materiil , Fasilitas dan Jasa.
4. Sistem dan Metoda
5. Aspek Hukum
6. Akuntabilitas
7. Peran Registrasi dan Identifikasi di dalam mendukung tugas – tugas Kepolisian antara lain :
 - a) Pada Direktorat lalu lintas khususnya subdit gakkum (Tilang dan kecelakaan lalu lintas / Tabrak lari).
 - b) Pada Direktorat Reskrim khususnya pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Money laundering , white collar crime, pemalsuan dokumen, manipulasi pajak.
 - c) Pada Direktorat Intelkam khususnya dalam melakukan penyelidikan pada Ormas, parpol dan LSM yang bermasalah.
 - d) Pada Direktorat Obyek Vital khususnya dalam memberikan pengamanan dan pengawalan terhadap Orang Asing , Konsulat , Staf Kedutaan, Duta Besar dan Diplomat. • WASPADA
 - e) Polres dan Polsek dalam proses permohonan blokir kendaraan bermotor oleh masyarakat.
 - f) Keterpaduan sistem informasi kendaraan bermotor antar instansi terkait.

- g) Keterpaduan sistem informasi kendaraan bermotor antardirektorat di Polda Metro Jaya.

9. Sistematika.

a. Bab I Pendahuluan.

- 1) Latar Belakang.
- 2) Permasalahan.
- 3) Pokok –Pokok Persoalan.
- 4) Dasar Kebijakan.
- 5) Maksud dan Tujuan.
- 6) Metode Pendekatan.
- 7) Pengertian – pengertian.
- 8) Ruang Lingkup.

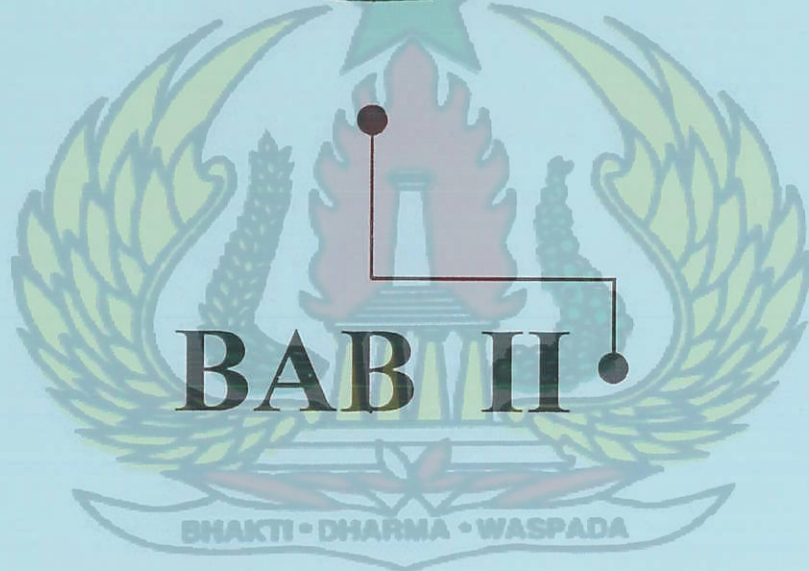
b. Bab II Landasan pemikiran

berupa konsep pemikiran pembenahan database kendaraan bermotor yang dituangkan di dalam penulisan dengan berdasarkan permasalahan – permasalahan yang terjadi di Samsat Polda Metro Jaya.

c. Bab III Database kendaraan bermotor dalam pengungkapan

Tindak Pidana di Polda Metro Jaya saat ini. Kelemahan – kelemahan yang terjadi pada mekanisme administrasi Samsat saat ini dalam perannya di bidang registrasi dan identifikasi serta di dalam mendukung tugas – tugas kepolisian guna mengungkap tindak pidana.

- d. Bab IV Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembenahan database kendaraan bermotor dalam pengungkapan Tindak Pidana di Polda Metro Jaya.** Di dalam pembahasannya menggunakan analisa "SWOT" untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi.
- e. Bab V Database kendaraan bermotor dalam pengungkapan Tindak Pidana di Polda Metro Jaya yang di harapkan.** Konsep pembenahan / perubahan tentang kelemahan – kelemahan database kendaraan bermotor Samsat dan konsep peran registrasi identifikasi di dalam membantu pengungkapan tindak pidana.
- f. Bab VI Strategi pembenahan database kendaraan bermotor dalam pengungkapan Tindak Pidana di Polda Metro Jaya.** Konsep strategi jangka pendek , jangka sedang dan jangka panjang untuk membenahi database kendaraan bermotor di Samsat Polda Metro Jaya.
- g. Bab VII Penutup.**
1. Kesimpulan.
 2. Rekomendasi.



BAB II

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

Keberadaan Samsat sebagai kantor bersama antara mitra kerja Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dengan Dinas Pendapatan DKI Jakarta , Propinsi Jawa Barat , Propinsi Banten serta Asuransi PT. Jasa Raharja dalam menjalankan tugas Registrasi Identifikasi dan pelayanan administrasi berupa penyelesaian kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, pelayanan kepada masyarakat perlu diciptakan dengan suasana yang kondusif, baik dari segi keamanan, kenyamanan dan ketertiban sehingga ikut memperlancar / mempercepat di dalam proses pelayanan (one stop service).

Polri yang diberikan kepercayaan dan tanggung jawab mempunyai kewenangan di dalam Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor dalam bentuk pelayanan penerbitan STNK dan BPKB menyadari sepenuhnya bahwa pelayanan tersebut merupakan perwujudan tugas Polri dalam melaksanakan tugas tugas kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), terutama berkaitan dengan penyelidikan / penyidikan pada kasus kasus pelanggaran dan tindak pidana.

Mengingat kondisi perkembangan dan keberadaan kendaraan bermotor sampai saat ini terus meningkat pesat diwilayah hukum Polda Metro Jaya, baik segi kualitas maupun kuantitas, demikian pula situasi permasalahan sekitar gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terkait dengan

kendaraan bermotor menjadi semakin beragam dan kompleks, maka proses pengelolaan data harus sekaligus menjadi bagian integral dengan proses pengecekan data fisik bagi setiap kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat, sehingga hasil akhir dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan maupun untuk kepentingan mengembangkan fungsi, tugas dan tanggung jawab Polri pada umumnya.

Disamping tuntutan profesionalisme, Samsat Polda Metro Jaya belum memiliki database kendaraan bermotor (*system computer*) dengan menganalisa perkembangan data kendaraan bermotor dari waktu ke waktu secara cermat, lengkap, tepat dan akurat, maka petugas Samsat dan Polri pada umumnya sering dihadapkan dengan berbagai kendala untuk melakukan tindakan antisipatif mencegah tindak pidana kendaraan bermotor seperti pencurian, penggandaan/pemalsuan dokumen, penyelundupan termasuk proses penanganan dan penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Database kendaraan bermotor samsat Polda Metro Jaya yang mempunyai kekuatan hukum merupakan perwujudan akuntabilitas dari institusi Polri kepada masyarakat, masyarakat sebagai wajib pajak yang setiap tahunnya mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan mentaati kewajiban sebagai wajib pajak, masyarakat juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum

di dalam mendapatkan informasi kendaraan bermotor maupun dokumen – dokumen kendaraan bermotor yang di terbitkan oleh Polri melalui Pelayanan administrasi samsat .

Polri sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang – undang No.2 tahun 2002 pasal 15 (1)j tentang Pusat Informasi Kriminal Nasional dan pasal 15 (2)b tentang Regristrasi dan Identifikasi , peran ini yang harus dilaksanakan oleh Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan kebijakan dan strategi kapolri serta action plan Kapolda Metro Jaya .

Perubahan paradigma Polri salah satunya implementasinya dengan membenahi sistem yang ada pada salah satu fungsi di dalam Institusi Polri yaitu fungsi lalu lintas , kewenangan yang ada pada fungsi lalu lintas harus selalu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kelemahan – kelemahan yang terjadi di dalam pelayanan administrasi samsat.

Kerjasama AIPO antara Kepolisian negara – negara ASEAN dengan Indonesia harus diwujudkan dengan memberikan informasi – informasi tentang kejahatan trans nasional crime / tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dinegara – negara ASEAN yang di mungkinkan masuk ke Indonesia. Informasi tentang kendaraan bermotor melalui INTERPOL / NCB Indonesia akan mempunyai dampak yang positif bagi perkembangan atau hubungan kerjasama yang dibentuk.



BAB III

BAB III

DATABASE KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA DI POLDA METRO JAYA SAAT INI

1. Samsat.

Polri adalah salah satu penyelenggara fungsi Kepolisian yang diberi wewenang oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan dan Undang – undang No.2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai pelaksana registrasi identifikasi berkewajiban untuk melaksanakan undang-undang tersebut, untuk mewujudkan kepastian hukum di dalam memberikan pelayanan administrasi Samsat kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang dan peraturan tersebut, Polisi lalu lintas sebagai pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor dapat : menerbitkan BPKB dan STNK sebagai bukti bahwa pemilik kendaraan bermotor telah mendaftarkan kendaraannya di Kepolisian. Pendaftaran tersebut menyangkut riwayat kepemilikan, identifikasi kepemilikan kendaraan dan identifikasi fisik kendaraan. Itulah salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Polisi Lalu Lintas di bidang registrasi dan identifikasi (Traffic Registration).

Samsat di wilayah Polda Metro Jaya meliputi Samsat di wilayah DKI Jakarta , Samsat Bekasi dan Cikarang , Samsat Kodya Tangerang dan BSD , Samsat Depok dan Cinere, dimana tiap – tiap Samsat pada masing – masing

propinsi seperti DKI Jakarta , Jabar dan Banten berbeda program databasenyang yang dikelola masing – masing Dispenda . Samsat Bekasi dan Samsat Tangerang program databasenyang berada di Bandung dan Banten sehingga pada saat dibutuhkan harus mencari file di tempat penyimpanan arsip , sementara waktu menghubungi ke KPTI Dispenda Bandung dan Dispenda Banten memerlukan waktu dan cukup sulit untuk menghubungi staf Dispenda tersebut.

Kurangnya pengalaman tentang pentingnya data registrasi dan identifikasi Kendaraan bermotor oleh para kepala kesatuan kewilayahan terhadap sistem yang perlu dimiliki oleh Polri untuk meningkatkan pelayanan administrasi Samsat telah memunculkan berbagai kelemahan pada setiap bagian sehingga banyak dimanfaatkan oleh oknum atau kelompok sindikat pemalsu dokumen kendaraan bermotor untuk mengambil peluang menerbitkan STNK dan BPKB dengan dokumen palsu.

Lemahnya kualitas kemampuan sumber daya manusia pada personel Samsat lebih dikarenakan oleh personel Samsat yang kurang memiliki pengetahuan , keahlian di bidang registrasi dan identifikasi . Masih banyaknya personel Samsat yang belum mengikuti pendidikan kejuruan bidang registrasi identifikasi kendaraan bermotor.

Peran registrasi dan identifikasi selama ini tidak sepenuhnya dapat membantu tugas – tugas kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana ataupun untuk kepentingan yang lainnya. Seyogyanya Polri dapat

membangun kebutuhan informasi data kendaraan bermotor melalui pelayanan registrasi identifikasi pada Samsat , sehingga masyarakat merasa yakin bahwa satu – satunya Instansi yang akurat dapat memberikan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor hanya Kepolisian

2. Perkembangan kendaraan bermotor di Wilayah Polda Metro Jaya.

a. Data jumlah kendaraan bermotor di wilayah Polda Metro Jaya.

Tabel 2

Data Jumlah kendaraan bermotor di Samsat Polda Metro Jaya dari tahun 1998 s/d Bulan Mei 2004.

TAHUN	PENUMPANG	BEBAN	BUS	SEPEDA MOTOR	JUMLAH
1998	1.107.187	379.605	311.890	2.077.980	3.876.562
1999	1.125.334	380.353	311.890	2.092.053	3.909.495
2000	1.237.578	396.776	311.627	2.112.961	4.058.942
2001	1.345.056	415.970	312.322	2.446.471	4.519.819
2002	1.434.802	441.085	315.135	2.816.442	5.007.464
2003	1.530.226	464.928	315.652	3.310.318	5.621.124
Mei 2004	1.572.294	473.912	315.849	3.549.781	5.911.836

Jumlah kendaraan bermotor di wilayah Polda Metro Jaya terus meningkat dan pendataan harus dilakukan sesuai dengan fungsi registrasi identifikasi dengan berpedoman pada aspek *security* (keamanan) apabila tidak dapat dipenuhi maka akan menyulitkan mengidentifikasi identitas kendaraan bermotor dan pemiliknya .

Tabel 3

Pertambahan jumlah kendaraan bermotor pertahun (6 tahun terakhir) di Samsat Polda Metro Jaya dari tahun 1998 s/d Bulan September 2003

TAHUN	PENUMPANG	BEBAN	BUS	SEPEDA MOTOR	JUMLAH
1998	13.017	- 1.183	519	22.748	33.901
1999	18.147	748	-135	14.073	32.933
2000	112.244	16.423	-128	20.908	149.447
2001	107.478	19.194	695	333.510	460.877
2002	41.918	12.410	-9	223.896	278.215
2003	95.424	23.843	517	493.876	613.660

Pertambahan jumlah kendaraan yang tinggi juga akan menyulitkan bagi Polri dalam menyiapkan tempat penyimpanan arsip / dokumen kendaraan bermotor dan harus diantisipasi oleh Polri terhadap tempat penyimpanan arsip / dokumen yang sudah tidak layak / memenuhi syarat lagi untuk menampung / menyimpan arsip yang bertambah terus jumlah kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Metro Jaya maka , apabila tidak segera diatur dalam sistem database kendaraan bermotor yang dapat memudahkan bagi Polri sendiri ,suatu saat institusi Polri akan mendapat tuntutan dari masyarakat di dalam mengamankan dokumen atau file kendaraan bermotornya .

Proses mutasi baik dari ke luar daerah maupun masuk dari daerah frekuensinya tinggi sehingga proses secara manual di dalam pengecekannya akan sangat rawan dengan adanya pemalsuan dokumen

dan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen tersebut. Contoh kasus pemalsuan dokumen mutasi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Bali, kendaraan bermotor tersebut sudah dijual belikan kepada masyarakat setempat yang merupakan kendaraan hasil curian dan seolah – olah dilengkapi dengan surat – surat yang sah.

Adapun kendaraan yang mutasi dari Samsat Polda Metro Jaya ke luar Samsat Polda Metro Jaya selama 9 bulan terakhir tahun 2003 sebagai berikut :

Tabel 4
Jumlah Mutasi Kendaraan bermotor di Samsat Polda Metro Jaya
Tahun 2003.

BULAN	PENUMPANG	BEBAN	BUS	SEPEDA MOTOR	JUMLAH
JAN	2.474	497	-	1.979	4.950
FEB	2.556	508	2	1.321	4.385
MARET	1.839	535	2	1.194	3.570
APRIL	2.065	1.130	4	1.152	4.352
MEI	1.772	495	1	1.041	3.308
JUNI					
JULI					
AGUSTUS					
SEPT.					
OKTOBER					
NOPEMBER					
DESEMBER					

b. Data pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polda metro Jaya.

Tabel 5
Data CT unit ranmor selama 3 tahun terakhir di wilayah
Polda Metro Jaya.

<i>NO</i>	<i>PERKARA</i>	<i>TH 2003</i>	<i>2002</i>	<i>2001</i>
1	Pemalsuan	18	92	15
2	Curanmor	232	197	208
3	Perampasan	33	34	25
4	Penggelapan	36	44	51
5	Penipuan	34	42	43
6	Lain-lain	66	77	65
	JUMLAH	419	489	407

Dari data yang dihimpun oleh unit ranmor dengan masyarakat yang kehilangan kendaraan bermotornya melakukan pemblokiran tidak semuanya minta surat pemblokiran dari Polda ,Polres dan Polsek dikarenakan proses selama ini cukup memakan waktu tidak dilakukan oleh Polri dalam waktu yang cepat .Samsat Polda Metro Jaya belum membenahi mekanisme yang benar – benar dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat , bahwa pelayanan administrasi oleh Polri sesungguhnya mempunyai implikasi hukum .

Database Samsat belum terkait program online sistem dengan Polres dan Polsek untuk laporan kejadian atau tindak pidana sehingga masih bersifat manual dan harus memerlukan waktu untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya.

c. Data blokir kendaraan bermotor di wilayah Polda Metro Jaya.

Tabel 6

Data Kendaraan Bermotor yang Diblokir Polisi di Samsat Polda Metro Jaya Selama 6 Tahun Terakhir dari Tahun 1998 s/d Sept 2003.

NO.	TAHUN	B L O K I R		J U M L A H
		KEJAHATAN	LAIN-2	
1.	1998	3.256	65	3.321
2.	1999	2.800	50	2.850
3.	2000	2.944	87	3.031
4.	2001	8.262	-	8.262
5.	2002	48.983	-	48.983
6.	2003	7.187	5	7.192

Data blokir Kendaraan bermotor yang ada di Samsat tidak pernah sesuai dengan data di Polsek, Polres dan ditreskrim . Hal ini menunjukkan bahwa belum terintegrasinya data antardirektorat dengan antarPolek dan Polres yang dapat saling mendukung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adanya selisih data tersebut juga menunjukkan kesan belum siapnya Polri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kendala ini lambat laun akan menjadi bumerang bagi institusi Polri, apabila tidak segera menyiapkan sistem yang benar-benar dapat dijadikan landasan bagi Polri agar database tersebut dapat dipergunakan mendukung direktorat-direktorat lainnya untuk tugas operasional Kepolisian lainnya.

Tabel 7

Data Kendaraan Bermotor yang Cabut Blokir di Samsat Polda Metro Jaya Selama 6 Tahun Terakhir Tahun 1998 s/d Sept 2003.

NO.	TAHUN	CABUT BLOKIR		JUMLAH
		KEJAHATAN	LAIN-LAIN	
1.	1998	285	56	341
2.	1999	339	33	372
3.	2000	638	10	648
4.	2001	1.068	-	1.068
5.	2002	1.077	-	1.077
6.	2003	2.328	-	2.328

Data kendaraan yang ada menunjukkan, bahwa pengajuan permohonan cabut blokir sebagian besar merupakan kasus tindak pidana. Tentunya dengan pembukaan blokir di komputer Dispenda, harus diikuti dengan adanya proteksi data terhadap pihak yang tidak berhak membuka blokir. Misalnya saja, ada password yang dipergunakan untuk mencegah penyalahgunaan pembukaan blokir yang tidak sesuai dengan ketentuan .

Banyaknya permohonan blokir yang diajukan oleh berbagai pihak seperti misalnya perorangan, pengacara tersangka, BPPN, Kejaksaan, pengadilan, maupun kepolisian, perlu diikuti dengan sistem keamanan yang baik guna menghindari adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum petugas dan merubah mekanisme yang berlaku.

Data kendaraan bermotor proses tukar nama dan proses lain-lain (ganti warna, rubah bentuk, ganti mesin, ganti nomor polisi dan STNK hilang) selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 8

Perubahan Identitas Kendaraan s/d Tahun 2002 dalam Lima Tahun Terakhir

NO.	TAHUN	P R O S E S	
		TUKAR NAMA	LAIN – LAIN
1.	1998	226.194	59.253
2.	1999	241.355	73.600
3.	2000	190.087	82.181
4.	2001	142.391	93.930
5.	2002	216.236	37.730

Kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standarisasi banyak didapatkan pada waktu melakukan cek fisik. Selain itu, bukan hanya nomor rangka dan nomor mesin saja yang tidak standar, tetapi banyak juga didapatkan STNK dan BPKB palsu yang dimiliki oleh masyarakat yang tertipu ketika membeli kendaraan bermotor tersebut.

Data Kendaraan Bermotor yang Tidak Memenuhi Standarisasi Pada Saat Melakukan Registrasi dan Identifikasi di Samsat Polda Metro Jaya Selama 4 Bulan terakhir dari Bulan April s/d Agustus 2003.

Tabel 9

NO.	BULAN	KASUS		
		NOKA & NOSIN TDK STANDAR	STNK & BPKB PALSU	BLOKIR POLISI
1.	APRIL	26	14	27
2.	MEI	19	8	9
3.	JUNI	6	3	5
4.	JULI	17	2	2
5.	AGUSTUS	5	4	8

d. Data Laka lantab Tabrak lari di wilayah Polda Metro Jaya.

Tabel 10

Data laka lantab tabrak lari tahun 2003
di wilayah Polda Metro Jaya.

N O.	WIL	KEJADIAN 3 - 4			JMLH KJD	KORBAN			JMLH KRBA N	KERUGIAN	
		K	L	M		MD	LB	LR		BEND A	RUPIAH
1.	MAKO	7	22	36	65	7	20	5	32	55	112.300.0 00,-
2.	JAKPUS	15	9	2	26	15	8	4	27	24	26.500.00 0,-
3.	JAKUT	16	4	1	21	16	2	3	21	18	11.000.00 0,-
4.	JAKBAR	6	3	0	9	6	3	2	11	10	22.500.00 0,-
5.	JAKSEL	17	70	8	95	18	55	18	91	87	92.500.00 0,-
6.	JAKTIM	3	4	3	10	4	2	3	9	8	6.800.000, -
7.	TNG	3	1	0	4	3	2	0	5	6	10.500.00 0,-
8.	BKS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	DPK	9	4	1	14	9	4	2	15	9	21.000.00 0,-
JUMLAH		76	117	51	244	78	96	37	211	217	303.600.0 00,-

Meningkatnya jumlah kasus laka lantab tabrak lari tiap tahun merupakan target dari subdit gakkum direktorat lalu lintas untuk mengungkap pelaku

pengemudi kendaraan bermotor tersebut , kesulitan atau kelemahan yang dimiliki oleh Ditlantas sampai saat ini belum ada upaya perbaikan / pembenahan untuk meminimalkan atau menekan angka kasus kecelakaan tabrak lari.

3. Mekanisme pelayanan administrasi STNK.

Adapun prosedur pelayanan dalam pengurusan STNK adalah sebagai berikut :

a. Mekanisme

- 1) Wajib pajak melengkapi persyaratan dan mengisi formulir yang disediakan.
- 2) Penelitian persyaratan dan identitas pemilik kendaraan bermotor oleh petugas loket pendaftaran.
- 3) Registrasi pada buku induk.
- 4) Input data komputer.
- 5) Koreksi data dokumen kendaraan bermotor dengan data komputer (print komputer).
- 6) Korektor Paur STNK dan Kasi Pajak.
- 7) Validasi notice (Dispenda).
- 8) Notice di serahkan kepada wajib pajak.
- 9) Wajib pajak bayar di kasir (Kasda).

10) Penyerahan STNK, TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan KTL
(Bukti Pelunasan Pajak).

b. Kelemahan penerbitan STNK di Samsat polda Metro Jaya yang ada pada saat ini adalah sebagai berikut :

1) Perpanjangan dan Pengesahan STNK

Kelemahannya.

Masih ditemukannya data kosong sehingga untuk mengisi data kembali harus menyalin data dari buku register yang mengakibatkan lamanya pelayanan terhadap wajib pajak.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Baru.

a) Kelemahannya.

- (1) Masih adanya loket khusus yang dapat melakukan perubahan tipe guna menghindari beban pajak yang tinggi (Manipulasi pajak).
- (2) Masih ditemukannya kendaraan "CBU" yang tidak dilengkapi dengan form "A" (hanya dilengkapi dengan "CKD" seolah-olah kendaraan tersebut bukan kendaraan "CBU". Hal ini disebabkan karena belum adanya program komputer yang dapat menunjukkan bahwa kendaraan tersebut baru "CBU" setelah dimasukan NIK/VIN).

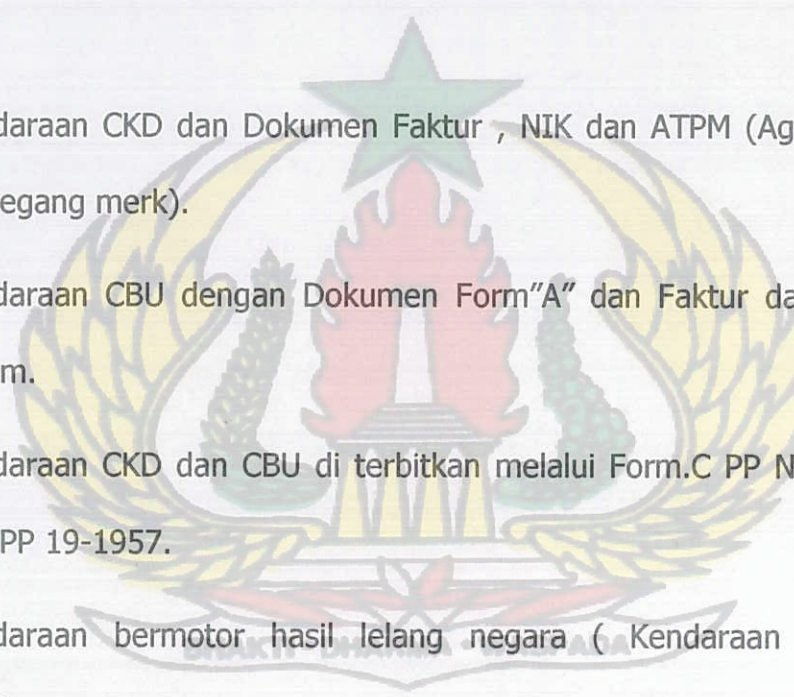
- (3) Penelitian dokumen kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh instansi terkait pada saat penelitian oleh petugas Samsat dilakukan dengan manual sehingga tidak menutup kemungkinan adanya celah-celah terhadap para pelaku kejahatan untuk memalsukan dokumen kendaraan bermotor (faktur, form "A", form "B", form "C" dan lelang) yang dapat didaftarkan untuk mendapatkan atau diterbitkannya dokumen / STNK yang asli.
- (4) Polri tidak memiliki data kendaraan bermotor yang masuk ke pabean Indonesia.
- (5) Polri tidak memiliki data awal tentang kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas PP 8 th 1955 dan PP-19 th 1957 yang diterbitkan dalam bentuk Form "B" dan Form "C".
- (6) Polri tidak mengetahui data awal kendaraan bermotor yang ditahan oleh bea cukai dari kasus penyelundupan untuk dimasukkan ke menteri keuangan dalam rangka dilakukan pelelangan dan ini dapat terjadi perubahan data dari kantor-kantor yang telah disetujui untuk dilelang.

Kendaraan bermotor yang dilelang tidak pernah dicross-check datanya ke masing-masing Samsat dan tidak dilakukan penelitian untuk keabsahan/keaslian nomor rangka dan nomor mesin dari Puslabfor POLRI.

3) Bea Balik Nama Kendaraan Lama.

Masih banyaknya ditemukan proses permohonan ganti nomor polisi kendaraan dimana setelah kendaraan mendapatkan nomor polisi yang baru namun nomor polisi yang lama masih muncul pada komputer (belum dimatikan di database Dispenda), sehingga mengakibatkan indentitas ganda (satu kendaraan bermotor dua nomor polisi).

c. Penerbitan STNK yang terbagi dalam beberapa dokumen CKD / CBU.

- 
- 1) Kendaraan CKD dan Dokumen Faktur , NIK dan ATPM (Agen tunggal pemegang merk).
 - 2) Kendaraan CBU dengan Dokumen Form "A" dan Faktur dan Importir umum.
 - 3) Kendaraan CKD dan CBU di terbitkan melalui Form.C PP No. 8 -1955 dan PP 19-1957.
 - 4) Kendaraan bermotor hasil lelang negara (Kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang masuk ke pabean Indonesia yang tidak di lengkapi Dokumen Syah).
 - 5) Kendaraan bermotor hasil lelang kejaksanaan (Kendaraan bermotor-kendaraan bermotor hasil sitaan penyidikan Polri yang sudah tidak ditemukan pemilik yang syah).

6) Kendaraan Dump, TNI dan Polri.

7) Kendaraan mutasi dan luar daerah.

d. Persyaratan dan Mekanisme penerbitan STNK yang dilengkapi dokumen CBU /CKD.

1) Kendaraan bermotor yang di terbitkan Faktur / NIK , ATPM adalah kendaraan bermotor CKD.

a) Persyaratan.

(1) Pemohon melengkapi Identitas.

(2) Cek Fisik.

(3) Faktur.

(4) Sertifikat NIK.

b) Mekanisme.

(1) Petugas Polri menerima berkas dan kelengkapan dan pemohon untuk di lakukan penelitian.

(2) Petugas Polri meneliti kelengkapan dan kemudian membukukan / Registrasi pada buku induk.

(3) Petugas Polri memasukan data Kendaraan bermotor sesuai Dokumen yang ada pada database" dan kemudian menerbitkan Notice / Resi. Kemudian di lakukan penelitian dan apabila sesuai dan di serahkan kepada pemohon guna di

lakukan pembayaran. yang kemudian petugas Kasir ke bagian validasi dan kemudian STNK diterbitkan .

c) Kelemahannya.

Kalau di lihat dari hal tersebut terlihat penelitian Samsat Sederhana sekali dan tidak menutup kemungkinan adanya celah-celah terhadap para pelaku, untuk memanfaatkan kelemahan ini. dan mendaftarkan Faktur (Dokumen) yang di palsukan dan kemudian terbit Dokumen / STNK yang sah. Penelitian terhadap dokumen lelang / dump TNI harus dilakukan pengecekan terhadap surat keputusan dari Panglima TNI / KaPolri dan cross chek kepada departemen logistik untuk mengetahui keaslian dari pada surat keputusan tersebut , langkah koordinasi tidak hanya kepada internal Polri saja melainkan instansi terkait (Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan, Deperindak). Contoh : STNK dan BPKB mobil lelang/ Dump ABRI yang lolos menggunakan dokumen palsu dan diproses di Samsat dikarenakan anggota Samsat tidak mengetahui keaslian dokumen , online sistem antarinstitusi terkait untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen lelang / dump TNI atau Polri.

R/ 069879/III/2002/DIRUMMO
I. IDENTITAS KENDARAAN No. Reg. : 10292420023489

1. Nomor Polisi	2. Merk	3. Type	4. Jenis	5. Model	6. Tahun Pembuatan	7. Tahun Perakitan	8. Isi Silinder	9. Warna	10. Jumlah Sumbu	11. Jumlah Roda	12. Bahan Bakar	13. No. Sertifikat Uji Type
				SEDAN	1988	1988	2600-cc	ABU-ABU	2 (DUA)	4 (EMPAT)	BENSIN	

Dibuatkan di : **JAKARTA**
 Pada Tanggal : **14-3-2002**

KEPALA
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH METRO JAYA

II. IDENTITAS PEMILIK C N:1267923 G

NAMA PEMILIK : ALANAY
 ALANAY
 PERKERJAAN :

Model Persewaan	Model Bus	Model Bus	Spesifikasi Bus	Kendaraan Khusus
1. Sedan 2. St. Wagon 3. Min Bus 4. Jeep 5. Lain-lain	1. Bus 2. Micro Bus 3. Bus Berlingkang 4. Lain-lain	1. Pick Up 2. Delivery Van 3. Truck 4. Tractor 5. Lain-lain	1. Tipe Motor Suku 2. Tipe Motor Suku 3. Tipe Motor Suku 4. Tipe Motor Suku 5. Tipe Motor Suku	1. Model Persewaan 2. Model Ambulans 3. Model Jambak 4. Trak 5. Lain-lain

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
 UNDANG-UNDANG NO. 14/1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

No. : 0724278/MJ/2001

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR POLISI : B 8545 MS BN. DUMP ABRI
 NAMA PEMILIK : D31
 ALAMAT :

MERK/TYPER : MERC.BENZ 190 E IDENT : 1A3298208WINR
 JENIS-MODEL : SEDAN WARNA TNKB : HITAM
 TAHUN PEMBUATAN : 1988 BAHAN BAKAR : BENSIN
 TAHUN PERAKITAN : 1988 KODE LOKASI : 14440
 ISI SILINDER : 02600 JML. USHA YANG DIPERKERLEHMAN :
 W A R N A : ABU-ABU METALIK NO. SURT PENDAFT. : 12
 NOMOR RANGKAI/NIK : WDB2010232F236568
 NOMOR MESIN : 10292420023489
 NOMOR BPKB : BERLAKU S/D : 07-01-2007

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH METRO JAYA
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH METRO JAYA

2) Kendaraan bermotor CBU dengan Dokumen Form "A" dan Faktur dari Importir.

a) Persyaratan.

- (1) Form "A" yang di terbitkan Bea Cukai.
- (2) TPT (Tanda pengujian Type dari Deperindak).
- (3) PIB (Pemberitahuan Import Barang dari Bea Cukai).
- (4) Faktur dari Importir.
- (5) Identitas pemilik
- (6) Rekomendasi dari Dirlantas Babinkam Polri

(7) Cek Fisik Kendaraan bermotor

b) Mekanisme.

- (1) Petugas Polri menerima berkas dan kelengkapan dan pemohon untuk di lakukan penelitian.
- (2) Petugas Polri meneliti kelengkapan dan kemudian membukukan / Registrasi pada buku induk.
- (3) Petugas Polri memasukan data Kendaraan bermotor sesuai Dokumen yang ada pada database dan kemudian menerbitkan Notice / Resi.
- (4) Kemudian di lakukan penelitian dan apabila sesuai dan di serahkan kepada pemohon guna di lakukan pembayaran, yang kemudian petugas Kasir ke bagian validasi dan kemudian diterbitkan STNK.

c) Kelemahannya.

- (1) Polri tidak memiliki Speciment Form "A" Cap Stempel dan tanda tangan pejabat Bea Cukai.
- (2) Polri tidak memiliki data Kendaraan bermotor yang masuk ke Pabean Indonesia.
- (3) Penelitian Dokumen secara Manual.

- 3) Kendaraan Bermotor CKD / CBU fasilitas PP 8 tahun 1955 dan PP 19 tahun 1957 yang dilengkapi dengan dokumen form "C" .

a) Persyaratan.

Apabila Kendaraan bermotor "CKD" persyaratannya yang harus di lengkapi :

- (1) Faktur dari ATPM.
- (2) Form "C" dari Bea Cukai.
- (3) PIB dari Bea Cukai.
- (4) Cek fisik.
- (5) Identitas Pemilik.
- (6) Rekomendasi dari Dir Lantas Babinkam Polri.
- (7) Cek List guna cross cek pada penomoran CD /corps diplomat (Penomoran khusus).

Apabila Kendaraan bermotor "CBU", persyaratannya yang di lengkapi :

- (1) Form "C" dari Bea Cukai.
- (2) PIB dari Bea Cukai.
- (3) TPT Import dari Deperindak.
- (4) Cek Fisik.

- (5) Identitas pemilik.
- (6) Rekomendasi dari Dir Lantas Babinkam Polri.
- (7) Cek list guna Cros cek pada penomoran "CD" /corps diplomat (Penomoran khusus).

b) Mekanisme.

- (1) Petugas Polri meneliti kelengkapan dan kemudian membukukan / Registrasi pada buku induk.
- (2) Petugas Polri memasukan data Kendaraan bermotor sesuai Dokumen yang ada pada database Kemudian menerbitkan Notice / Resi kemudian di lakukan penelitian dan apabila sesuai dan di serahkan kepada pemohon guna di lakukan pembayaran, yang kemudian petugas Kasir ke validasi dan kemudian diterbitkan STNK.

c) Kelemahannya.

- (1) Polri CQ Dit Lantas tingkat Polda, Khususnya Polda Metro Jaya tidak memiliki data awal tentang Kendaraan bermotor yang mendapat fasilitas PP.8-1955 dan PP.19 tahun 1957 yang di terbitkan dalam Form "B" dan Form "C".
- (2) Penelitian masih secara manual (dengan kasat mata) sangat di mungkinkan terjadinya kebocoran-kebocoran di dalam

penelitian Dokumen. contoh dokumen dari kedutaan. Dokumen asli atau palsu dipalsukan sesuai dengan aslinya dan kertas dokumennya asli tetapi tanda tangannya dipalsukan sehingga petugas Samsat menelitinya harus benar – benar mencocokkan dengan speciment tanda tangan pejabat berwenang. Contoh sebuah dokumen dari kedutaan yang dipalsukan untuk melengkapi identitas kendaraan bermotor jenis mewah.

DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Up. Direktur Teknis Kepabeanan
di-
Jakarta

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS
BARANG PERWAKILAN ASING DAN PEJABATNYA

SURAT PERMOHONAN **Nº 001567**

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Perwakilan Diplomatik/Konsuler/Lembaga Internasional
(nama negara/lembaga) menerangkan bahwa barang-barang tersebut dibawah ini yang
sudah/di datang/dikeluarkan di/dari *) pelabuhan ..Tg...Prick..Jakarta dengan
kapal ..Mahli RHM... yang tiba/berangkat pada tanggal adalah milik :

1. Perwakilan Diplomatik/Konsuler Lembaga Internasional
untuk keperluan kantor/ruang/pembangunan atau perbaikan gedung.
2. Tuan ..KNO SANGDAYANG..... Jabatan ..Second Secretary.....
pada perwakilan tersebut di ..Jakarta..... guna pemakaian sendiri. Barang-barang
tersebut tidak akan diperdagangkan.

No. Urut	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga Barang
1	Mercedes Benz SL 500 Chassis No. WDB230475 2F 036117 Engine No. 113963 30 450957 Colour Brilliant silver Year 2001 B/L No. SINCB3330005	1 (one) unit	\$\$. 60,000.-

Kami mohon pemasaan/pengeluaran *) barang-barang tersebut di atas diberikan pembebasan bea masuk berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan No. 90/KMK.04/2002 tanggal 12 Maret 2002.
Selanjutnya kami menerangkan bahwa barang-barang yang dimasukkan/dikeluarkan *) sebagaimana diuraikan diatas adalah
untuk pemakaian selama ..Perugas.....
Bersama ini kami terangkan bahwa terhadap Perwakilan Republik Indonesia di negara pemohon berlaku pula perlakuan
timbal balik bagi pemasaan barang-barang seperti tersebut diatas.

*) Coret yang tidak perlu.

Jakarta, ..16.06.2003.....
Kepala Perwakilan Diplomatik/Konsuler
Lembaga Internasional
.....SOMBOKHIAN.....

Perutusan Departemen Luar Negeri.
Nomor :
Tanggal :

Setelah diteliti, permohonan di atas dinyatakan disetujui atau tidak disetujui *) untuk diberikan pembebasan bea
masuk sesuai ketentuan yang berlaku.
A.n. Menteri Luar Negeri
Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler
u.h.
Direktur Fasilitas Diplomatik

*) Coret yang tidak perlu.
serta alasan apabila tidak dapat

KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

4) Kendaraan bermotor hasil lelang negara (Kendaraan bermotor - Kendaraan bermotor yang masuk ke pabean Indonesia tidak di lengkapi Dokumen yang syah).

a) Persyaratan .

- (1) Risalah lelang dari kantor lelang negara (Photo Copy yang di legalisir).
- (2) Keputusan kepala kantor pelayanan dari Dit Jen Bea Cukai, yang melakukan penahanan barang-barang import yang tidak di lengkapi dengan Dokumen yang syah (photo copy yang di legalisir).
- (3) Tentang persyaratan barang-barang yang menjadi milik negara yang telah di setuju untuk di lelang oleh Menteri Keuangan.
- (4) Keputusan kantor wilayah Bea Cukai tentang pembentukan panitia lelang Tim terpadu (Photo Copy yang di legalisir).
- (5) Kwitansi penyetoran uang (Photo Copy yang di legalisir).
- (6) Rekomendasi dari Dir Lantas Babinkam Polri.
- (7) Cek Fisik.
- (8) Identitas pemilik.

b) Mekanisme.

- (1) Petugas Polri menerima berkas dan kelengkapan dari pemohon untuk di lakukan penelitian.
- (2) Petugas Polri meneliti kelengkapan dan kemudian membukukan / Registrasi pada buku induk.
- (3) Petugas Polri memasukan data Kendaraan bermotor sesuai Dokumen yang ada pada database dan kemudian menerbitkan Notice / Resi. Kemudian di lakukan penelitian dan apabila sesuai dan di serahkan kepada pemohon guna di lakukan pembayaran, yang kemudian petugas Kasir ke bagian validasi dan kemudian diterbitkan STNK.

c) Kelemahannya.

Polri tidak mengetahui data awal dan Kendaraan bermotor - Kendaraan bermotor yang di tahan oleh Bea Cukai dan Polri tidak mengetahui data kendaraan bermotor yang di masukan ke menteri keuangan untuk di lelang dan hal seperti ini bisa terjadi perubahan data dari kantor - kantor yang telah di setujui, untuk melakukan lelang.

- 5) Kendaraan bermotor hasil lelang kejaksaan (kendaraan bermotor hasil sitaan dari kasus tindak pidana yang sudah tidak lagi ditemukan pemiliknya yang syah).

a) Persyaratan.

- (1) Risalah lelang dari kejaksaan .
- (2) Penyerahan barang bukti dari kejaksaan ke Polri.
- (3) Usulan dari kejaksaan ke badan lelang Negara.
- (4) Penyetoran ke badan lelang.
- (5) Rekomendasi kejaksaan kepada Dir Lantas Polda Metro Jaya untuk penerbitan STNK / BPKB.

b) Mekanisme.

- (1) Petugas Polri menerima berkas dan kelengkapan dari pemohon untuk di lakukan penelitian.
- (2) Petugas Polri meneliti kelengkapan dan kemudian membukukan / Registrasi pada buku induk.
- (3) Petugas Polri memasukkan data Kendaraan bermotor sesuai Dokumen yang ada pada database dan kemudian menerbitkan Notice / Resi.
- (4) Penelitian dokumen tentang keabsyahan dokumen dan kesesuaian terhadap kendaraan bermotor tersebut , kemudian di serahkan kepada pemohon guna di lakukan pembayaran, Kemudian petugas Kasir ke bagian validasi selanjutnya diterbitkan STNK.

c) Kelemahannya.

Kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang di lakukan pelelangan tidak di lakukan penelitian keabsahan / keaslian no rangka dan no. mesin dari Puslabfor Polri, dan tidak ada surat keterangan dari ATPM tentang penerbitan faktur yang di buku melalui no. rangka dan no mesin sesuai merk kendaraan.

6) Kendaraan bermotor mutasi dan luar daerah.

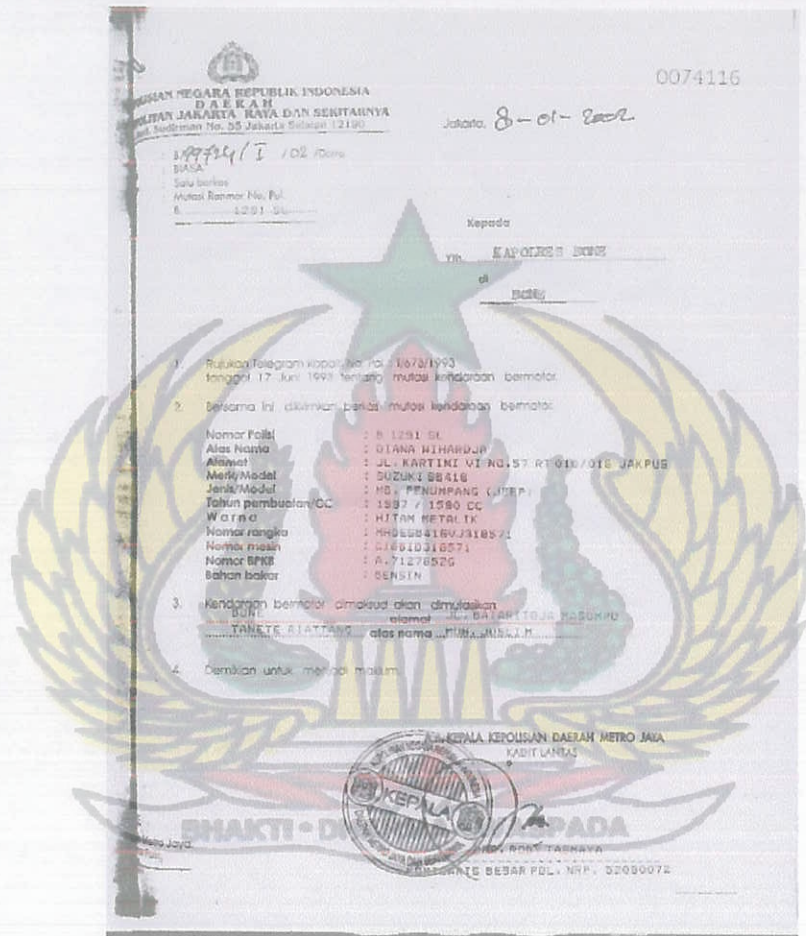
a) Persyaratan.

- (1) Syarat pengantar dari Kasatker daerah asal.
- (2) CQ Dir Lantas , KaPolres.
- (3) Fiskal antar Daerah.
- (4) Cek Fisik, BPKB , Arsip.
- (5) Daftar kelengkapan surat-surat.

b) Mekanisme.

- (1) Petugas Polri menerima berkas dan kelengkapan dari pemohon untuk di lakukan penelitian.
- (2) Petugas Polri meneliti kelengkapan dan kemudian membukukan / Registrasi pada buku induk.
- (3) Petugas Polri memasukan data Kendaraan bermotor sesuai Dokumen yang ada pada database dan kemudian menerbitkan

Notice / Resi. Kemudian di lakukan penelitian dan apabila sesuai dan di serahkan kepada pemohon guna di lakukan pembayaran, yang kemudian petugas Kasir ke bagian validasi kemudian diterbitkan STNK. Contoh dokumen mutasi yang dipalsukan.



c) Kelemahannya.

- (1) Daerah tujuan hanya melakukan proses berdasarkan berkas yang ada dapat di mungkinkan terjadinya Kasus-kasus tindak pidana Kendaraan bermotor.

- (2) Kendaraan bermotor hasil kejahatan di mutasikan ke luar Polda, dengan memalsukan surat pengantar , fiskal ,dll.
- (3) Penyerahan STNK, peneng dan plat di loket pengeluaran, (peneng yang seharusnya terpasang diplat nomor, mulai bulan Januari 2003 dihapuskan. Tentunya hal ini akan menyulitkan peng-identifikasian kendaraan bagi anggota yang bertugas di lapangan).
- (4) Hingga saat ini, penelitian dokumen kendaraan bermotor oleh petugas Samsat dilakukan secara manual, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya celah bagi para pelaku tindak pidana untuk memalsukan dokumen kendaraan bermotor (Faktur, Form "A", Form "C" dan lelang) yang dapat didaftarkan untuk mendapatkan atau diterbitkan dokumen / STNK yang asli.
- (5) Masih banyak pemalsuan pada dokumen-dokumen kendaraan bermotor dan pada tanda-tangan pejabat Polri yang berwenang untuk menandatangani surat pengantar mutasi kendaraan bermotor yang diproses mutasi ke luar daerah, dikarenakan masih lemahnya sistem keamanan pada masing-masing Samsat diseluruh Indonesia dikarenakan belum onlinenya sistem komputer dengan seluruh Samsat di Indonesia, sehingga memudahkan oknum untuk melakukan pemalsuan

dokumen kendaraan bermotor maupun tanda-tangan pejabat yang berwenang.

- (6) Masih sulitnya untuk melacak/menelusuri alamat yang dituju maupun tanggal pengeluaran kendaraan bermotor yang telah dimutasikan dikarenakan KTP yang dipalsukan.

7) Proses Pemblokiran / Cabut Blokir Kendaraan bermotor.

a) Persyaratannya.

- (1) Masyarakat membawa surat permohonan pemblokiran/cabut blokir dari penyidik.
- (2) Membawa STNK dan BPKB asli serta hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- (3) Penelitian persyaratan oleh petugas blokir.
- (4) Rekomendasi dari Kasi STNK.
- (5) Registrasi pada buku induk dan dilakukan pemblokiran/cabut blokir pada buku registrasi serta dilakukan pemblokiran/cabut blokir pada komputerisasi.

b) Kelemahannya.

- (1) Masih banyaknya keluhan dari masyarakat bahwa untuk proses pemblokiran/cabut blokir kendaraan bermotor masih memakan waktu lama. Hal itu memungkinkan adanya kendaraan yang belum diblokir namun sudah diproses ganti identitas atau dimutasikan ke luar daerah.

- (2) Belum lagi dengan banyaknya kendaraan yang hilang dimana walaupun telah dilaporkan ke kantor polisi (penyidik) tetapi tidak diblokir pada Sie STNK karena ketidaktahuan masyarakat dalam prosedur pemblokiran/cabut blokir kendaraan bermotor yang antara lain disebabkan karena belum adanya jaringan on-line antar Polsek dan Samsat.
- (3) Dari data blokir pencurian kendaraan bermotor yang dihimpun oleh Biro Operasi Polda Metro Jaya dalam 6 tahun terakhir ada sekitar 40.000 kendaraan bermotor yang hilang tetapi data blokir kendaraan bermotor di Samsat Polda Metro Jaya ada sekitar 9.172 pada 3 tahun terakhir yang sudah diblokir pada database Dispenda Pemda DKI Jaya , fenomena ini menunjukkan adanya kurang siapnya Polri didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

e. Data Pengeluaran Faktur dari ATPM.

Tidak adanya data yang akurat dari dealer , Importir Umum tentang penerbitan faktur yang sering dipalsukan oleh sindikat penyelundup mobil ,pemalsu dokumen menyebabkan kesulitan di dalam penelitian terhadap dokumen tersebut , juga ditemukan Importir Umum yang sudah tutup atau dealernya tidak berkerja lagi tetapi masih mengeluarkan faktur dengan menggunakan nama PT. / perusahaan yang sudah tutup.

f. Data KTP dengan kode lokasi (menghindari KTP palsu).

Data KTP sangat penting di dalam pengidentifikasian pemilik kendaraan bermotor, seringnya data KTP tersebut dipalsukan untuk mengatasnamakan kendaraan bermotornya , hal ini terlihat baik pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari 2 kendaraan bermotor maupun identitasnya yang dipergunakan untuk memalsukan dokumen administrasi kendaraan bermotor, sehingga pengesahan / perpanjangan STNK yang tidak sesuai dengan identitas pemilik menggunakan cara dengan melalui "Calo"/tembak KTP.

g. Ganti Warna / No. Pol.

Warna / No. Pol kendaraan bermotor sangat berperan didalam pengungkapan suatu tindak pidana , tidak adanya file /riwayat pergantian secara komputerisasi di database yang dapat menyimpan bahwa kendaraan bermotor tersebut telah beberapa kali ganti warna dan ganti No. Pol. Sehingga menyulitkan penyidikan dan penyelidikan , memerlukan waktu secara manual untuk mencari identitas kendaraan bermotor melalui arsip yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

h. STNK Rahasia dan STNK khusus.

Penerbitan STNK rahasia dan STNK khusus selama ini dengan menggunakan manual, pada kurun waktu 6 tahun kendaraan yang menggunakan STNK dan Plat nomor rahasia/khusus sekitar 11.000 kendaraan bermotor baik dari Sipil maupun Militer / Polri, kendaraan

bermotor yang menggunakan STNK rahasia / khusus ada kendaraan yang benar – benar mempunyai dokumen resmi , kendaraan bermotor dari daerah bounded area (Sabang, Kalbar, Papua, Batam) yang dimiliki oleh pejabat Militer dan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh anggota Polri yang berasal dari kendaraan bermotor barang – bukti , hal ini apabila tidak terdatakan secara komputerisasi akan menjadi kendala bagi institusi Polri untuk dapatnya dipertanggung jawabkan secara ketentuan yang berlaku, pendataan secara manual oleh anggota Samsat dapat disalahgunakan apabila tidak diberikan pengawasan yang ketat.

i. BPKB / STNK asli dan duplikat.

Pemalsuan dokumen meliputi BPKB dan STNK yang sering terjadi untuk meng-cover kendaraan bermotor hasil tindak pidana kepada masyarakat awam yang tidak mengetahui bahwa dokumen palsu hanya melihat murahnya kendaraan bermotor tersebut , sedang dokumen duplikat yang sering terjadi dipergunakan untuk menggandakan identitas kendaraan bermotor baik yang sudah mati pajaknya beberapa tahun dan kendaraan sita jaminan dari kejaksaan atau pengadilan atau sita negara khususnya kasus BLBI atau bank yang sudah merger dan pemilik tidak dapat melanjutkan kreditnya. Contoh STNK / BPKB yang dipalsukan untuk kendaraan jenis Kijang hasil pencurian yang didapatkan pada waktu akan di perpanjang.

I. IDENTITAS KENDARAAN		II. IDENTITAS PEMILIK A No 6510536	
1. Nomor Polisi	B 8949 JS	Model	BEVO
2. Merk	TOYOTA	Nama Pemilik	RUSDIANTO
3. Tipe	KIJANG LFB2R	Alamat	JL. TEBET UTARA VI/71
4. Jenis	MPV/ MINIBUS		JAKARTA SELATAN
5. Model	MPV/ MINIBUS	Pekerjaan	WIRASWASTA
6. Tahun Pembuatan	2001		
7. Tahun Perawatan	2001		
8. Isi Silinder	2.446 CC		
9. Warna	SILVER MET.		
		10. No. Rangka	MHF11LF8210032168
		11. Nomor Mesin	2L-96966
		12. Jumlah Sumbu	2 (PUA)
		13. Jumlah Roda	4 (EMPAT)
		14. Bahan Bakar	SOLAR
		15. No. Serah-tahap Uji Tipe	
		16. No. Uji Berkala	

Tanda Tangan Peraltah Pertama	Dibersihkan di Pada Tanggal	Model Pemumpang	Model Bus	Model Sedan	Sepeda Motor	Perawatan Khusus
	JAKARTA 28.1.2001	1. Sedan	1. Bus	1. Pick Up	1. Sep. Motor Sola	1. Mobil Pemangan Kabin/kabin
		2. Sc. Wagon	2. Motor Bus	2. Sep. Motor dan	2. Sep. Motor dan	2. Mobil Pemangan
		3. Min. Bus	3. Bus Berkala	3. Trak	3. Trak	3. Trak
		4. Jeep	4. Trak	4. Trak	4. Trak	4. Trak
		5. Lain-lain	5. Lain-lain	5. Lain-lain	5. Lain-lain	5. Lain-lain

SAMSAT DKI REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KOTA JAKARTA
 DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 No.: 1078707 M/2001
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
 NO. POLISI : B 8949 JS
 NAMA JENNIK : RUSDIANTO
 ALAMAT : JL. TEBET UTARA VI/71 JAKSEL X41
 JENIS/MODEL : KIJANG LFB2R IDENT : 3C960129U118
 TAHUN PEMBUATAN : 2001 WAMA TYP : HITAM
 WAMA BAKAR : SOLAR WAMA BAKAR : SOLAR
 WAMA LOKAS : 12550
 WAMA W-4 :
 W A R N A : SILVER METALIK NO. LINTAS/PERALTAH : 66
 NO. RANGKAIK : MHF11LF8210032168 NO. LINTAS/PERALTAH : 66
 NO. MESIN : 2L-9696615
 ISLAMI 4/D : 29-12-2006

SURAT KELOMPOK DAERAH DAERAH KOTA DAN SWDKLL
 NO. S 0823755
 SAMSAT PROGRES DKI JAKARTA

NO. POLISI	NO. RANGKAIK	NO. MESIN	NO. BPKB
B 8949 JS	MHF11LF8210032168	2L-9696615	014370 B35 8112 200 000 8949JS
RUSDIANTO			29-DES-2006
JL. TEBET UTARA VI/71 JAKSEL			

4. Sumber Daya Manusia (personel).

Lemahnya kemampuan personel Samsat merupakan salah satu penyebab kurang berjalannya fungsi registrasi dan identifikasi secara profesional , dengan jumlah personel Samsat yang melebihi DSPP , hal ini akan menambah kesulitan dalam mekanisme penerbitan "STNK" , fenomena ini masih tetap berkembang bahwa yang menjadi personel Samsat bukan orang yang mempunyai kemampuan / keahlian di bidang registrasi identifikasi baik mengetahui bentuk format dokumen (form "A" ,"B" dan "C " , faktur)

mengidentifikasi NIK/VIN , dokumen lelang , dump ABRI / Polri ,dokumen mutasi kendaraan bermotor maupun komputerisasi database kendaraan bermotor tetapi personel yang berasal dari mantan sopir , ajudan , spri dan titipan belum mempunyai kemampuan tekhnis registrasi identifikasi sehingga masih banyak ditemukan personel Samsat yang tidak mempunyai kejuruan tentang teknis registrasi identifikasi.

Keberadaan karban / karyawan bantuan ikut mewarnai "kesemrawutan" mekanisme administrasi di Samsat sehingga karban menjadi salah satu kaki tangan personel Samsat untuk mencari tambahan, dampaknya mempengaruhi mekanisme ban berjalan / *First in First Out* tidak berjalan dengan baik.

5. Materil / Fasjas.

Pendistribusian materil yang merupakan dokumen di dalam administrasi Samsat sangat rawan pada proses penerbitan STNK , banyak kelemahan yang dapat diinventarisir mulai dari penyimpanan maupun pendistribusian dokumen administrasi Samsat , misalnya blangko cek fisik , blangko permohonan penerbitan STNK banyak dipalsukan , juga arsip dokumen blangko STNK yang habis masa berlakunya 5 tahun dapat dimanfaatkan untuk identitas kendaraan bermotor lain dengan menghapus tulisan / huruf dengan zat kimia.

Fasilitas pada kantor Samsat terdiri dari 2 bagian loket pelayanan yaitu loket pendaftaran dan penetapan , loket pembayaran dan penyerahan. Komputerisasi yang dipergunakan adalah database milik dari Dispenda yang telah diprogram sesuai dengan aspek *prosperity* (ekonomis) dalam perolehan pajak, misalnya :

program pajak progresif yang pernah dilakukan kepada pemilik kendaraan bermotor lebih dari 2 unit sampai sekarang tidak pernah dirubah atau disesuaikan dengan kebutuhan walaupun pajak progresif tersebut sudah dihapus . Contoh pemberlakuan pajak progresif milik pejabat yang sulit diidentifikasi dikarenakan antara nama masing – masing identitas kendaraan bermotor tidak sama sehingga ada yang menggunakan titik dan beda huruf serta menggunakan nama keluarga (istri) ataupun keluarga yang lain .

Pada database kendaraan bermotor Samsat yang dilakukan telah dilakukan pembenahan dapat diperoleh dengan cepat untuk pencarian identitas tersebut. Ada pada di lampiran .

6. Sistem dan Metoda.

Database kendaraan bermotor Samsat terpusat pada Sistem terminal komputer on line dengan Jaringan *Leased Line* yang selama ini dikelola oleh KPTI Dispenda DKI Jakarta sangat terbatas waktu operasionalnya, yaitu mulai jam 09.00 Wib s.d. 15.00 Wib, banyaknya wajib pajak yang dilayani dengan 2 bagian loket , loket khusus / orang cacat yang disiapkan , hal ini msh banyak kelemahan di dalam pelaksanaannya antara lain : mekanisme permohonan / pendaftaran dibawa oleh para calo / biro jasa yang pada akhirnya mengabaikan / merusak mekanisme yang ada *first in first out*

(FIFO) sehingga antrian wajib pajak sampai menunggu lama dikarenakan masih manual di dalam pengecekannya dan baru entry data jadi secara komputerisasi mulai dari cek fisik kendaraan bermotor seharusnya sudah di entry data dan sampai pada loket penerbitan STNK langsung diproses diterbitkan STNK , bukan secara manual lagi di entry data sehingga membutuhkan waktu yang lama , hal ini akan menambah beban penyelesaian penerbitan STNK dengan kapasitas jumlah wajib pajak yang bertambah banyak.

7. Aspek Hukum.

Di dalam Undang – undang No.2 tahun 2002 ttg kepolisian negara pada pasal 15 butir(1)j berisi berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional dan pasal 15 butir(2)b berisi berwenang menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan di dalam Kep Men PAN No : 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang standar mutu pelayanan publik , demikian juga di dalam INBERS /03/M/X/1999 nomor 29 tahun 1999 , peran Polri di dalam melaksanakan fungsi registrasi dan identifikasi sudah jelas diatur di dalam undang – undang , hal ini seharusnya dijabarkan secara teknis di dalam Inbers yang merupakan keputusan bersama dimana Polri sebagai koordinator Samsat , tetapi pada kenyataannya Polri masih tergantung kepada Dispenda , dan kelemahan – kelemahan yang terjadi tidak pernah di perbaiki dan diupayakan untuk dimasukkan kedalam revisi Inbers tersebut .

Walaupun rakor dirlantas dilaksanakan tiap tahun , contoh : belum ada pembahasan tentang restitusi pajak, denda pajak yang masih belum dapat dipertanggungjawabkan oleh Dispenda, banyak penyimpangan yang dilakukan oleh staf Dispenda (pada loket khusus dimana perubahan type, cc, silinder dan tahun pembuatan untuk mengurangi pajak kendaraan bermotor yang tidak dapat diawasi oleh personel Samsat dikarenakan komputer dan programnya hanya staf Dispenda yang mengetahuinya).

8. Akuntabilitas.

Di dalam INPRES RI No : INS/07/VI/1999 tgl 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah, harus diwujudkan oleh Polri di dalam melaksanakan fungsi registrasi dan identifikasi untuk melayani masyarakat yang membutuhkan informasi tentang kendaraan bermotor dan pengungkapan tindak pidana kejahatan kendaraan bermotor sehingga masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum dari informasi tersebut. Hal ini wujud pelayanan Polri kepada masyarakat yang telah membayar pajak tiap tahun. Wajib pajak suatu waktu akan menuntut kepada Polri dimana masyarakat sudah tepat waktu membayar pajak kendaraan bermotor , apabila kelemahan yang ada pada Polri tidak segera diperbaiki dengan mewujudkan database kendaraan bermotor maka kesan masyarakat akan menganggap Polri belum profesional .Hal ini peluang bagi instansi lain untuk mengambil alih kewenangan registrasi dan identifikasi yang ada pada Polri,

contohnya dengan keluarnya Instruksi Menhub tentang SPAU (Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum) yang harus dilengkapi bagi pemohon SIM Umum .

9. Peranan Registrasi dan Identifikasi didalam mendukung Pengungkapan Tindak Pidana kendaraan bermotor.

a. Direktorat lalu lintas.

Banyaknya kasus tabrak lari yang belum terungkap dikarenakan tidak adanya sarana / alat dalam pengungkapannya , di dalam kasus tabrak lari masyarakat sering dijadikan saksi di dalam penyidikan Polri tetapi hasilnya tidak maksimal dikarenakan masyarakat sebagai saksi mengetahui kendaraan bermotor yang melarikan diri setelah menabrak pemakai jalan , masyarakat biasanya hanya mengetahui warna, jenis kendaraan , merk atau hanya mengidentifikasi No. Pol 2 digit atau seri huruf dibelakangnya (tidak lengkap), hal ini yang menjadi kendala bagi petugas Kepolisian (direktorat lalu lintas) untuk pengungkapannya , sehingga akan berdampak kepada pengurusan asuransi jiwa jasa raharja apabila korban meninggal dunia / luka berat , tidak ada yang membantu pembiayaan pengobatan.

Database kendaraan bermotor seharusnya dapat membantu untuk pengungkapan kasus tabrak lari , kesulitan yang dihadapi di dalam pengungkapan kasus tabrak lari tersebut , database Dispenda tidak dapat memenuhi registrasi identifikasi , program yang dibuat bukan untuk registrasi

identifikasi tetapi untuk mendatakan perolehan pajak , dari aspek *prosperity* (ekonomis) memenuhi , tetapi dari aspek *security* (keamanan) tidak dapat dipergunakan sebagai Informasi kendaraan bermotor bagi Polri.

Pada aspek yang lain ada bagian kegiatan Dispenda yang tidak dapat diketahui oleh Polri yaitu biaya restitusi pajak (sisa pajak) dari wajib pajak dan denda pajak yang tidak secara transparan pertanggung jawabannya oleh Dispenda di sosialisasikan kepada masyarakat contoh: Saya akan memutasikan kendaraan bermotor saya pada bulan september padahal jatuh tempo pada bulan desember jadi ada " sisa pajak " yang tidak dikembalikan oleh Dispenda kepada masyarakat,sisa pajak tersebut sampai sekarang belum ada pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam pengungkapan tindak pidana, pemblokiran kendaraan sangat membantu masyarakat dalam mengantisipasi lolosnya perpanjangan STNK yang didapatkan dari kendaraan hasil curian dengan alasan STNK hilang atau melakukan kolusi dengan petugas. Selama ini terbukti bahwa kelemahan dalam aspek keamanan pada pendataan secara manual dan proses yang lama sangat mempengaruhi proses pemblokiran tersebut .

Data kendaraan tersebut tidak semuanya ada dalam sistem komputerisasi secara on-line , melainkan masih secara manual sehingga apabila tidak ditemukan dalam komputer, memerlukan waktu untuk pencarian dengan cara manual.

b. Direktorat Reserse kriminal.

Banyaknya kasus-kasus pencurian yang belum terungkap akan menjadikan tunggakan dalam pengungkapan kasus bagi Polri. Tunggakan ini tentunya akan berimplikasi kepada peningkatan pelayanan dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana. Disamping itu masih banyak laporan pencurian kendaraan bermotor yang belum melakukan permohonan pemblokiran sehingga direktorat lalu-lintas sendiri merasa kesulitan untuk mengidentifikasi kendaraan yang sudah hilang karena tidak ada permohonan blokir .Berdasarkan data blokir pencurian kendaraan bermotor sekitar 7.192 yang melakukan blokir pada kurun waktu 3 tahun terakhir, sedangkan data yang dihimpun oleh Biro Operasi Polda Metro Jaya pada 6 tahun terakhir hanya sekitar 40.000 pencurian kendaraan bermotor yang terjadi, terdapat perbedaan data yang cukup signifikan.

Tentunya hal ini menunjukkan kelemahan sistem pada institusi Polri dimana tidak adanya on-line sistem antaraPolsek dan Polres dengan direktorat lalu-lintas khususnya Samsat.

Dengan perbaikan sistem pada database kendaraan bermotor maka dapat teridentifikasi dengan baik , apakah kendaraan tersebut sudah diblokir karena pencurian atau sudah dimutasi, bahkan akan terdata pula, apakah pernah melanggar, mengalami kecelakaan dan sebagainya, sehingga petugas Samsat tidak kesulitan dalam memberikan informasi kepada direktorat atau fungsi terkait lainnya.

Peningkatan pelayanan ini akan sangat dirasakan pula oleh masyarakat, karena pada proses blokir, misalnya ketika masyarakat melapor, maka data kendaraan tersebut langsung terblokir seketika itu juga, pada saat si-pelapor membuat laporan kehilangan. Kasus – kasus lain adalah kasus perdata yang sering mengajukan komplain dengan diblokirnya kendaraannya oleh salah satu keluarga tanpa ijin pemilik.

Ini seringkali terjadi dan menjadi salah satu contoh yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Adakalanya permohonan untuk memblokir atau membuka blokir diajukan melalui Dispenda. Padahal hal itu bukan merupakan kewenangannya. Dengan demikian maka aspek keamanannya tidak dapat dipertanggung jawabkan .

Kasus – kasus Tindak Pidana Penggelapan / Penipuan yang sering terjadi misalnya : Tindak pidana yang dilakukan oleh manajemen PT. Qsar ,dimana banyak aset dari PT. Qsar yaitu kendaraan bermotor yang bukan nama dari PT. Qsar tersebut melainkan nama pemiliknya perorangan sehingga dalam pemblokiran untuk mengamankan aset – aset tersebut harus dilakukan pelacakan terlebih dahulu, hal ini memerlukan waktu yang lama .

Misalnya data kendaraan kasus PT. Qsar yang bergerak dalam MLM dan melakukan penipuan kepada masyarakat ada sekitar 200 kendaraan bermotor

Contoh : data kendaraan yang merupakan aset PT. Qsar sulit untuk diidentifikasi.

No.	JEMIS KENDARAAN	No. POLISI	KETERANGAN
45.	ISUZU PANTER MERAH	B 9346 ZP	RANLAN BASKARA
46.	OPEL BLAZER	B 8054 RY	_____
47.	SUZUKI ESCUDO	F 1083 UD	_____
48.	TOYOTA KIJANG ABU-ABU M	B 2072 AL	H. AMIR
49.	ISUZU PANTER HIJAU	B 8091 TO	RANLAN BASKARA
50.	TAFT RANGER ABU-ABU M	B 1457 MZ	HUDAYAT
51.	ISUZU PANTER HIJAU	B 8998 PB	H. ZAENAL
52.	TOYOTA KIJANG ABU-ABU	B 7373 TH	HABIB
53.	TAFT FICK UP BIRU	B 9729 RU	CIKAWUNG
54.	TAFT FICK UP PUTIH	B 9472 ZO	_____
55.	TAFT FICK UP BIRU	B 8945 RO	_____
56.	TAFT RANGER BIRU	B 2586 NB	_____
57.	TAFT RANGER PUTIH	B _____	_____
58.	SUZUKI CARRY FICK UP	F 6326 UP	_____
59.	SUZUKI CARRY FICK UP	B 9103 OT	_____
60.	TAFT BRAVO HIJAU	B 2614 OF	_____
61.	HYUNDAI BOX DOUBLE	B 9751 HH	_____
62.	HYUNDAI BOX DOUBLE	B 9752 HH	_____
63.	ISUZU BOX ENCKLE	B 2607 CI	_____
64.	MITSUBISHI CANTER BAK	B 9988 AR	_____
65.	MITSUBISHI COLT DIESEL BAK	BM 8796 AK	_____
66.	ISUZU BOX KACA C.S. E	B 9474 RY	_____
67.	ISUZU BOX KACA C.S. E	B 9675 XV	_____
68.	TOYOTA RINO BAK DOUBLE	B 8407 UG	_____
69.	TOYOTA RINO BAK DOUBLE	F 8430 UC	_____
70.	NISAN TRUCK BAK ENCKLE	B 9801 PA	_____

Dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor, misalnya Pencurian Kendaraan bermotor, penyelundupan kendaraan bermotor, pemalsuan surat-surat atau dokumen, money laundering, penggelapan pajak, pengungkapan jaringan

teroris, *White collar crime* dan sebagainya, dapat didukung melalui keterpaduan database kendaraan bermotor dalam bentuk on-line sistem.

Beberapa contoh kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yang juga merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah penyelundupan kendaraan built up yang terjadi beberapa waktu lalu tanpa membayar bea masuk kepada negara dengan menyalah-gunakan fasilitas kedutaan atau badan internasional (PP 8 th 1955 dan PP 19 th 1957) dengan menggunakan proyek fiktif.

Walaupun kendaraan bermotor tersebut menunda pembayaran bea masuknya, namun tetap dapat diberikan surat dokumen yang sah. Kasus yang lain yang merupakan kejahatan kendaraan bermotor yang sering terjadi adalah yang terkait dengan proses lelang, hibah atau dump, dimana dapat terjadi bahwa kendaraan yang diselundupkan dikatakan sebagai barang temuan tanpa adanya tersangka atau pemilik kendaraan tersebut. Namun setelah dilakukan lelang, kemungkinan pemenang lelang justru merupakan pemilik kendaraan atau pelaku yang menyelundupkan kendaraan tersebut.

c. Direktorat Intelkam.

Peranan intelijen di dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang penyelidikan terhadap permasalahan yang berdampak kepada stabilitas keamanan di wilayah Polda Metro Jaya , di dalam penyelidikan tidak menutup kemungkinan memerlukan keterlibatan dari direktorat lainnya atau

fungsi yang lain , situasi kamtibmas dipengaruhi salah satunya dengan adanya kebijakan dari pada pemerintah ada kelompok – kelompok yang pro dan kontra , hal ini berimplikasi dengan munculnya LSM , Ormas dan Parpol yang melakukan pelanggaran maupun menjurus ke arah tindak pidana sehingga perlu bahan keterangan yang lengkap misalnya identitas kendaraan bermotor yang dimiliki oleh kelompok LSM , Ormas dan Parpol dimungkinkan ada berkaitan dengan elit politik atau kelompok – kelompok lainnya, sinergisasi antardirektorat seperti hal ini tidak terwujud dalam melaksanakan tugas – tugas kepolisian.

d. Direktorat Obyek Vital.

Pengamanan dan Pengawasan terhadap Orang asing serta obyek – obyek vital yang ada di wilayah Polda Metro Jaya berpengaruh terhadap pelayanan keamanan kepada negara – negara yang mempunyai hubungan bilateral , situasi keamanan di dalam negeri dipengaruhi situasi politik luar dan dalam negeri , banyaknya kantor – kantor perwakilan dari negara asing , demikian juga fasilitas yang diberikan kedutaan – kedutaan negara asing kepada konsulat , diplomat , staf kedutaan negara asing berupa sarana kendaraan bermotor baik yang menggunakan No. Pol kedutaan maupun No.Pol sipil , untuk memberikan pengamanan dan pengawasan yang selama ini bentuk pelayanannya hanya berupa patroli di lingkungan mereka bekerja dan

pemukiman orang asing , hal ini masih dirasakan sangat kurang pelayanan keamanan tersebut.

Data kendaraan bermotor milik kedutaan , kantor – kantor perwakilan negara asing , konsulat dan diplomat , saat ini hanya didatakan secara manual pada direktorat lalu lintas sehingga pendataan tersebut tidak terfilekan dengan baik dan untuk pencarian arsip maupun file tersebut memerlukan waktu yang lama tidak dalam waktu singkat data kendaraan bermotor tersebut diperlukan.

9. Polres / Polsek.

Keberadaan Polres dan Polsek didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa menerima laporan kejadian pencurian kendaraan bermotor perlu ditingkatkan kualitasnya , lambannya proses laporan dan permohonan blokir masyarakat dikarenakan pencurian kendaraan bermotor akan merugikan masyarakat itu sendiri dan dampaknya kepada Institusi Polri dianggap masih kurang profesional , laporan yang diterima Polres dan Polsek saat ini di kerjakan secara manual sehingga pengiriman laporan ke satuan lebih tinggi menggunakan kurir atau caraka , hal ini dikarenakan belum adanya on line sistem yang mengatur mekanisme laporan tersebut sampai tingkat Polda .

Proses blokir di Polres dan Polsek saat ini memerlukan waktu yang lama sehingga surat permohonan blokir tersebut sampai ke Samsat Polda Metro

Jaya kurang lebih 4 – 5 hari , kerawanan akan muncul apabila tidak dalam waktu singkat di lakukan pemblokiran maka peluang sindikat atau kelompok curanmor akan mudah melakukan balik nama atau merubah identitas kendaraan bermotor tersebut , sehingga masyarakat akan komplain kepada Polri.

10. Dokumentasi kendaraan bermotor kasus peledakan bom di Hotel JW Marriot.

Kasus peledakan bom di Hotel JW. Marriott. Dimana Samsat Polda Metro Jaya mengalami kesulitan dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam pencarian identitas kendaraan tersebut dikarenakan database kendaraan bermotor masih tergantung pada database Dispenda DKI Jaya sehingga harus menghubungi kantor pusat (KPTI) Dispenda untuk mendapatkan identitas dengan memanggil no.pol dan no mesin yang diketahui dan harus mencari file atau arsip di tempat penyimpanan arsip dengan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengetahui identitas pemilik kendaraan bermotor (KTP), kelemahan ini jelas terlihat tidak profesionalnya Polri dalam mendukung tugas – tugas kepolisian atau direktorat lainnya demikian juga akan berdampak pada pengungkapan tindak pidana lainnya dikemudian hari apabila Polri tidak segera menyiapkan database kendaraan bermotor di Samsat Polda Metro Jaya.

GAMBAR 2
Dokumentasi Nomor Mesin Kendaraan Pada Peledakan Bom
JW Marriott

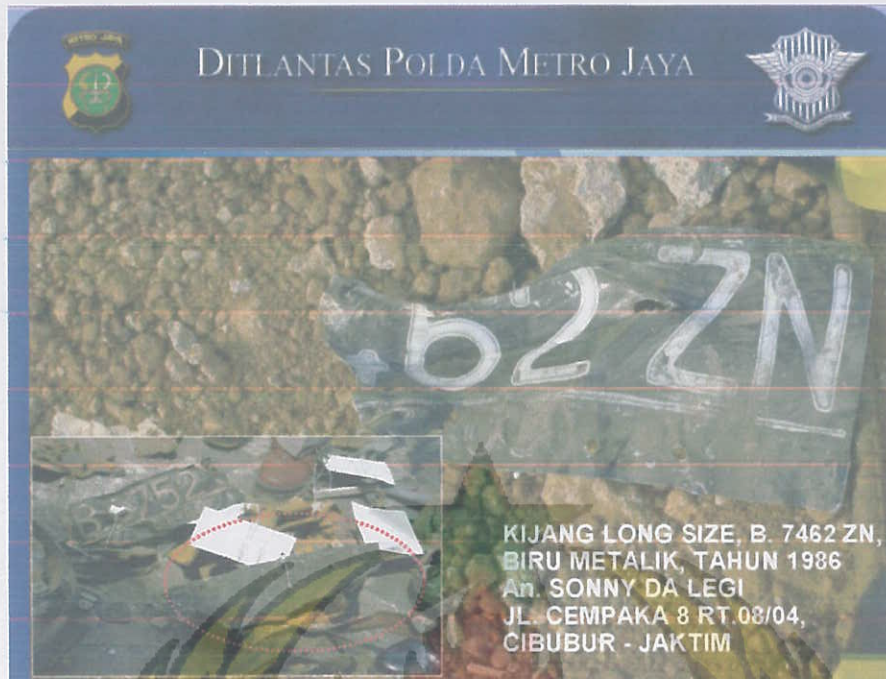


GAMBAR 3
Dokumentasi Nomor Rangka Kendaraan Pada Peledakan Bom
JW. Marriott



GAMBAR 4

Dokumentasi Plat Nomor Polisi Kendaraan Pada Peledakan Bom JW. Marriott

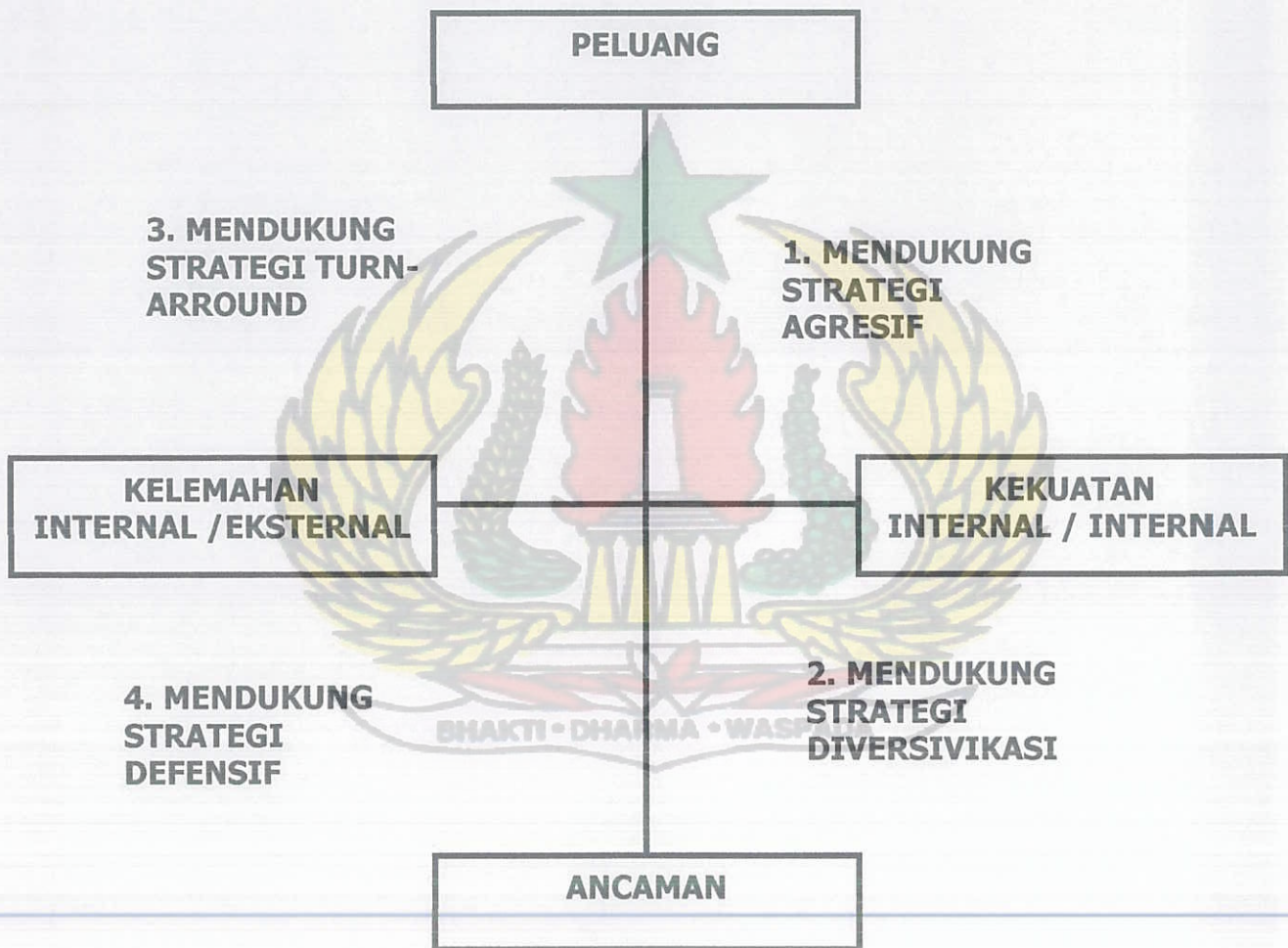




BAB IV

BAB IV
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRATEGI
PEMBENAHAN DATABASE RANMOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK
PIDANA DI POLDA METRO JAYA

1. Bagan analisis SWOT yang dapat dianalisa pada masing – masing Kuadran antara lain :



Kuadran 1 : Direktorat lalu lintas memiliki peluang untuk mewujudkan database kendaraan bermotor sesuai dengan Undang – undang No.2 tahun 2002 pasal 15 (1)j dan (2)b yang berisi tentang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional dan menyelenggarakan Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor serta kebijakan strategi KaPolri sehingga lingkungan eksternal sangat mendukung untuk melakukan kebijakan strategi secara agresif (*growth oriented strategy*).

Kuadran 2 : Ancaman yang dihadapi Direktorat lalu lintas dari kekuatan Internal yaitu besarnya biaya pembenahan database kendaraan bermotor , akan tetapi dapat diatasi dengan cara strategi diversifikasi (*diversification strategy*) yaitu menggolongkan strategi dalam tahapan dengan tetap memperhatikan ancaman dan resiko sekecil mungkin.

Kuadran 3 : Direktorat lalu lintas dalam hal ini bagian Registrasi dan Identifikasi menghadapi peluang yang sangat besar untuk mewujudkan database kendaraan bermotor tersebut akan tetapi juga menghadapi kendala secara internal dan eksternal (finansial dan Dispenda), yang peluangnya sangat mendukung sehingga dapat diatasi dengan pola swadaya / *patnershif* dan koordinatif dengan KPTI Dispenda sebagai *turn arround*.

Kuadran 4 : Ancaman bagi Direktorat lalu lintas yang tidak menguntungkan dari kekuatan internal adalah Polda Metro Jaya , dan kekuatan eksternal yang tidak mendukung , Akan tetapi hal ini dapat diatasi dengan memberikan konsep program database kendaraan bermotor kepada pimpinan dan Direktorat lainnya bahwa database ini sangat bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas Kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dan Informasi kendaraan bermotor sebagai perwujudan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai kekuatan hukum.

2. Untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi pembenahan database maka dianalisa menggunakan SWOT yaitu:

a. Strength (Kekuatan).

- 1) Undang – undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara pada pasal 15 butir (1)j berisi berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional dan pasal 15 butir(2)b berisi berwenang menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- 2) Kep Men PAN No : 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang standar mutu pelayanan publik.peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan wujud pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat .
- 3) Undang – undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan Undang – undang no. 2 tahun 2002 untuk merealisasi Pusat informasi kriminal nasional yang lengkap dan dibenahi serta dibangun secara sistematis.
- 4) Keamanan dan ketertiban serta kelancaran dibidang lalu lintas masih memerlukan upaya penataan yang lebih baik dan lebih modern lagi , guna menjamin ketentraman dan kenyamanan bagi para pengguna jalan . Untuk penataan ini dibutuhkan suatu kerjasama lintas sektoral yang lebih erat dan berkomitmen bersama untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pendapatan.

- 5) Pelayanan administrasi lalu lintas masih memerlukan suatu upaya pembenahan sehingga terwujud suatu sistem pelayanan database kendaraan bermotor yang transparan , modern dan dapat dipertanggungjawabkan .
- 6) Perkembangan teknologi yang ada seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Polri sebagai teknologi informasi kepolisian dan sebagai teknologi untuk menangkal kejahatan (pencurian kendaraan bermotor) dan mewujudkan Polri yang mampu menegakkan supremasi hukum .
- 7) Rakor Dirlantas dengan Dispenda dapat dijadikan suatu pembahasan tentang kelemahan Inbers no. 29/INS/03/M/X/ th 1999 mengenai database Dispenda dan tidak dapat dipergunakan sebagai data pendukung tugas – tugas kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana.
- 8) Tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri di dalam memberikan pelayanan administrasi Samsat tentang informasi kendaraan bermotor yang akurat , cepat dan adanya kepastian hukum menjadikan suatu pertanggung jawaban yang harus segera dipenuhi.
- 9) Banyaknya sumber daya manusia yang dapat disiapkan untuk mengemban fungsi registrasi identifikasi secara profesional dengan pendidikan yang memberikan pengetahuan bidang registrasi identifikasi secara terprogram.

- 10) Adanya kerjasama Polri dengan negara – negara ASEAN dalam AIPO untuk memerangi kejahatan trans nasional , salah satunya berupa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

b. Kelemahan (Weakness).

- 1) Kualitas kemampuan sumber daya manusia Samsat sebagai perwujudan Polri yang profesional masih belum maksimal di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga Polri sebagai pengemban fungsi registrasi dan identifikasi belum terpenuhi.
- 2) Program database yang berada di Samsat masih dikelola oleh Dispenda (KPTI) pemda DKI Jaya dan pemda Banten serta pemda Jabar , Polri masih tergantung pada Dispenda sehingga tidak dapat secara optimal mendukung tugas – tugas fungsi Kepolisian lainnya.
- 3) Belum terwujudnya kepastian hukum kepada masyarakat yang diberikan oleh Polri dalam bidang registrasi identifikasi sehingga Polri harus dapat menjamin perlindungan dan keamanan terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat.
- 4) Kurang adanya pertanggungjawaban / akuntabilitas kepada publik tentang pelaksanaan tugas yang diemban sehubungan dengan masyarakat sebagai wajib pajak dan Polri harus dapat menunjukkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat berupa informasi kendaraan bermotor .

- 5) Dukungan anggaran yang masih terbatas sangat erat kaitannya dengan daya dukung terhadap upaya peningkatan kuantitas dan kualitas personil Samsat Polda Metro Jaya , maupun dukungan anggaran untuk mewujudkan pembangunan database kendaraan bermotor di Samsat.
- 6) Kurangnya pemahaman dari masing – masing direktorat untuk mewujudkan sistem pelaporan dalam bentuk online sistem di Polda Metro jaya untuk mendukung tugas – tugas kepolisian .
- 7) Dengan tidak adanya database kendaraan bermotor akan menyulitkan bagi Polri didalam memberikan bantuan kepada negara ASEAN dimana Polri terikat perjanjian AIPO untuk mengungkap pencurian kendaraan bermotor lintas negara.
- 8) Kurang tersosialisasinya fungsi dan tugas pokok Polri serta perubahan – perubahan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja Polri.
- 9) Lemahnya koordinasi antar instansi terkait (Bea cukai , Deperindak , Kejaksaan , Pengadilan dan sucofindo) dalam mencegah adanya pemalsuan dokumen , penyelundupan , lelang kendaraan dengan menggunakan dokumen palsu.

c. Peluang (Opportunities).

- 1) Tumbuhnya partisipasi masyarakat yang bersifat positif dalam pengawasan konstruktif terhadap kinerja Polri sehingga Polri dapat melakukan perbaikan dan koreksi atas kelemahan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Perwujudan akuntabilitas Polri dalam menjalankan fungsi registrasi dan identifikasi kepada masyarakat .
- 3) Memudahkan adanya akses ke seluruh Samsat di Indonesia dengan online sistem untuk memudahkan koordinasi dan pengecekan terhadap kasus penyelundupan kendaraan bermotor yang menggunakan identitas palsu / dokumen palsu dan mutasi kendaraan bermotor.
- 4) Mencegah adanya manipulasi pajak yang dilakukan oleh Dispenda dengan menutupi restitusi pajak dan denda pajak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 5) Database kendaraan bermotor dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi kendaraan bermotor.
- 6) Mencegah mengurangi angka tindak pidana / kejahatan penipuan / penggelapan terhadap kendaraan bermotor.
- 7) Dapat mengetahui pertambahan jumlah kendaraan secara akurat dan memberikan masukan kepada pimpinan untuk menentukan kebijakan atau menyarankan kepada pemerintah.

- 8) Mempersempit ruang gerak wajib pajak yang memalsukan dokumen kendaraan bermotor .
- 9) Mempermudah akses online sistem antara instansi terkait (Bea cukai , Deperindak , Kejaksaan , Pengadilan untuk berkoordinasi tentang tindak pidana kendaraan bermotor dan dokumen kendaraan bermotor yang diduga palsu.

d. Kendala (Threats).

- 1) Dampak globalisasi dan krisis ekonomi yang belum pulih secara stabil yang menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan , berdampak pada terjadinya pengangguran yang menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat , yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan tingkat kriminalitas .
- 2) Peningkatan modus operandi kejahatan yang bersifat high technology serta berdimensi global dan menembus lintas batas negara, serta adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat sebagai dampak peningkatan status sosial masyarakat memerlukan respon positif terhadap peningkatan mutu dan kinerja Polri.
- 3) Sumber daya manusia yang disiapkan memerlukan waktu untuk mengikuti pendidikan kejuruan dan pelatihan program database kendaraan bermotor yang disesuaikan dengan registrasi identifikasi.

- 4) Dukungan dari pimpinan kurang untuk mewujudkan database kendaraan bermotor sehingga tidak terlaksananya perbaikan / perubahan program pada sistem di Samsat hal ini akan menghambat peningkatan kinerja personel Samsat didalam melaksanakan fungsi registrasi dan identifikasi.
- 5) Instansi terkait juga harus menyiapkan server untuk mengakses database kendaraan bermotor di Samsat sehingga dapat diakses dua arah .
- 6) Entry data yang dilakukan secara bertahap oleh operator memerlukan waktu satu tahun untuk memperbaiki data kendaraan bermotor sehingga dalam satu tahun seluruh data kendaraan bermotor dapat di edit disesuaikan dengan program yang dikehendaki dan dapat memenuhi fungsi registrasi identifikasi.
- 7) Dispenda kurang mendukung dengan adanya perwujudan database kendaraan bermotor yang dibuat oleh Polri.
- 8) Sistem pendataan pada instansi – instansi terkait (Bea cukai, Deperindak, Pengadilan dan Kejaksaan) mempunyai program database yang berbeda.
- 9) Banyaknya kendaraan – kendaraan bermotor dari *bounded area* (Batam , Aceh , Kalbar , Papua) yang masuk ke Jakarta sehingga ada kelompok yang tidak setuju dengan database kendaraan bermotor mengkritisi melalui media massa.

- 10) Perlu waktu untuk memperbaiki database kendaraan bermotor Dispenda yang disesuaikan dengan registrasi dan identifikasi oleh Polri dikarenakan database kendaraan bermotor hanya memperhitungkan aspek ekonomisnya *prosperity* tidak memperhitungkan aspek *security* / keamanan.
- 11) Perlu hadirnya kendaraan bermotor setiap perpanjangan / pendataan baru untuk di dokumentasikan menjadi data kepemilikan kendaraan bermotor .
- 12) Masih banyaknya KTP palsu yang dipakai hingga data identitas kepemilikan kendaraan bermotor tiap tahun apabila kendaraan bermotor tersebut diperjual belikan akan sulit mengidentifikasi.
- 13) Masih banyaknya file yang dibawa calo / biro jasa pada saat mengajukan perpanjangan pajak , belum sesuai dengan mekanisme penerbitan / pengesahan STNK yang berlaku (ban berjalan) .
- 14) Informasi data blokir pencurian kendaraan bermotor , dari Direktorat Reskrim belum secara akurat datanya yang diberikan oleh jajaran reskrim dari polda – polda se Indonesia sehingga masih banyak kendaraann bermotor yang dicuri dapat di Bea balik namakan dengan dokumen palsu dikarenakan mekanisme proses blokir sangat lama dan membuka peluang untuk mendaftarkan di wilayah.

- 15) Kurang kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Polri tentang informasi dikarenakan kurang cepat, proses berbelit –belit , dan data harus diakses pada database Dispenda.

Melalui penggunaan database kendaraan bermotor berbasis teknologi diharapkan dapat mendukung Polri dalam peningkatan profesionalisme kinerja anggota-anggotanya dalam menghadapi tantangan kejahatan yang semakin meningkat dan kompleks sehingga dapat meningkatkan peluang untuk meraih simpati yang positif dari masyarakat.

Dengan database kendaraan bermotor diharapkan dapat mempengaruhi kemudahan dalam pengungkapan tindak pidana, karena dengan database kendaraan bermotor yang dapat menampilkan beberapa aplikasi, pelaku tindak pidana dengan menggunakan kendaraan bermotor akan dengan mudah terdeteksi dan tertangkap.

Pada saat ini segala aktivitas kejahatan dapat dikatakan hampir seluruhnya menggunakan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga apabila database kendaraan bermotor diberdayakan dengan optimal tidak menutup kemungkinan pengungkapan kasus tindak pidana akan meningkat .

3. Adapun faktor database kendaraan bermotor yang mempengaruhi pengungkapan tindak pidana dapat diakses melalui aplikasi program sebagai berikut :

A. Program tampilan.

1. Program tampilan data kendaraan bermotor berdasarkan nomor Polisi:

Gambar 5

Program Tampilan Data Kendaraan Bermotor Berdasarkan Nomor Polisi

SISTEM INFORMASI RANMOR SAMSAT POLDA METRO JAYA

Tab: Data Fisik | Photo | Pengilik | Mutasi | Pencarian Khusus

No Polisi: B 7770 | Cari

Nama Pemilik: AHMAD FAUZI

Alamat: JL. TEBET BARAT RAYA NO. 23 RT 12/6

Kota: JAKARTA SELATAN

Merk: TOYOTA	Type: LEXSUS	Transmisi: Automatic
Thn Pembuatan: 2002	Thn Perakitan: 2002	Ex. Lelang / Dump: Ya
Isi Silinder: 3000	Warna: SILVER	Ganti Warna: Tidak
No. Rangka / NIK: KF 50055432	No. Mesin: 5K0393239	Ganti Mesin: Tidak
Posisi No. Rangka: Chasis	Posisi No. Mesin: Blok Mesin	Blokir: Tidak
Nomor BPKB: B6810030	Warna TNKB: HITAM	STNK Duplikat: Tidak
Bahan Bakar: BENSSIN	Kode Lokasi: 12810	BPKB Duplikat: Tidak
Jumlah Pintu: 4		
CBU / CKD: CBU		
Rubah Bentuk: Tidak		
Ganti No. Pol: Tidak		
Mutasi: Tidak		

SHAKTI - DHA

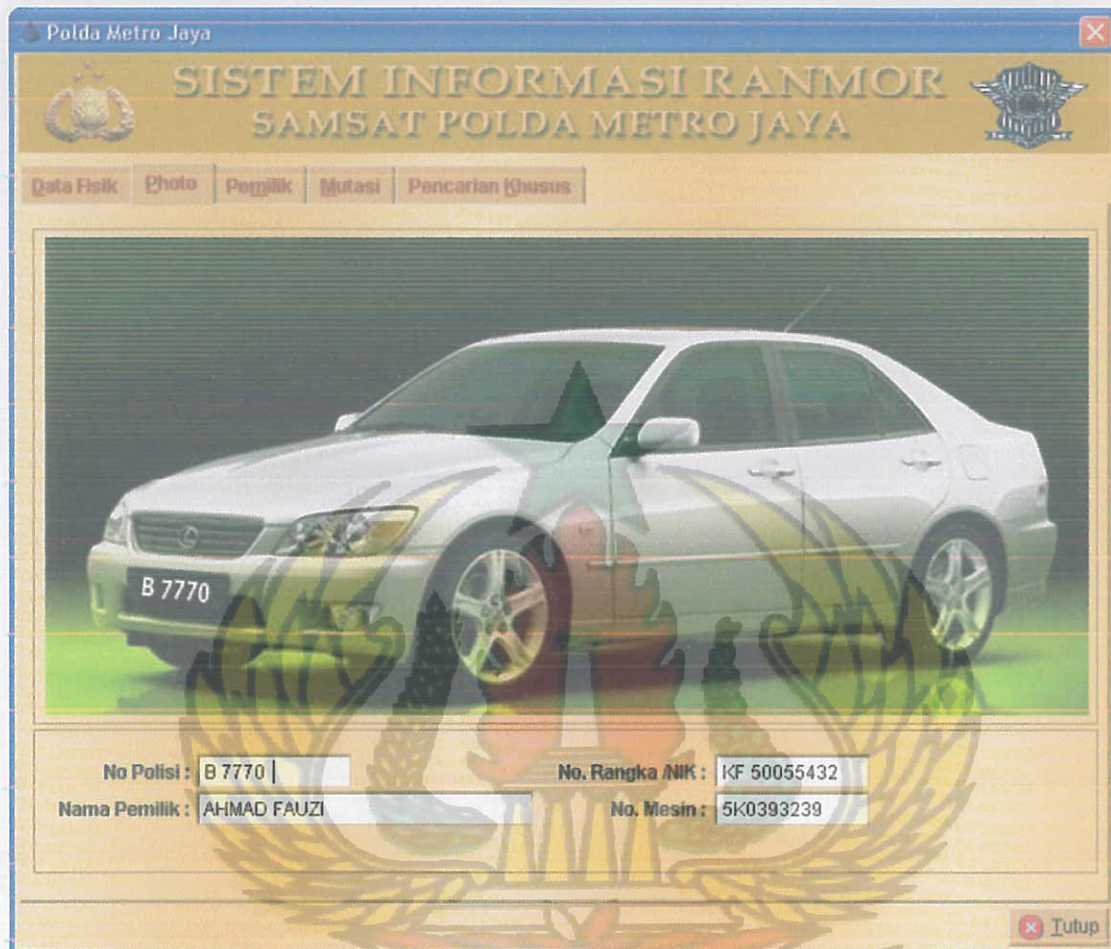
Tutup

Database kendaraan bermotor tersebut akan dapat diakses menjadi Informasi data kendaraan bermotor seperti diatas ditampilkan secara lengkap termasuk adanya foto kendaraan dengan harapan data kendaraan bermotor menjadi semakin jelas sehingga memudahkan pelacakan dalam pengungkapan suatu tindak pidana .

2. Program tampilan yang menggambarkan photo kendaraan bermotor.

Gambar 6

Program Tampilan yang Menggambarkan Foto Kendaraan bermotor



Tampilan photo kendaraan bermotor seperti diatas dapat dicetak sehingga bisa membantu petugas dalam mengidentifikasi kendaraan bermotor mulai dari jenis, tipe, warna dan bentuk kendaraan. Hal ini tentunya dapat pula dipergunakan untuk pengungkapan kasus tabrak lari dalam suatu kecelakaan yang banyak ditemui oleh anggota polisi dimana selama ini cukup

sulit melakukan pelacakan kalau yang teridentifikasi hanya nomor polisinya saja.

Selain itu program juga dapat menampilkan riwayat kepemilikan kendaraan bermotor dan dilengkapi dengan foto pemilik. Hal ini sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang menertibkan data kependudukan (KTP). Selama ini masih banyak KTP yang dipalsukan untuk melengkapi data kendaraan bermotor, sehingga akan menyulitkan untuk pengungkapan suatu tindak pidana.

No KTP yang terdata dalam database kendaraan bermotor akan selalu valid/akurat dengan data kependudukan dari pemda DKI apabila sistemnya dapat on-line dengan database Samsat Polda Metro Jaya. Hal ini sangat memungkinkan dengan mensinergiskan antara database kendaraan bermotor dengan data KTP .

Dari nomor KTP yang ada akan terlihat berapa kepemilikan mobil seseorang, walaupun mobil tersebut menggunakan nama keluarganya, sebab hal ini akan terlihat dari data alamat yang tertera dalam database kendaraan bermotor tersebut.

3. Program tampilan yang menggambarkan photo pemilik kendaraan bermotor terakhir :

Gambar 7

Program Tampilan yang Menggambarkan Foto Pemilik Kendaraan bermotor Terakhir

NO.	NAMA	MULAI	SAMPAI
1	GATOT SUYITNO	05-01-2002	22-03-2002
2	MUHAMMAD SAYUTI	22-03-2002	15-06-2002
3	AMIR ABDULLAH	15-03-2002	17-06-2002
4	RUDI NIIRWANSYAH	17-06-2002	29-09-2002
5	DEWI ANGGRAENI	29-09-2002	12-01-2003
6	AHMAD FAUZI	12-01-2003	Sekarang

Alamat : JL. TEBET BARAT RAYA NO. 23 RT 12/6
Kota : JAKARTA SELATAN
Nomor KTP : 734747.00.85878.0098
Tempat Lahir : Surabaya
Tanggal Lahir : 31-03-1955
Umur : 48 Thn, 3 Bln, 27 Hr

Dalam tampilan gambar diatas dapat dilihat sudah berapa kali kendaraan bermotor tersebut berpindah tangan serta tanggal kepemilikannya. Data kepemilikan dengan menggambarkan sejarah kepemilikan, akan sangat mendukung dalam pengungkapan suatu tindak pidana, dimana foto pemilik dan data KTP harus benar-benar asli.

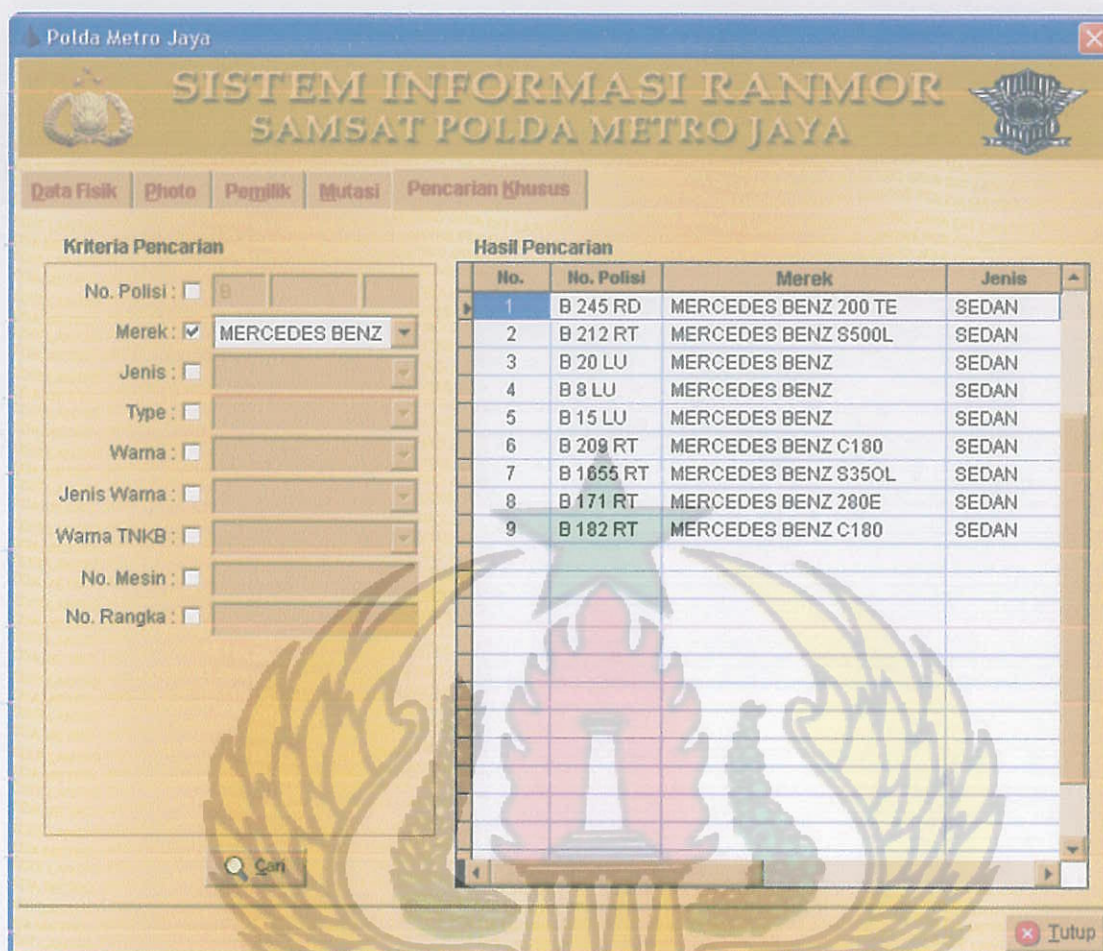
Sejarah kepemilikan kendaraan bermotor tersebut akan menjadi file bagi Polri yang dapat dipergunakan oleh direktorat lainnya diluar ditlantas untuk mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Registrasi Identifikasi yang dilakukan oleh Polri dalam membuat database kendaraan bermotor, merupakan penjabaran dari salah satu poin didalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang POLRI pasal 15:2(b). Tentunya hal ini harus diantisipasi oleh Polri dengan membuat sistem yang dapat memagari institusi tersebut dari departemen lain.

Perlu disadari bahwa Samsat merupakan salah satu aset Polri dimana penunjukan Polri selaku koordinator Samsat mempunyai implikasi hukum terhadap akuntabilitas publik . Namun jika sistem maupun data kendaraan bermotor yang dimiliki tidak memadai, maka kedepan akan menimbulkan kesan bahwa Polri tidak profesional untuk melaksanakan fungsi Registrasi identifikasi tersebut. Akibatnya, bukan tidak mungkin jika kewenangan itu akan diambil alih atau diberikan kepada departemen lain.

4. Program tampilan yang menggambarkan data kendaraan bermotor berdasarkan merk kendaraan.

Gambar 8
Program Tampilan yang Menggambarkan Data Kendaraan bermotor
Berdasarkan Merk



Tampilan tersebut diatas menggambarkan, bila dalam suatu kondisi nomor polisi tidak diketahui, sedangkan merk, warna atau identitas lain diketahui, maka disediakan fasilitas pencarian kendaraan bermotor berdasarkan berbagai Kriteria baik merk, tipe, jenis dan klasifikasi tahun pembuatan serta warna kendaraan maupun bentuk misalnya (4 pintu atau 2 pintu bagi kendaraan Completely Built-up /"CBU" atau "CKD").

Pada prinsipnya teknologi informasi yang akan diterapkan dalam sistem informasi database kendaraan bermotor Polda Metro Jaya harus mampu menjawab berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan data kendaraan bermotor secara cepat dan akurat.

Pepatah mengatakan "*Siapa yang lebih dulu menguasai informasi dan sistem maka akan mudah menjawab kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat*". Sistem yang dibangun ini akan sangat bermanfaat bagi tugas-tugas kepolisian, dimana sudah sering Polri merasa kewalahan dalam menyajikan data maupun untuk memberikan informasi tentang data kendaraan bermotor maupun riwayat kepemilikan dari kendaraan tersebut atau memberikan informasi secara detail tentang kendaraan bermotor. Adapun data-data tersebut, selama ini hanya berdasarkan data dari KPTI (Kantor Pusat Teknologi Informatika) Dispenda dan data berupa File yang tersimpan di tempat penyimpanan arsip yang sudah tidak memadai lagi. Adanya penambahan jumlah kendaraan yang ada, sangat tidak memadai untuk terus menyimpan arsip tersebut, file yang ada hanya dapat dilihat secara manual dengan mencari arsip yang memerlukan waktu terlebih untuk mencari arsip tersebut, baru setelah itu dapat dipelajari isi arsip tersebut .

B. Program Aplikasi

Aplikasi komputer data kendaraan bermotor yang akan diterapkan pada Samsat Polda Metro Jaya, dengan contoh tampilan sesuai dengan permintaan pemanggilan data adalah sebagai berikut :

1. Contoh tampilan aplikasi pencarian data kendaraan bermotor melalui nomor polisi yang akan menampilkan foto pemilik kendaraan bermotor dan foto kendaraan bermotor.

Gambar 9

Aplikasi Pencarian Data Kendaraan bermotor yang Menampilkan Foto Pemilik dan Foto Kendaraan bermotor

2. Contoh tampilan aplikasi pencarian data kendaraan bermotor melalui



Jenis kendaraan bermotor yang akan menampilkan data kendaraan bermotor sesuai dengan jenis yang diperlukan yang kegunaannya untuk mengetahui jumlah jenis kendaraan dimaksud.

Gambar 10

Aplikasi Pencarian Data Kendaraan bermotor yang Menampilkan Jenis Kendaraan bermotor



3. Contoh tampilan aplikasi pencarian data kendaraan bermotor melalui merk kendaraan bermotor yang akan menampilkan data kendaraan bermotor sesuai dengan merk kendaraan bermotor yang diperlukan yang kegunaannya untuk mengetahui jumlah merk kendaraan dimaksud.

Gambar 11

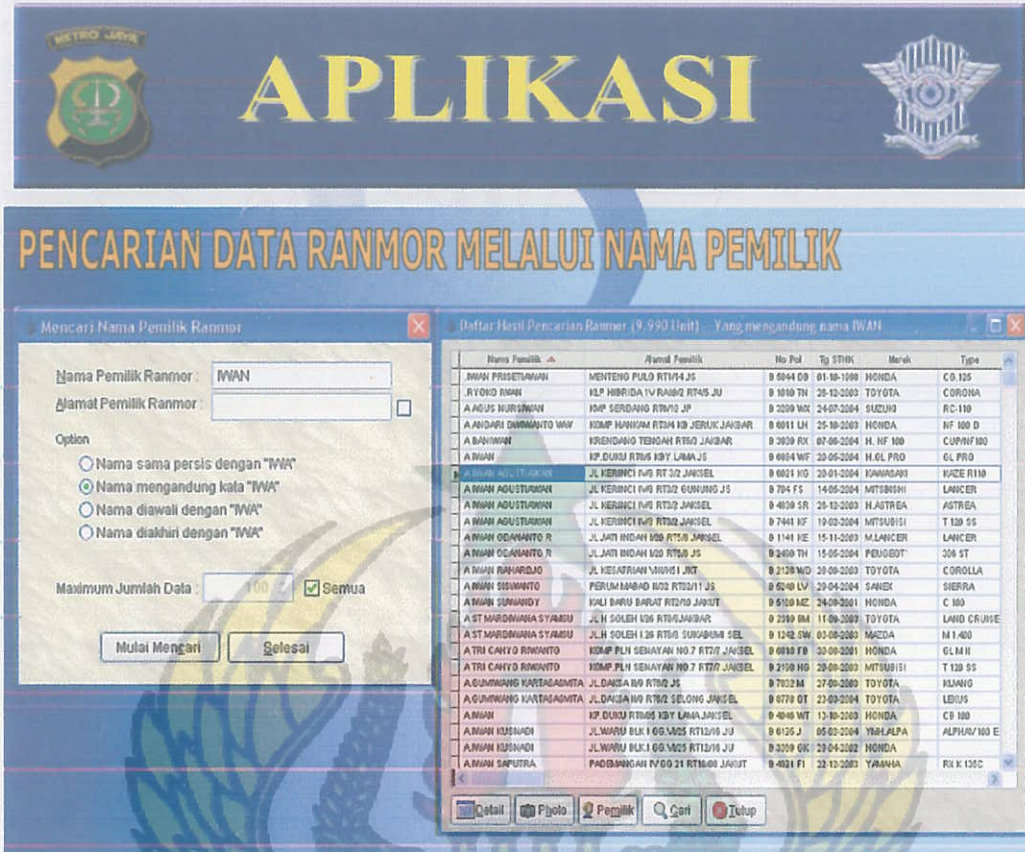
Aplikasi Pencarian Data Kendaraan Bermotor Melalui Merk Kendaraan bermotor



4. Contoh tampilan aplikasi pencarian data kendaraan bermotor melalui nama pemilik kendaraan bermotor yang akan menampilkan data kendaraan bermotor seseorang yang namanya dipanggil, kegunaannya untuk mengetahui jumlah kendaraan yang dimilikinya terutama berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi.

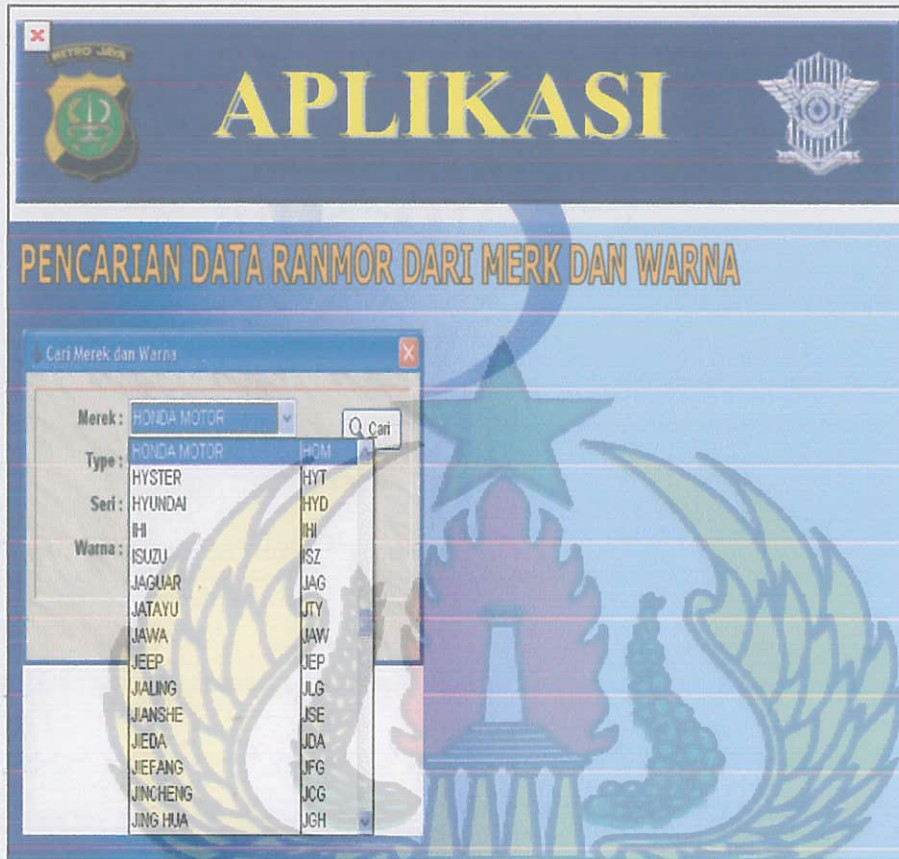
Gambar 12

Aplikasi Pencarian Data Kendaraan Bermotor Melalui Nama Pemilik Kendaraan Bermotor



5. Contoh tampilan aplikasi pencarian data kendaraan bermotor melalui merk dan warna yang akan menampilkan data kendaraan dengan merk dan warna yang sesuai dengan permintaan. Kegunaannya untuk mencari data kendaraan yang melakukan tabrak lari yang tidak diketahui nomor polisinya.

Gambar 13
Aplikasi Pencarian Data Kendaraan Bermotor Melalui Merk dan
Warna Kendaraan Bermotor



6. Contoh tampilan aplikasi pencarian data kendaraan bermotor melalui nomor rangka dan nomor mesin yang akan menampilkan data kendaraan bermotor. Kegunaannya untuk melacak identitas kendaraan terutama kendaraan yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana , ancaman atau ledakan bom (terorisme) dan kendaraan temuan/curian dengan menggunakan nomor polisi lain.

Gambar 14
Aplikasi Pencarian Data Kendaraan Bermotor Melalui Nomor
Rangka dan Nomor Mesin



7. Contoh tampilan aplikasi pencarian data kendaraan bermotor melalui alamat pemilik akan menampilkan data kendaraan bermotor sesuai dengan alamat yang diminta, kegunaannya untuk melacak tersangka pelaku Tindak Pidana.

Gambar 15
Aplikasi Pencarian Data Kendaraan Bermotor Melalui
Alamat Pemilik



8. Contoh tampilan aplikasi pencarian data kendaraan bermotor yang diblokir akan menampilkan data jumlah kendaraan bermotor yang diblokir pada Samsat Polda Metro Jaya atau blokir kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam tindak pidana (penggelapan / penipuan).

Gambar 16

Aplikasi Pencarian Data Kendaraan Bermotor yang Diblokir



C. Jaringan komunikasi data yang direncanakan server ditempatkan di masing – masing Samsat DKI maupun Wilayah .

Samsat yang berada pada Dit Lantas Polda Metro Jaya terbagi menjadi 10

Wilayah yaitu meliputi :

1. Samsat Wilayah Jakarta Pusat.
2. Samsat Wilayah Jakarta Utara.
3. Samsat Wilayah Jakarta Barat.

4. Samsat Wilayah Jakarta Selatan.
5. Samsat Wilayah Jakarta Timur.
6. Samsat Wilayah Kodya Tangerang.
7. Samsat Wilayah Kab. Tangerang.
8. Samsat Wilayah Kodya Bekasi.
9. Samsat Wilayah Kab. Bekasi .
10. Samsat Wilayah Depok dan Samsat pembantu di Cinere.

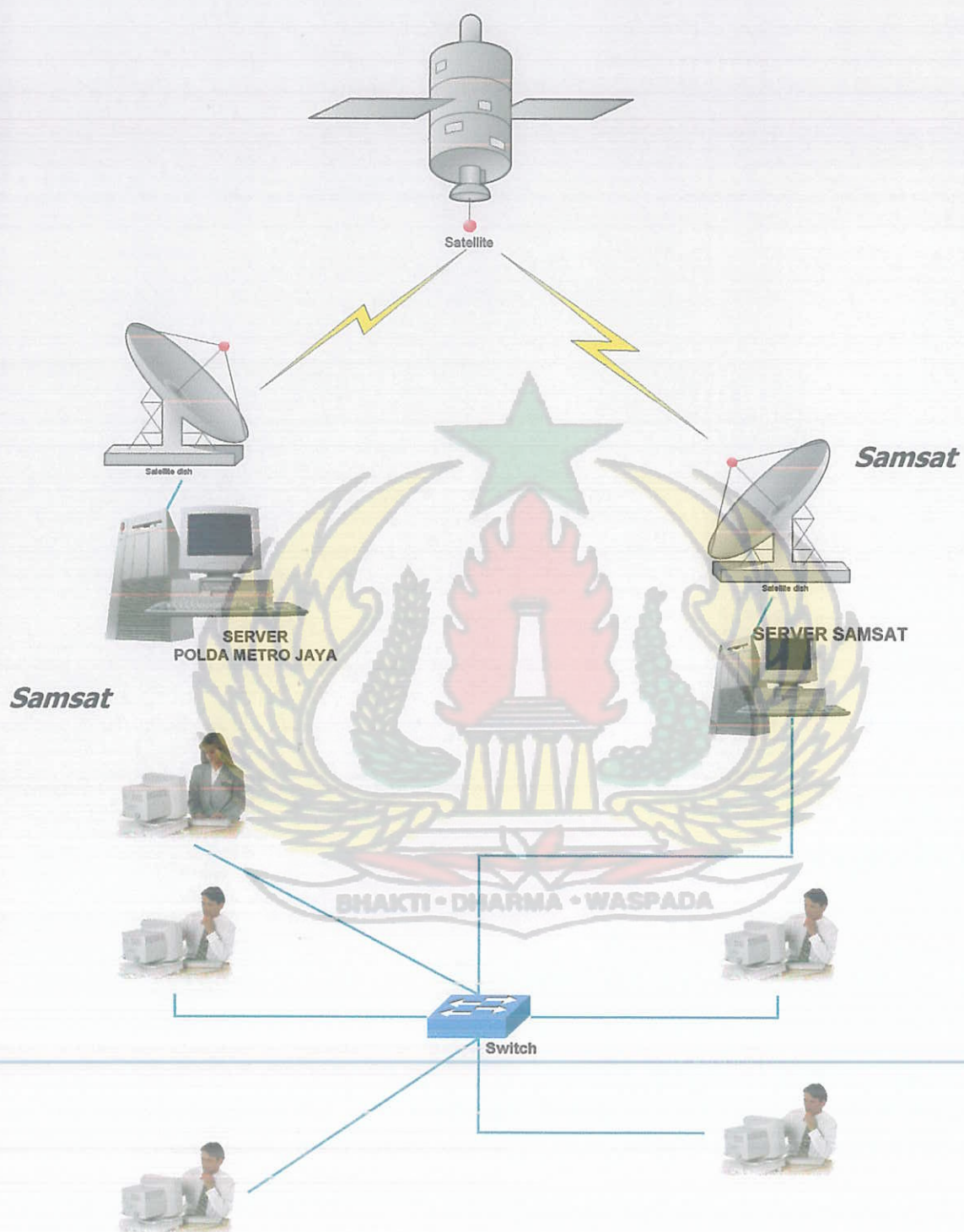
Berdasarkan gambaran posisi keberadaan Samsat tersebut maka jaringan komunikasi data yang akan dibangun adalah jaringan telekomunikasi (dial phone), jaringan paling sederhana ini, sementara dipergunakan sambil mempelajari kemungkinan menggunakan VSAT (*Very Small Apature Terminal*) yang selama ini sudah dipergunakan oleh bagian SIM yang sudah On-line sistem seluruh Indonesia. Pada prinsipnya, jaringan tersebut mampu memfasilitasi komunikasi data antarseluruh Samsat Polda Metro Jaya dan selanjutnya dapat dikembangkan antarpolda se-Indonesia.

Dengan jaringan komunikasi data yang direncanakan tersebut, akan sangat mudah untuk mengakses data dari satu Samsat ke Samsat lainnya di seluruh polda di Indonesia. Sehingga dengan demikian dapat bermanfaat untuk menanggulangi adanya penyalahgunaan data berupa pemalsuan dokumen untuk kepentingan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh jaringan – jaringan dari kelompok tertentu demi kepentingan kelompoknya (sindikatis).

Skema jaringan komunikasi data pada salah satu Samsat dan antarSamsat Polda Metro Jaya dapat digambarkan sebagai berikut :

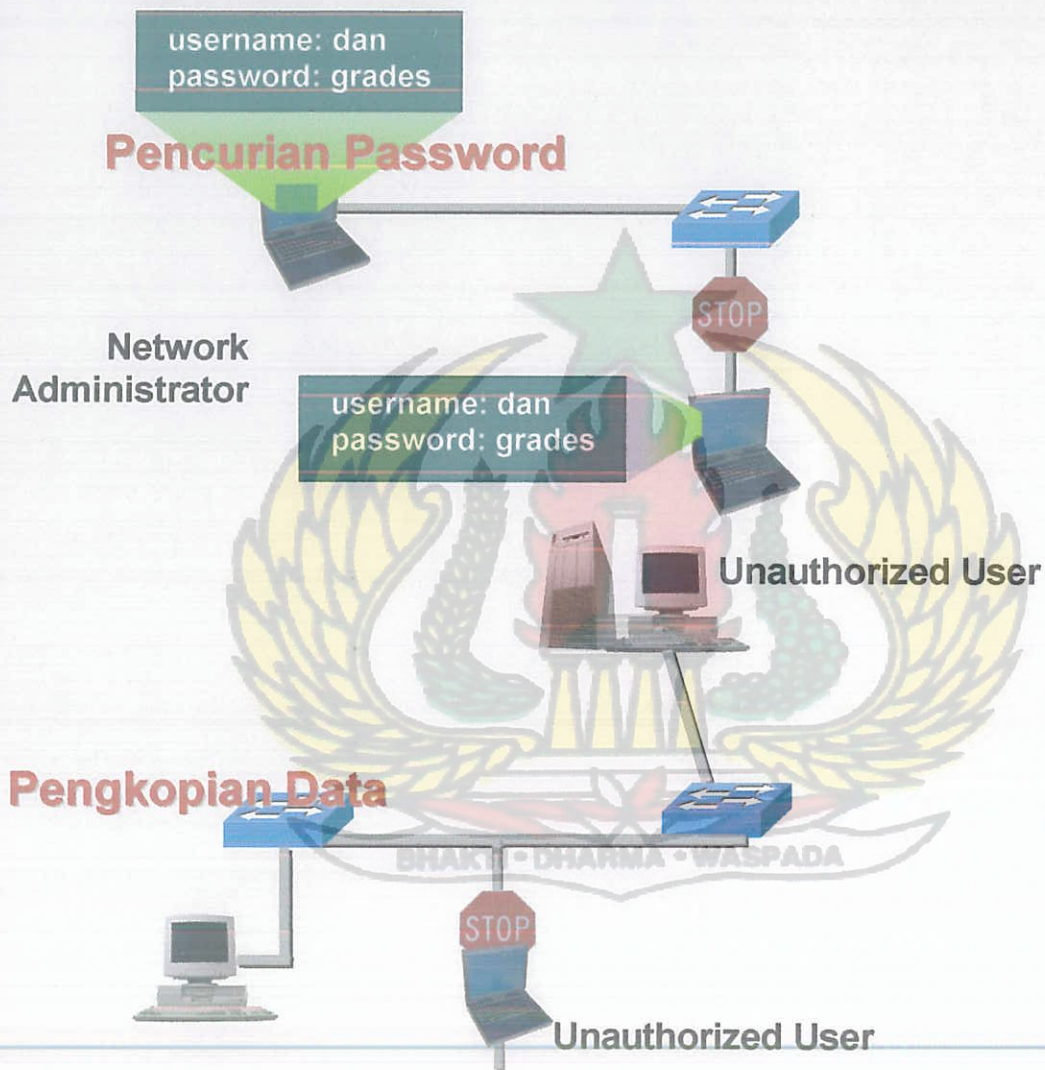
Gambar 13

Jaringan Komunikasi Data Samsat Polda Metro Jaya



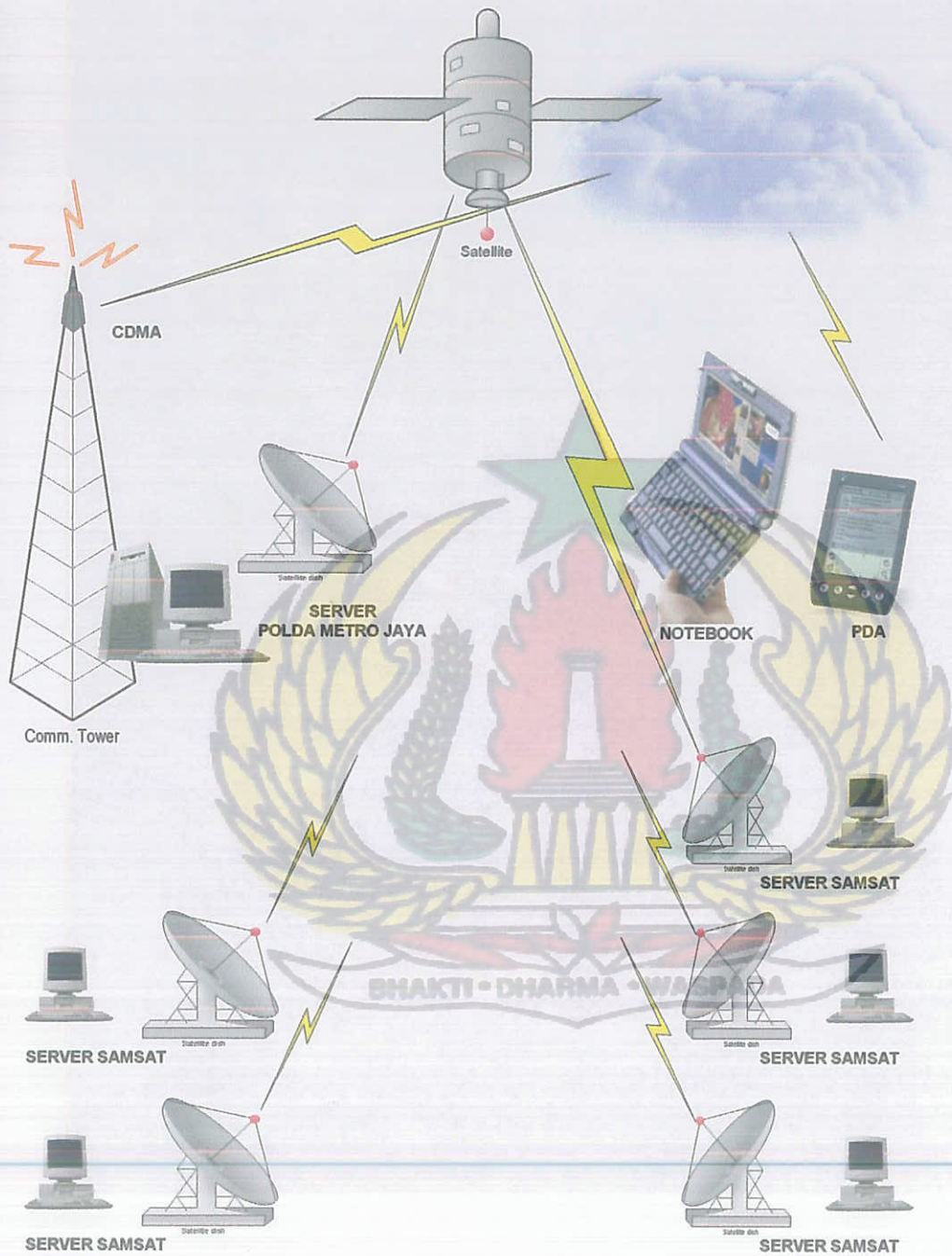
komunikasi data harus dirancang sedemikian rupa, sehingga aman terhadap kemungkinan disusupi oleh pemakai yang tidak berhak untuk melakukan pencurian data.

Gambar 17
Kode Pengamanan Komunikasi Data Samsat Polda Metro Jaya



Gambar 18

Jaringan Komunikasi Data Polda Metro Jaya – Samsat – Mobile Device





BAB V

DATABASE KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA DI POLDA METRO JAYA YANG DIHARAPKAN

A. Mekanisme Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor.

Tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri semakin besar, sehingga mengakibatkan tugas yang harus diemban semakin berat. Disamping itu fasilitas dan prasarana yang dimiliki oleh jajaran Kepolisian belum memadai, terutama dalam pengelolaan database kendaraan bermotor (Kendaraan bermotor).

Tingkat perkembangan dan pertumbuhan Kendaraan bermotor ditinjau dari aspek kualitatif dengan kemajuan teknologi, telah menghasilkan beraneka-ragam produk baik merk, type maupun jenisnya. Demikian pula bila ditinjau dari aspek kuantitatif, maka laju pertumbuhan kendaraan bermotor terus meningkat pesat jumlahnya di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Indikasi perkembangan dan pertumbuhan produk serta pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tersebut tentu akan berjalan seiring dengan semakin besarnya tuntutan terhadap kesiapan, kemampuan profesionalisme dan konsistensi aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugas fungsional mendata identitas dan keberadaan seluruh kendaraan bermotor.

Disamping kesiapan tersebut, maka kebutuhan akan adanya sarana dan prasarana penunjang operasional didalam proses menata penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor mutlak menjadi penting untuk dimiliki oleh institusi Polri, khususnya Direktorat Lalu Lintas melalui bagian Samsat yang berwenang dalam pemrosesan STNK dan BPKB seluruh kendaraan bermotor.

B. Prosedur pelayanan dan pengurusan administrasi STNK dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penerbitan STNK.

- a) Wajib pajak melengkapi persyaratan dan mengisi formulir yang disediakan.
- b) Penelitian persyaratan dan identitas pemilik kendaraan bermotor oleh petugas loket pendaftaran.
- c) Registrasi pada buku induk.
- d) Input data komputer.
- e) Koreksi data dokumen kendaraan bermotor dengan data komputer (print komputer).
- f) Korektor Paur STNK dan Kasi Pajak.
- g) Validasi notice (Dispenda).
- h) Notice di serahkan kepada wajib pajak.
- i) Wajib pajak bayar di kasir (Kasda).

- j) Penyerahan STNK, TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan KTL (Bukti Pelunasan Pajak).

2. Pembetulan penerbitan STNK di Samsat Polda Metro Jaya yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- a. Perpanjangan dan Pengesahan STNK.

Pembetulanannya.

Data kosong yang sering ditemui pada database Dispenda tidak akan ditemui pada database kendaraan bermotor Polri karena entry data yang dilakukan pada cek fisik sehingga untuk data kendaraan bermotor yang sudah terklasifikasi menurut jenis , type, warna , tahun pembuatan dan sejarah kepemilikan kendaraan bermotor dapat diakses dan mempermudah dalam perpanjangan dan pengesahan STNK .

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Baru.

1) Pembetulanannya.

- a) Loker khusus yang dapat melakukan perubahan tipe guna menghindari beban pajak yang tinggi (manipulasi pajak) milik Dispenda dapat dimonitor pada database kendaraan bermotor milik Polri dimana sebelum masuk ke loket khusus entry data sudah dilaksanakan di bagian cek fisik.

- b) Kendaraan "CBU" yang tidak dilengkapi dengan form "A" (hanya dilengkapi dengan "CKD" seolah-olah kendaraan tersebut bukan kendaraan "CBU"), dapat diketahui dengan online sistem komputer database Bea Cukai sehingga dapat diketahui nomor form "A" dan NIK/VIN .
- c) Dokumen kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh instansi terkait Bea Cukai (form "A", "B", "C" dan lelang) , Deperindak (TPT Import dan PIB) yang sudah dilaporkan ke kantor Samsat Polda Metro Jaya dapat mencegah pemalsuan dokumen tersebut dikarenakan dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait sudah dilaporkan secara online sistem ke database Samsat.
- d) Data kendaraan bermotor yang masuk ke Pabeanan Indonesia dapat diketahui oleh Polri melalui database.
- e) Data awal tentang kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas PP 8 tahun 1955 dan PP 19 tahun 1957 yang diterbitkan dalam bentuk form "B" dan form "C", baik sudah direkomendasi oleh kantor Deplu, kedutaan yang berwenang dan bea cukai sudah ada pada database kendaraan bermotor Samsat.

Polri mempunyai data awal kendaraan bermotor baik yang ditahan oleh bea cukai untuk dimasukkan ke menteri keuangan,

data dari kejaksaan dan pengadilan baik no rangka dan no. mesin untuk di cross cek terlebih dahulu sebelum dilelang dikarenakan seringnya laporan dari NCB Interpol tentang kendaraan bermotor curian dari negara – negara ASEAN misalnya : singapura, malaysia, philipina, brunei. sehingga pemalsuan berkas lelang dapat dicegah dan diungkap pelakunya.

c. Bea Balik Nama Kendaraan Lama.

Pembenahannya /Perubahan sistem pada database.

Proses permohonan ganti nomor polisi kendaraan dimana setelah kendaraan mendapatkan nomor polisi yang baru namun nomor polisi yang lama masih muncul pada komputer (belum dimatikan di database Dispenda), tidak akan terjadi lagi sehingga indentitas ganda (satu kendaraan bermotor dua nomor polisi) dapat dicegah , pada database kendaraan bermotor Samsat dapat diketahui dan ter-filekan pada komputer apabila pemiliknya mengganti No. Pol.

3. Penerbitan STNK yang terbagi dalam beberapa dokumen antara lain:

- a. Kendaraan “CKD” dan Dokumen faktur, NIK dan ATPM (Agen tunggal pemegang merk).

- b. Kendaraan "CBU" dengan dokumen form "A" dan faktur dari Importir umum.
- c. Kendaraan "CKD" dan "CBU" di terbitkan melalui Form "C" PP No. 8 tahun 1955 dan PP 19 tahun 1957.
- d. Kendaraan bermotor hasil lelang negara (Kendaraan bermotor yang masuk ke pabean Indonesia yang tidak di lengkapi dokumen Syah).
- e. Kendaraan bermotor hasil lelang kejaksanaan (Kendaraan bermotor-kendaraan bermotor hasil sitaan penyidikan Polri yang sudah tidak di temukan pemilik yang syah).
- f. Kendaraan Dump, TNI dan Polri.
- g. Kendaraan mutasi dan luar daerah.

4. Mekanisme dan Persyaratan penerbitan STNK.

- a. Kendaraan bermotor yang di terbitkan Faktur / NIK , ATPM adalah kendaraan bermotor CKD.

1) Persyaratan.

- a) Pemohon melengkapi Identitas
- b) Cek Fisik.
- c) Faktur.
- d) Sertifikat NIK.

2) Mekanisme.

- a) Petugas Polri menerima berkas dan kelengkapan dari pemohon untuk di lakukan penelitian.
- b) Petugas Polri meneliti kelengkapan dan kemudian membukukan / Registrasi pada buku induk.
- c) Petugas Polri memasukan data Kendaraan bermotor sesuai Dokurnen yang ada pada database dan kemudian menerbitkan Notice / Resi. Kemudian di lakukan penelitian dan apabila sesuai di serahkan kepada pemohon guna di lakukan pembayaran. yang kemudian petugas Kasir ke bagian validasi untuk menerbitkan STNK .

3) Pembetulan /Perubahan terhadap Sistem pada Database.

- a) Di dalam penelitian dokumen kendaraan bermotor yang menggunakan faktur di harapkan penelitiannya melalui dengan cara Sistem sensor sehingga di dalam penelitiannya lebih terjamin dan akurat.
- b) Data pada ATPM tentang pengeluaran faktur seyogyanya dikirimkan ke Samsat Polda Metro Jaya sehingga nomor faktur dan tanda tangan yang berwenang dari ATPM tersebut dapat diidentifikasi keakuratannya hal ini menghindari pemalsuan dari pada faktur tersebut .

b. Kendaraan bermotor "CBU" dengan Dokumen form "A" dan faktur dari Importir.

a) Persyaratan.

- 1). Form "A" yang di terbitkan dari Bea Cukai.
- 2). TPT (Tanda pengujian Type dari Deperindak).
- 3). PIB (Pemberitahuan Import Barang dari Bea Cukai).
- 4). Faktur dari Importir.
- 5). Identitas pemilik.
- 6). Rekomendasi dari DirLantas Babinkam Polri.
- 7). Cek fisik Kendaraan bermotor.

b) Mekanisme.

- 1). Petugas Polri menerima berkas dan kelengkapan dari pemohon untuk di lakukan penelitian.
- 2). Petugas Polri meneliti kelengkapan dan kemudian membukukan / Registrasi pada buku induk.
- 3). Petugas Polri memasukan data Kendaraan bermotor sesuai Dokumen yang ada pada database dan kemudian menerbitkan Notice / Resi.
- 4). Kemudian di lakukan penelitian apabila sesuai dan di serahkan kepada pemohon guna di lakukan pembayaran, yang kemudian

petugas Kasir ke bagian validasi dan kemudian diterbitkan STNK.

c) Pembenahan/ Perubahan terhadap Sistem pada Database.

- 1). Melakukan Cros Cek ke Bea Cukai yang menerbitkan form "A" .
- 2). Mendata kendaraan bermotor yang masuk ke pabean Indonesia.
- 3). Penelitian dokumen dengan teknologi elektronik Sistem Sensor.
- 4). Bea cukai diminta mengirimkan data form "A" selama 1 bulan untuk disesuaikan dengan form "A" yang akan didaftarkan di Samsat Polda Metro Jaya untuk menghindari pemalsuan dokumen form "A".
- 5). Online Sistem dengan database Kantor Bea Cukai mengenai data kendaraan bermotor yang masuk kepabeanan di Indonesia.

- c. Kendaraan Bermotor "CKD" dan "CBU" fasilitas PP 8 tahun 1955 dan PP 19 tahun 1957 yang dilengkapi dengan dokumen form "C" .

a) Persyaratan.

Apabila Kendaraan bermotor "CKD" persyaratannya yang di lengkapi.

- 1). Faktur dari ATPM.
- 2). Form "C" dari Bea Cukai.
- 3). PIB (Pemberitahuan Import Barang) dari Bea Cukai.
- 4). Cek Fisik.
- 5). Identitas Pemilik.
- 6). Rekomendasi dari Dir Lantas Babinkam Polri.
- 7). Cek List guna cross cek pada penomoran CD/corps diplomat (Penomoran khusus).

Apabila Kendaraan bermotor "CBU", Persyaratannya yang di lengkapi.

- 1). Form "C" dari Bea Cukai.
- 2). PIB (Pemberitahuan Import Barang) dari Bea Cukai.
- 3). TPT dari Deperindak.
- 4). Cek Fisik.
- 5). Identitas pemilik.
- 6). Rekomendasi dari Dir lantas Babinkam Polri.
- 7). Cek list guna Cros cek pada penomoran CD/corps diplomat (Penomoran khusus).

b) Mekanisme.

- 1). Petugas Polri meneliti kelengkapan dan kemudian membukukan / Registrasi pada buku induk.
- 2). Petugas Polri memasukkan data Kendaraan bermotor sesuai dokumen yang ada pada database kemudian menerbitkan Notice / Resi
- 3). Penelitian dokumen tentang keabsahan dan kesesuaian , kemudian di serahkan kepada pemohon guna di lakukan pembayaran .Kemudian petugas Kasir ke validasi untuk diterbitkan STNK.

c) Pembenahan / Perubahan Sistem pada Database.

- 1). Perwakilan negara – negara asing dan badan – badan yang ada di dalam PBB , dan lembaga tinggi negara yang mendapat fasilitas PP 8 / 1955 dan PP 19 / 1957 , apabila akan memasuki dan menggunakan kendaraan bermotor harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Dirlantas Babinkam Polri , sehingga kendaraan bermotor – kendaraan bermotor dimaksud terkompulir dan terdata di tingkat pusat.
- 2). Penelitian dokumen melalui Scanner dan Sistem Sensor.

3). Data kendaraan bermotor dari kedutaan – kedutaan negara asing yang memasukkan kendaraan bermotor menggunakan fasilitas PP 8 / 1955 dan PP 19 / 1957.

g) Kendaraan bermotor hasil lelang negara (kendaraan bermotor – kendaraan bermotor yang masuk ke pabean Indonesia tidak dilengkapi dokumen yang syah).

a) Persyaratan.

- 1). Risalah lelang dari kantor lelang negara (Photo Copy yang di legalisir)
- 2). Keputusan kepala kantor pelayanan dari Dir Jen Bea Cukai, yang melakukan penahanan barang —barang import yang tidak di lengkapi dengan Dokumen yang syah (photo copy yang di legalisir)
- 3). Tentang persyaratan barang-barang yang menjadi milik negara yang telah di setuju untuk di lelang oleh menteri keuangan.
- 4). Keputusan kantor wilayah Bea Cukai tentang pembentukan panitia lelang tim terpadu (Photo Copy yang di legalisir)
- 5). Kwitansi penyetoran uang (PhotoCopy yang di legalisir)
- 6). Rekomendasi dari Dir lintas Babinkam Polri.
- 7). Cek fisik.

8). Identitas pemilik.

b) Mekanisme.

- 1). Petugas Polri menerima berkas dan kelengkapan dari pemohon untuk di lakukan penelitian.
- 2). Petugas Polri meneliti kelengkapan dan kemudian membukukan / Registrasi pada buku induk.
- 3). Petugas Polri memasukkan data Kendaraan bermotor sesuai Dokumen yang ada pada database dan kemudian menerbitkan Notice / Resi. Kemudian di lakukan penelitian dan apabila sesuai dan di serahkan kepada pemohon guna di lakukan pembayaran, yang kemudian petugas Kasir ke bagian validasi dan kemudian diterbitkan STNK.

c) Pembetulan / Perubahan Sistem pada Database.

- a) Setiap kendaraan bermotor yang masuk ke Pabean Indonesia yang ditahan Bea Cukai, yang tidak dilengkapi dokumen yang syah, Ditjen Bea Cukai segera mengirimkan data ke Dirlantas Babinkam Polri guna pendataan awal.
- b) Setiap kendaraan bermotor yang diajukan permohonan persetujuan Menteri Keuangan untuk di lelang , Dirlantas Babinkam Polri harus mendapat tembusan.

- e. Kendaraan bermotor hasil lelang kejaksaan (kendaraan bermotor – kendaraan bermotor hasil sitaan dari kasus tindak pidana yang sudah tidak lagi ditemukan pemiliknya yang syah).

a) Persyaratan.

- 1). Risalah lelang dari kejaksaan.
- 2). Risalah lelang dari penyidik.
- 3). Penyerahan barang bukti dari Kejaksaan ke Reg ident.
- 4). Usulan Dari kejaksaan ke badan lelang Negara.
- 5). Penyetoran ke badan lelang.
- 6). Rekomendasi kejaksaan kepada Dir Lantas Polda Metro Jaya untuk penerbitan STNK / BPKB.

b) Mekanisme.

- 1). Petugas Polri menerima berkas dan kelengkapan dari pemohon untuk di lakukan penelitian.
- 2). Petugas Polri meneliti kelengkapan dan kemudian membukukan / Registrasi pada buku induk.
- 3). Petugas Polri memasukan data Kendaraan bermotor sesuai Dokumen yang ada pada database dan kemudian menerbitkan Notice / Resi.

- 4). Kemudian di lakukan penelitian apabila sesuai di serahkan kepada pemohon guna di lakukan pembayaran, yang kemudian petugas Kasir ke bagian validasi untuk diterbitkan STNK.

c) Pembenahan / Perubahan Sistem dalam database.

- 1). Kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang di lakukan pelelangan harus melampirkan hasil pengecekan dari penelitian keabsyahan no rangka dan no mesin dari Puslabfor .
- 2). Apabila no rangka dan no mesin tidak standart harus melampirkan hasil penerbitan faktur dari ATPM sesuai dengan merk kendaraan bermotornya.

f. Kendaraan bermotor mutasi dan luar daerah.

a) Persyaratan.

- 1). Syarat pengantar dari Kasatker daerah asal.
- 2). CQ Dir Lantas , KaPolres.
- 3). Fiskal antar Daerah.
- 4). Cek Fisik, BPKB , Arsip.
- 5). Daftar kelengkapan surat-surat.

b) Mekanisme.

- 1). Petugas Polri menerima berkas dan kelengkapan dari pemohon untuk di lakukan penelitian.

- 2). Petugas Polri meneliti kelengkapan dan kemudian membukukan / Registrasi pada buku induk.
- 3). Petugas Polri memasukan data Kendaraan bermotor sesuai Dokumen yang ada pada database dan kemudian menerbitkan Notice / Resi. Kemudian di lakukan penelitian apabila sesuai di serahkan kepada pemohon guna di lakukan pembayaran, yang kemudian petugas Kasir ke bagian validasi dan kemudian diterbitkan STNK.

c) Pembenahan / Perubahan Sistem dalam Database.

- 1). Setiap kendaraan bermotor yang akan dimutasikan ke luar Polda , Polda asal harus memberikan data – data kendaraan bermotor yang akan dimutasikan ke Polda tujuan sehingga kendaraan bermotor yang dimutasikan tidak sesuai prosedur akan terproteksi /terblokir.
- 2). Penyerahan STNK, peneng dan plat di loket pengeluaran, (peneng yang seharusnya terpasang di plat nomor, mulai bulan Januari 2003 dihapuskan. Tentunya hal ini akan menyulitkan pengidentifikasian kendaraan bagi anggota yang bertugas di lapangan).
- 3). Hingga saat ini, penelitian dokumen kendaraan bermotor oleh petugas Samsat dilakukan secara manual, sehingga tidak

menutup kemungkinan adanya celah bagi para pelaku tindak pidana untuk memalsukan dokumen kendaraan bermotor (faktur, form "A", form "C" dan lelang) yang dapat didaftarkan untuk mendapatkan atau diterbitkan dokumen / STNK yang asli.

g. Proses Pemblokiran/Cabut Blokir Kendaraan bermotor.

- 1). Masyarakat membawa surat permohonan pemblokiran/cabut blokir dari penyidik.
- 2). Membawa STNK dan BPKB asli serta hasil cek fisik kendaraan bermotor.
- 3). Penelitian persyaratan oleh petugas blokir.
- 4). Rekomendasi dari Kasi STNK.
- 5). Registrasi pada buku induk dan dilakukan pemblokiran/cabut blokir pada buku registrasi serta dilakukan pemblokiran/cabut blokir pada komputerisasi.

a) **Pembenahan / perubahan Sistem pada database.**

- (1) Mekanisme pemblokiran akibat pencurian kendaraan bermotor mulai dari Polsek , Polres sampai Polda.
- (2) Pemblokiran dengan menggunakan Online Sistem dari Polsek , Polres dan Polda.
- (3) Database kendaraan bermotor sudah dapat diakses untuk mengetahui keabsyahan STNK dan BPKB

- (4) Database kendaraan bermotor dapat diketahui no rangka dan no mesin secara akurat berdasarkan kode VIN / NIK
- (5) Penelitian oleh petugas dalam waktu yang singkat
- (6) Birokrasi mulai dari Dirlantas , Wadirlantas , Kasubdit min reg ident , Kasi STNK dapat di persingkat dengan adanya database kendaraan bermotor.
- (7) Pemblokiran dan pencabutan blokir pada komputer dengan menggunakan kode pasword sesuai dengan kode pasword operator.

C. Data Pengeluaran Faktur dari ATPM.

Data yang akurat dari dealer, Importir Umum tentang penerbitan faktur yang sering dipalsukan oleh sindikat penyelundup mobil ,pemalsu dokumen setiap bulan dikirimkan melalui jaringan komputer (web site di internet) untuk dihimpun di Samsat Polda Metro Jaya , pada saat dealer atau masyarakat (pemilik kendaraan bermotor) mendaftarkan kendaraan bermotornya maka database Samsat akan mencocokkan no faktur , tanggal dikeluarkan , jenis kendaraan, type dan tanda tangan pejabat yang berwenang sebelum penerbitan STNK sehingga peluang untuk memalsukan dokumen tersebut dapat dicegah atau dikurangi .

D. Data KTP dengan kode lokasi (menghindari KTP palsu).

Data KTP dari dinas kependudukan pemda DKI Jaya akan sangat penting di dalam pengidentifikasian pemilik kendaraan bermotor , Online Sistem data kependudukan untuk mencocokkan data KTP pemilik kendaraan bermotor dengan kode lokasi yang didaftarkan , hal ini akan mencegah pemilik kendaraan bermotor memalsukan identitasnya , sehingga dapat diketahui masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari 1 unit kendaraan bermotor yang kegunaannya untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta.

E. Ganti Warna / No. Pol.

Warna / No. Pol kendaraan bermotor sangat berperan didalam pengungkapan suatu tindak pidana , file secara komputerisasi di database langsung menyimpan perubahan warna / no. Pol kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor tersebut telah beberapa kali ganti warna dan ganti No. Pol riwayat pergantiannya, Sehingga apabila diperlukan di dalam penyidikan dan penyelidikan , dapat diketahui secara cepat dan jelas identitasnya hal ini akan bermanfaat bagi proses pengungkapan suatu tindak pidana .

F. STNK Rahasia dan STNK khusus.

Data Penerbitan STNK rahasia dan STNK khusus akan terdatakan dengan baik apakah kendaraan tersebut milik pejabat pemerintah , militer / Polri atau

milik anggota Polri dan dari database tersebut akan dapat diketahui apabila dipergunakan oleh orang yang tidak berhak atau disalahgunakan oleh oknum anggota Samsat. Kendaraan bermotor yang menggunakan STNK rahasia / khusus dapat diketahui asal usul /riwayat kendaraan bermotor yang mempunyai dokumen resmi atau tidak misalnya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh anggota Polri yang berasal dari kendaraan bermotor barang – bukti akan lebih mudah terdata sehingga suatu saat pemilik kendaraan bermotor tersebut akan mengambil barang – bukti tersebut maka lebih mudah proses penyerahannya karena anggota hanya merawat dan meminjam pakai barang bukti.

G. BPKB / STNK asli dan duplikat.

Database kendaraan bermotor Samsat akan menunjukkan blokir sistem pada layar komputer apabila pemilik kendaraan bermotornya akan terlacak identitas kendaraan yang digunakan untuk meng-cover kendaraan bermotor hasil tindak pidana , Masyarakat akan mengecek terlebih dahulu apabila mau membeli kendaraan bermotor tersebut , sedang dokumen duplikat yang sering terjadi dipergunakan untuk menggandakan identitas kendaraan bermotor dapat diketahui / terlacak dengan sendirinya apabila identitas kendaraan bermotor digandakan .

H. Sumber Daya Manusia (personel).

Kualitas kemampuan personil Samsat yang terdidik dan profesional di bidang registrasi identifikasi akan dapat mendukung tugas – tugas kepolisian dan personil yang di tempatkan di bagian registrasi benar – benar personil yang mempunyai kemampuan / menguasai fungsi registrasi identifikasi secara profesional , mengetahui bentuk format dokumen (form "A" ,"B" dan "C ", faktur) mengidentifikasi NIK/VIN , dokumen lelang , dump TNI / Polri, dokumen mutasi kendaraan bermotor . Personil Samsat secara berkala mengikuti pendidikan kejuruan di bidang registrasi identifikasi .

Pengurangan / karban / karyawan bantuan yang tidak diangkat secara resmi oleh Polda Metro Jaya dan tidak mengganggu mekanisme administrasi di Samsat sehingga aspek *security* / keamanannya dapat dipelihara.

I. Materil / Fasjas.

Pendistribusian materil yang merupakan dokumen di dalam administrasi Samsat dapat dilakukan pengawasan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan pendistribusiannya baik arsip / blangko yang sudah terpakai atau rusak dapat dipertanggungjawabkan oleh personil Samsat dengan berita acara . no urut dokumen baik blangko cek fisik maupun blangko permohonan penerbitan STNK tersebut akan dapat diketahui termasuk juga arsip dokumen blangko STNK yang habis masa berlakunya 5 tahun dapat

diamankan untuk menghindari dipergunakan untuk identitas kendaraan bermotor lain yang dengan menghapus tulisan / huruf dengan zat kimia .

Fasilitas pada database kendaraan bermotor milik Polri akan dapat memonitor perkembangan penambahan jumlah kendaraan menurut merk , jenis , type , cc, silinder , tahun pembuatan dan warna kendaraan bermotor tersebut. Kalau Komputerisasi yang dipergunakan adalah database milik dari Dispenda yang telah diprogram sesuai dengan aspek *prosperity* (ekonomis) dalam perolehan pajak, tetapi databse milik Polri akan menekankan aspek *security* (keamanan) .

J. Sistem dan Metoda.

Database kendaraan bermotor Samsat Polri dapat di akses 24 jam baik untuk kepentingan informasi bagi masyarakat maupun untuk kepentingan mendukung tugas – tugas Polri dan pendataan kendaraan bermotor yang mau didaftarkan akan lebih awal didatakan sehingga mempermudah masyarakat yang akan melakukan perpanjangan / pengesahan penerbitan STNK mekanisme permohonan / pendaftaran pengesahan STNK akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada *first in first out* (FIFO) sehingga antrian wajib pajak yang dibantu dengan sistem kartu antrian akan dapat terlayani dengan cepat .

K. Aspek Hukum.

Di dalam Undang – undang No.2 tahun 2002 ttg Kepolisian negara pada pasal 15 butir(1)J berisi berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional dan pasal 15 butir(2)b berisi berwenang menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan di dalam Kep Men PAN No : 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang standar mutu pelayanan publik, demikian juga di dalam INBERS /03/M/X/1999 nomor 29 tahun 1999, peran Polri di dalam melaksanakan fungsi registrasi dan identifikasi sudah jelas diatur di dalam undang – undang , hal ini merupakan kekuatan bagi Institusi Polri untuk melaksanakan registrasi identifikasi secara benar dan akan mewujudkan pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat. Polri tidak akan tergantung lagi kepada Dispenda untuk memberikan informasi kendaraan bermotor dan kelemahan – kelemahan yang ada di dalam Inbers di perbaiki dan diupayakan dengan memberikan masukan pada rakor dir Lantas dengan Dispenda yang dilaksanakan tiap tahun, contoh : Permasalahan tentang restitusi pajak, denda pajak secara transparan Dispenda harus dapat mempertanggungjawabkan sehingga komplain masyarakat tidak kepada Polri, penyimpangan yang dilakukan oleh staf Dispenda (pada loket khusus dimana perubahan type , cc , silinder dan tahun pembuatan untuk mengurangi pajak kendaraan bermotor dapat diawasi dan dimonitor oleh personil Samsat dari database milik Polri .

L. Akuntabilitas.

Di dalam INPRES RI No : INS/07/VI/1999 tgl 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah, harus diwujudkan oleh Polri di dalam melaksanakan fungsi registrasi dan identifikasi untuk melayani masyarakat yang membutuhkan informasi tentang kendaraan bermotor dan pengungkapan tindak pidana kejahatan kendaraan bermotor sehingga masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum dari informasi tersebut dapat diwujudkan oleh Polri melalui database kendaraan bermotor Samsat. Masyarakat yang telah membayar pajak tiap tahun akan merasakan pelayanan yang diperlukan setiap saat tentang informasi kendaraan bermotor sehingga masyarakat (wajib pajak) suatu waktu akan menuntut kepada Polri tentang pelayanan administrasi Samsat dimana masyarakat sudah tepat waktu membayar pajak kendaraan bermotor dapat di hindari dengan memberikan pelayanan tersebut.

M. Peranan Registrasi dan Identifikasi didalam mendukung Pengungkapan Tindak Pidana kendaraan bermotor.

a. Direktorat lalu lintas.

Banyaknya kasus tabrak lari yang belum terungkap dapat ditekan angka peningkatannya dengan dukungan database kendaraan bermotor Samsat Polda Metro Jaya .Pada database tersebut dapat dilacak apabila

saksi kasus kecelakaan tabrak lari hanya mengetahui warna jenis kendaraan dan no.pol kendaraan tersebut tidak lengkap sehingga akan mempermudah mengidentifikasi dan pengungkapannya . sehingga dengan cepatnya pengungkapan kasus kecelakaan tabrak lari tersebut dapat membantu korban yang meninggal dunia / luka berat untuk pengurusan asuransi jiwa .

Pada aspek yang lain ada bagian kegiatan Dispenda yang dapat diketahui oleh Polri yaitu biaya restitusi pajak (sisa pajak) dari wajib pajak dan denda pajak melalui database kendaraan bermotor milik Polri .

Dalam pengungkapan tindak pidana, pemblokiran kendaraan sangat membantu masyarakat dalam mengantisipasi lolosnya perpanjangan STNK yang didapatkan dari kendaraan hasil curian dapat dicegah dengan adanya online sistem dari Polsek / Polres.

b. Direktorat Reserse kriminal.

Kasus-kasus pencurian yang belum terungkap dapat ditekan dan diungkap melalui database tersebut dengan menghimbau kepada masyarakat untuk memblokir kendaraannya yang telah dicuri atau memberikan informasi bahwa secara otomatis Polri telah melakukan pemblokiran berdasarkan laporan Polisi tentang kehilangan / pencurian kendaraan bermotor , dari data blokir pencurian kendaraan bermotor sekitar 7.192 yang melakukan blokir sedangkan data yang dihimpun oleh

Biro Operasi Polda Metro Jaya dari data 3 tahun terakhir sekitar 40.000 pencurian kendaraan bermotor yang terjadi dapat diwujudkan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dengan melakukan tindakan yang nyata dalam membangun kepercayaan kepada masyarakat .

Adanya on-line sistem antar Polsek dan Polres dengan direktorat lalu-lintas khususnya Samsat akan mempermudah pemblokiran kendaraan bermotor yang telah dicuri dalam tempo waktu 24 jam.

Dengan perbaikan sistem pada database kendaraan bermotor maka dapat terfilekan, apakah kendaraan tersebut sudah diblokir karena pencurian atau sudah dimutasikan, bahkan akan terdata pula, apakah pernah melanggar, mengalami kecelakaan dan sebagainya, sehingga petugas Samsat tidak kesulitan dalam memberikan informasi kepada direktorat atau fungsi terkait lainnya.

Peningkatan pelayanan ini akan sangat dirasakan pula oleh masyarakat, karena pada proses blokir, misalnya ketika masyarakat melapor, maka data kendaraan tersebut langsung terblokir seketika itu juga, pada saat si-pelapor membuat laporan kehilangan. Kasus – kasus lain adalah kasus perdata yang sering mengajukan komplain dengan diblokirnya kendaraannya oleh salah satu keluarga tanpa ijin pemilik.

Sosialisasi kepada masyarakat permohonan untuk memblokir atau membuka blokir diajukan melalui Polres / Polsek bukan Dispenda. Kasus – kasus Tindak Pidana Penggelapan / Penipuan yang sering terjadi

misalnya : Tindak pidana yang dilakukan oleh manajemen PT. Qsar ,dimana banyak aset dari PT. Qsar yaitu kendaraan bermotor yang bukan nama dari PT. Qsar tersebut melainkan nama pemiliknya perorangan dengan database kendaraan bermotor dalam waktu yang singkat akan dapat terlacak pemilik aslinya dan dapat segera dilakukan penyitaan terhadap barang – bukti tersebut .

Beberapa contoh kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yang juga merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah penyelundupan kendaraan built up yang terjadi beberapa waktu lalu tanpa membayar bea masuk kepada negara dengan menyalahgunakan fasilitas kedutaan atau badan internasional (PP 8 /th 1955 dan PP 19/th 1957) dengan menggunakan proyek fiktif tidak dapat diketahui secara cepat karena Polri tidak monitor data kendaraan yang masuk melalui Ke Pabeanan.

Kasus yang lain yang merupakan kejahatan kendaraan bermotor yang sering terjadi adalah yang terkait dengan proses lelang, hibah atau dump, dimana dapat terjadi bahwa kendaraan yang diselundupkan dikatakan sebagai barang temuan tanpa adanya tersangka atau pemilik kendaraan tersebut. Namun setelah dilakukan lelang, kemungkinan pemenang lelang justru merupakan pemilik kendaraan atau pelaku yang menyelundupkan kendaraan tersebut , maka dengan adanya database kendaraan bermotor yang online sistem dengan instansi terkait (Bea cukai , Deperindak,

Kejaksaan dan pengadilan) dapat mengantisipasi atau mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok sindikat.

c. Direktorat Intelkam.

Peran intelijen di dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kelompok – kelompok LSM , Ormas , Parpol yang bermasalah dengan adanya database kendaraan bermotor maka akan lebih memudahkan untuk mendapatkan identitas atau alamat pemilik kendaraan bermotor tersebut tanpa harus menyentuh sasaran , database kendaraan bermotor Samsat dapat di akses dengan online sistem antardirektorat untuk mendapatkan data kendaraan dengan pasword yang diberikan misalnya penerbitan STNK rahasia / khusus direktorat intelkam memberikan rekomendasi setelah itu Samsat yang memprosesnya , dari database dapat dimonitor penerbitan STNK rahasia / khusus tersebut .

d. Direktorat Pengamanan Obyek Vital.

Direktorat Pengamanan Obyek Vital dapat mengakses database kendaraan bemotor Samsat dengan online sistem antardirektorat , data kendaraan orang asing yang bekerja di staf kedutaan negara asing , konsulat , diplomat dan kantor perwakilan negara asing dapat diketahui dengan cepat dan mudah untuk memberikan pengamanan dan pengawalan apabila diperlukan , patroli personil (Ditpamobvit) akan

monitor melalui radio komunikasi dan akan mendapatkan data kendaraan yang diperlukan misalnya orang asing mengharapkan pengamanan dan pengawalan maka dapat diberikan pelayanan dengan cepat serta pengamanan obyek – obyek vital yang ada di wilayah Polda Metro Jaya , Data kendaraan bermotor milik kedutaan , kantor – kantor perwakilan negara asing , konsulat dan diplomat , didatakan dalam database Samsat secara komputerisasi maka apabila diperlukan file atau data kendaraan bermotor tersebut akan didapatkan dengan waktu yang singkat .

e. Polres / Polsek.

Polres dan Polsek didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa menerima laporan kejadian pencurian kendaraan bermotor dengan online sistem pada database kendaraan bermotor di Samsat Polda Metro Jaya maka begitu anggota Polres dan Polsek mengetik laporan pencurian tersebut dan langsung dikirimkan melalui kawat elektronik dengan fasilitas *dial phone* maka sudah masuk dalam database kendaraan bermotor dalam kondisi terblokir pada saat itu dan masyarakat / pelapor tinggal menyerahkan administrasi surat permohonan blokir kepada Samsat besoknya dengan demikian kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat dipenuhi dengan cepat dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Adapun keseluruhan data tersebut dapat dikembangkan dalam keterpaduan antara direktorat lalu lintas dan direktorat lainnya seperti

direktorat reskrim, intel, obyek vital dan lainnya dari tingkat Polsek hingga Polres. Tentunya, keterpaduan database kendaraan bermotor tersebut selain akan membantu Polri dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana khususnya yang menggunakan kendaraan bermotor, juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Polri.

Dengan membangun kepercayaan kepada masyarakat diharapkan dapat merubah image atau anggapan masyarakat tentang eksistensi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

N. Peran registrasi identifikasi di dalam keterpaduan kerjasama dengan instansi terkait .

Berdasarkan beberapa kejadian tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan sistem informasi database kendaraan bermotor secara integral, dapat mempermudah penyelidikan dan penyidikan petugas melalui nomor mesin dan nomor chasis serta spesifikasi lain dari kendaraan yang digunakan.

Hal tersebut dapat dikembangkan melalui alamat dengan pendataan KTP yang benar. Tentunya hal itu kemudian akan berimplikasi pada perlunya sistem komputerisasi secara on-line pula dengan pemerintah daerah setempat, hal ini seimbang dengan kebijakan pemerintah daerah yang mengembangkan data kependudukan dan sidik jari .

Selain itu, data tentang KIR dari DLLAJ dapat pula dikembangkan dengan data kendaraan bermotor Samsat untuk mendukung atau melengkapi data

kendaraan bermotor Samsat dalam pengungkapan tindak pidana lewat potongan nomor KIR terutama jika kendaraan yang dipergunakan adalah kendaraan angkutan kota atau sejenis L300 yang menggunakan plat nomor kuning (misalnya pada kasus ledakan bom Bali).

Pada kasus *money laundering*, database kendaraan bermotor juga akan mempermudah upaya penyelidikan dengan melacak setiap kendaraan yang dibeli dari uang hasil kejahatan. Beberapa data hasil penyelidikan dan penyidikan menunjukkan, sering terjadi pemalsuan KTP atau menggunakan KTP milik orang lain untuk menutupi aset kekayaan seseorang agar terhindar dari pajak pribadi dan menutupi uang dari hasil korupsi. Melalui sistem komputerisasi yang integral dengan Pemda dalam hal pencatatan identitas pada KTP, maka hal itu dapat dihindari.

Guna meminimalisir modus kejahatan, maka sistem database kendaraan bermotor yang ada di Polri (Samsat Polda Metro Jaya) harus on-line dengan database kantor bea dan cukai serta instansi terkait lainnya seperti Departemen Perdagangan dan Perindustrian maupun Dirjen Perhubungan Darat, agar peluang sekecil apapun dapat dicegah. Contoh data formulir "A" yang ada pada bea cukai harus masuk terlebih dahulu ke database kendaraan bermotor Polri sehingga pada proses awal masuk, mulai dari pemeriksaan cek fisik kendaraan tersebut. Dengan demikian, nomor formulir "A" yang tidak terdata, dengan sendirinya akan ditolak oleh komputer jika data kendaraan tersebut dimasukkan .

Pembuatan sistem database kendaraan bermotor secara on-line ini tidak hanya di wilayah DKI dan sekitarnya saja, melainkan juga di seluruh Indonesia sehingga di semua wilayah dapat dilakukan pengecekan dan penelitian dokumen dengan mudah, cepat dan akurat. Tentunya juga dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dalam menjalankan sistem tersebut, antara lain dengan menggunakan password atau kode akses tertentu untuk menjalankan sistem tersebut. Dengan demikian eksistensi Polri dalam mewujudkan *"One Stop Services Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor"* bukan hal yang tidak mungkin dapat diwujudkan bahkan citra Polri terangkat melalui penataan / penyempurnaan kembali Database Kendaraan Bermotor ini .

Contoh sistem informasi data ranmor terpadu dengan instansi terkait :



SISTEM INFORMASI DATA RANMOR TERPADU





BAB VI

BAB VI
STRATEGI PEMBENAHAN DATABASE KENDARAAN BERMOTOR DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA DI POLDA METRO JAYA

A. Strategi Pembenahan Database Kendaraan Bermotor.

Pembenahan Database Kendaraan Bermotor Samsat Polda Metro Jaya sangat dibutuhkan untuk kualitas pelayanan Polri yang mempunyai kekuatan hukum dan perwujudan dari pada akuntabilitas kepada masyarakat .Database kendaraan bermotor dapat mendukung tugas – tugas Kepolisian di dalam pengungkapan tindak pidana di wilayah hukum Polda Metro Jaya khususnya membantu pengungkapan aksi terorisme yang menggunakan sarana mobilitas dalam melakukan tindakan terorisme. Strategi merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan organisasi , dalam jangka waktu yang panjang dengan mendayagunakan seluruh kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut dan memanfaatkan secara tepat dengan menggunakan pendekatan manajemen dalam mencapai tujuan yang diharapkan .

B. Strategi Pentahapan.

1. Jangka Pendek (1 tahun – 2 tahun).

- a. Database kendaraan bermotor segera dibuat dengan pentahapan pada tiap Samsat , untuk mengantisipasi perkembangan penambahan jumlah kendaraan bermotor di wilayah Polda Metro Jaya, pembuatannya tidak perlu menggunakan peralatan komputer

yang ber merk , tetapi dengan peralatan komputer yang murah yang dapat dibiayai dengan anggaran swadaya .

- b. Penyiapan sumber daya manusia dengan pelatihan yang tidak memerlukan waktu yang lama , dengan rekrutmen personil Samsat yang mempunyai basic komputer.
- c. Data kendaraan bermotor pada database KPTI Dispenda di copy untuk dijadikan data awal bagi database Polri yang pada pelaksanaan selanjutnya melengkapi entry-data yang belum teridentifikasi pada database milik Dispenda .
- d. Memberikan pemahaman kepada Kepala Satuan Operasional tentang pentingnya database kendaraan bermotor ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tentang informasi kendaraan bermotor dan mendukung tugas – tugas kepolisian tentang pengungkapan tindak pidana.
- e. Kelemahan – kelemahan yang prinsip pada mekanisme penerbitan STNK sebelum database terwujud di pecahkan melalui tersebut dengan menempuh upaya pengawasan yang lebih ketat dengan memperbaiki mekanisme penerbitan STNK melalui koordinasi dengan Dispenda.
- f. Sosialisasi kepada internal Polda Metro Jaya dan masyarakat untuk mendukung program database kendaraan bermotor serta pentingnya

informasi Registrasi Identifikasi kendaraan bermotor untuk masyarakat dan institusi Polri .

- g. Melakukan kerjasama (MoU) dengan PT. Telkom untuk membuka peluang mendukung program database tersebut dikarenakan fasilitas yang akan dipergunakan dengan *dial-phone* merupakan cara yang paling sederhana untuk mengirimkan data kendaraan bermotor.
- h. Menginventarisir secara akurat jumlah kendaraan bermotor di wilayah Polda Metro Jaya , mutasi kendaraan bermotor baik yang masuk dan ke luar daerah untuk dilakukan analisa dalam memperhitungkan perkembangan jumlah kendaraan bermotor jangka waktu 1- 5 tahun.
- i. Membenahi sistem koordinasi antar direktorat dengan peran registrasi identifikasi dalam membantu pengungkapan tindak pidana.
- j. Menyiapkan *hardware dan software* di dalam pembuatan database kendaraan bermotor dan untuk tahap pertama dihubungkan dengan lingkungan Samsat di Polda Metro Jaya. Kemudian melakukan pembenahan Samsat yang lain untuk penyempurnaan database kendaraan bermotor yang dikelola oleh Dispenda .
- k. Melakukan pembenahan data kendaraan bermotor sesuai aplikasi program yang dibuat dengan melakukan entry data pada waktu wajib pajak / masyarakat melakukan pengesahan atau pendaftaran

kendaraan bermotor baru (untuk membenahan data kendaraan memerlukan waktu 1 tahun).

- I. Memaparkan pada waktu rakor dirlantas dan Dispenda seluruh Indonesia untuk mengetahui tanggapan dari program database kendaraan bermotor.

2. Jangka Sedang (2 tahun – 3 tahun).

- a. Mengembangkan konsep program database kendaraan bermotor melalui pembuatan telaahan staf yang diajukan kepada institusi Polri untuk mendapatkan dukungan anggaran .
- b. Membuat wadah koordinasi dengan instansi terkait (Bea Cukai, Deperindak, Kejaksaan ,Pengadilan dan sucofindo) untuk mengantisipasi adanya tindak pidana pemalsuan dokumen , penyelundupan , sebelum online – sistem antar instansi terkait terwujud.
- c. Mengadakan sosialisasi kepada masing – masing instansi terkait tentang database kendaraan bermotor Samsat Polda Metro Jaya.
- d. Mengadakan seminar tentang teknologi informasi mengenai database kendaraan bermotor dengan melibatkan pakar – pakar teknologi , kriminologi dan pejabat Polri yang mempunyai visi , misi pembangunan institusi Polri.

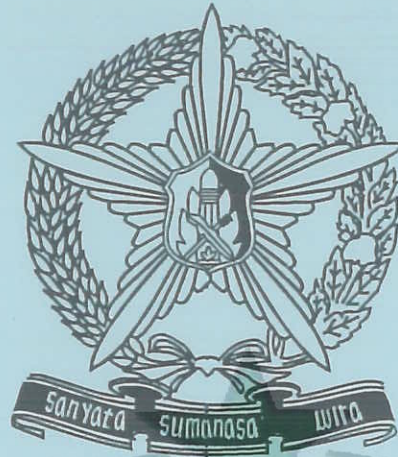
- e. Mengevaluasi perkembangan pembuatan database kendaraan bermotor dengan monitor situasi di masyarakat karena dimungkinkan pelaku – pelaku tindak pidana kendaraan bermotor tidak setuju dengan program database tersebut. Selain daripada itu Polri perlu secara gencar melakukan sosialisasi dengan membangun opini publik melalui media massa.
- f. Melobby Pemda DKI Jakarta dan DPRD untuk pembuatan program database kendaraan bermotor dimasukkan kedalam APBD .
- g. Memberi tambahan pengetahuan secara berkala tentang program database kendaraan bermotor sehingga pasword dan nomor login harus segera dirubah guna menghindari pencurian data.
- h. Mengembangkan program database kendaraan bermotor yang dapat diakses melalui SMS dan MMS untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan informasi untuk kepentingan jual beli kendaraan bermotor agar dapat terhindar dari penipuan atau penggelapan .
- i. Menyiapkan pengembangan online sistem dengan antardirektorat di polda Metro Jaya sehingga sinergisasi dalam pelaksanaan tugas dapat maksimal dan bermanfaat untuk pengungkapan tindak pidana.
- j. Data kendaraan bermotor baik data kendaraan kedutaan maupun data STNK rahasia dan STNK khusus dapat terdata dengan baik sehingga mudah pengidentifikasiannya serta memperkecil ruang

gerak penyimpangan personel Samsat untuk menerbitkan STNK tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku.

3. Jangka Panjang (3 tahun – 5 tahun).

- a. Mengembangkan program database untuk seluruh Samsat se Indonesia dengan menggunakan fasilitas *dial phone* atau *Vsat* (fasilitas satelit yang dipergunakan pada SIM).
- b. Samsat seluruh Indonesia dapat online sistem melalui program database kendaraan bermotor.
- c. Database seluruh instansi terkait Bea Cukai , Deperindak , Kejaksaan atau Pengadilan dapat dilaksanakan melalui online sistem .
- d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan optimal dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- e. Perlu dilakukan upaya lanjutan untuk semakin memantapkan implementasi database kendaraan bermotor secara terprogram dan terpadu dengan instansi terkait.
- f. Meningkatkan penegakan hukum secara tegas dan bertanggung jawab (profesional) ke dalam maupun ke luar (masyarakat) terhadap para pelanggar hukum dengan terus menerus mengawasi anggota Samsat agar tidak melakukan penyimpangan.

- g. Melakukan kerjasama AIPO melalui Interpol dengan memberikan informasi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan di negara-negara ASEAN.
- h. Menata kembali mekanisme pembinaan pelayanan administrasi Samsat agar diperoleh suatu sistem pelayanan yang tepat mudah terhindar adanya praktek KKN dan percaloan serta memberikan peluang kepada para konsumen yang sibuk dalam pekerjaannya (contoh pembayaran pajak melalui bank).
- i. Terwujudnya pertanggung jawaban/akuntabilitas Polri kepada masyarakat tentang pelayanan melalui database kendaraan bermotor dengan memberikan kepastian hukum terhadap informasi kendaraan bermotor.
- j. Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional personil Samsat yang menguasai di bidang Registrasi Identifikasi sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- k. Terwujudnya kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak kepada Polri, yang dapat merasakan perlindungan terhadap sindikat / kelompok pencurian kendaraan bermotor sehingga kemungkinan adanya pemalsuan dokumen dapat dihindari kemungkinannya.



BAB VII

BAB VII

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Database kendaraan bermotor yang akan diterapkan di Samsat Polda Metro Jaya sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Database kendaraan bermotor ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tentang informasi kendaraan bermotor dan dapat membantu mengungkap tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kendaraan bermotor .
- b. Kelemahan pada sistem database yang dikelola oleh Dispenda yang ada sekarang ini tidak dapat berfungsi sebagai registrasi identifikasi dan mendukung tugas-tugas kepolisian dalam antisipasi untuk membantu tugas direktorat researse, intelijen dan direktorat operasional Kepolisian lainnya, tidak sepenuhnya dapat membantu secara maksimal. Untuk itu sistem database yang ada harus segera diperbaiki dan disempurnakan dengan sistem database yang dapat memerankan fungsi registrasi identifikasi dengan baik.
- c. Peningkatan kemampuan personel Samsat dalam melaksanakan registrasi identifikasi memberikan kontribusi terhadap profesionalisme Polri dalam memberikan pelayanan , pengayom dan perlindungan terhadap masyarakat.

- d. Dapat memenuhi kebutuhan informasi kendaraan bermotor secara cepat, akurat dan lengkap tentang kendaraan bermotor terhadap kepentingan masyarakat, pemilik kendaraan bermotor, produsen, importir, distributor serta kepentingan penyelidikan dan penyidikan.
- e. Terwujudnya proses pelayanan administrasi Samsat tentang data kendaraan bermotor yang memiliki kekuatan hukum terhadap keakuratan identitas kendaraan bermotor, kepastian hukum tentang keabsahan dari dokumen maupun persyaratan administrasi kendaraan serta keamanan bagi pemilik kendaraan bermotor dan pemilik akan merasa terlindungi dari pemalsuan dokumen kendaraan bermotor yang dimiliki.

2. Rekomendasi.

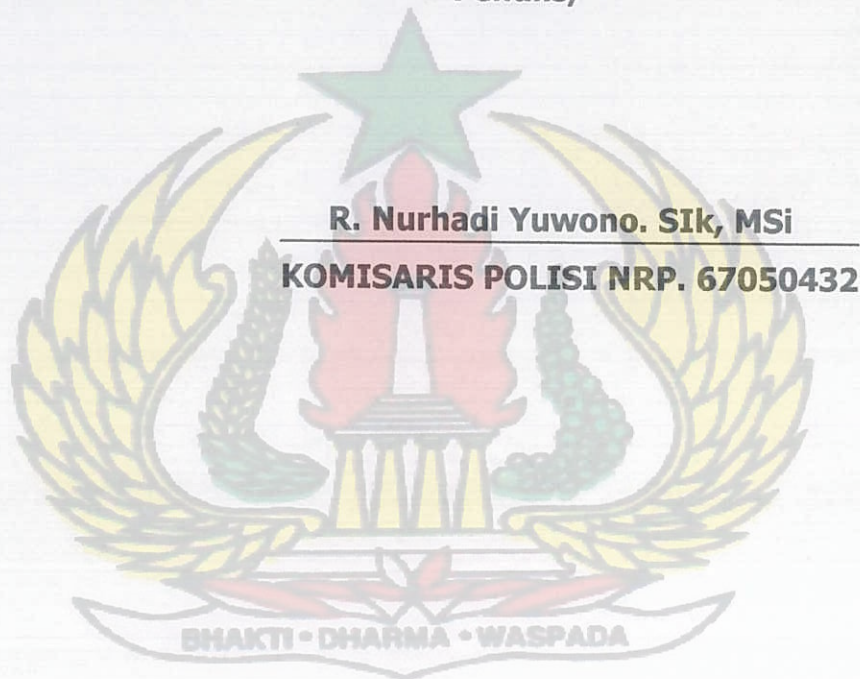
- a. Segera membangun Database kendaraan bermotor Samsat secara online, terintegrasi dan terpusat dalam skala nasional untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan , pengayom dan perlindungan serta penegakan hukum.
- b. Segera melakukan evaluasi dalam pengintegrasian Sistem Informasi fungsi-fungsi Kepolisian lainnya seperti Sistem-informasi Pengawasan Orang Asing, Sis-info Pengawasan Senjata, Sis-info Pengawasan Bahan Peledak, Sis-info Sidik Jari, Sis-info Krirnalitas, Sis-info identity Kit (pembuatan sketsa wajah), Sistem informasi Personel, Sistem

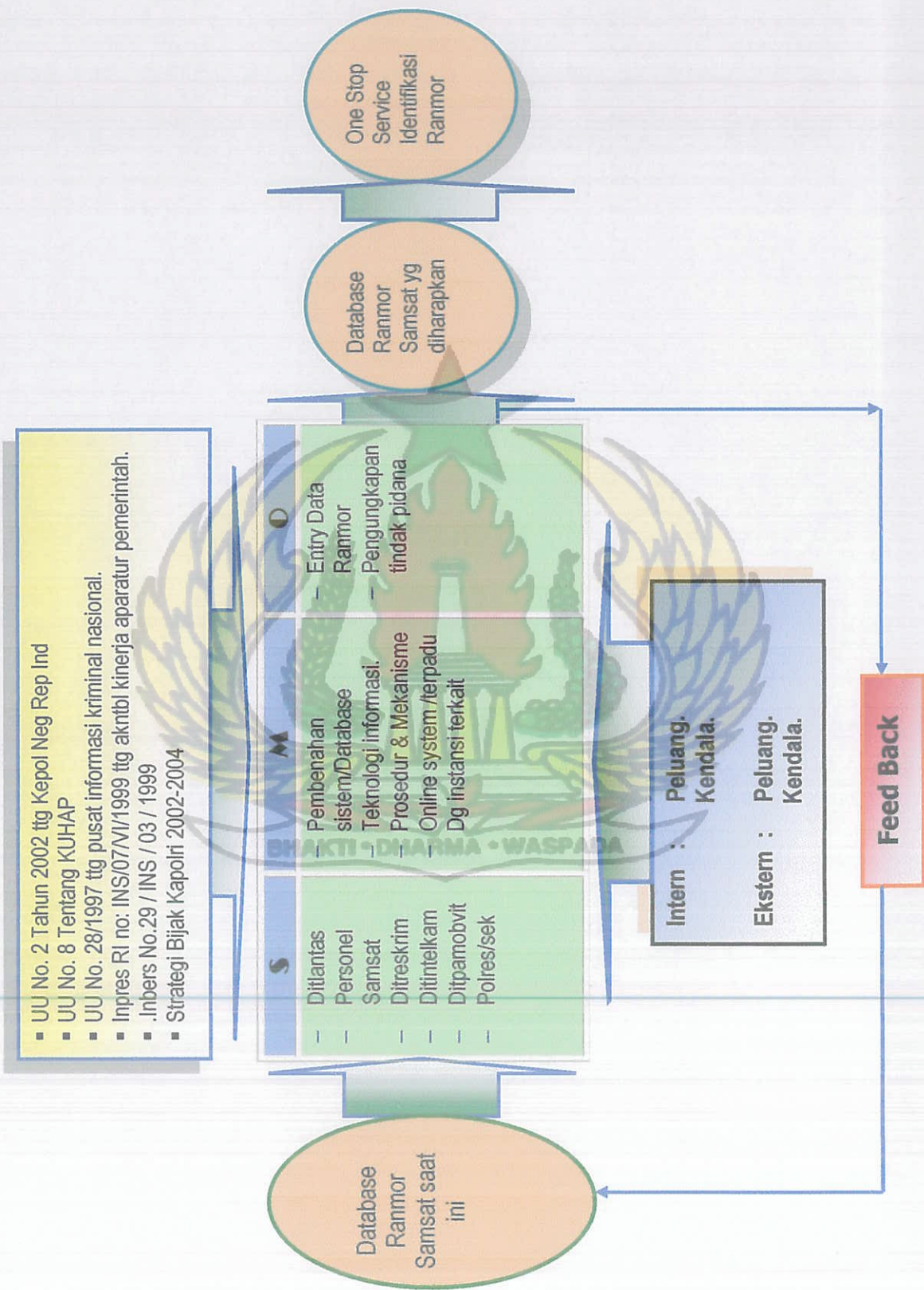
informasi Logistik untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri dalam penegakan hukum.

- c. Bahwa Polri sudah saatnya memberikan pelayanan masyarakat dengan berbasis Teknologi Informasi sejalan dengan modernisasi Polri memenuhi tuntutan serta harapan masyarakat.

Lembang, September 2004

Penulis,





STRATEGI PEMBENAHAN DATABASE KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA

DI POLDA METRO JAYA

ALUR PIKIR

Latar Belakang

- Polri blm Profesional.
- Direkt Lnts melaks fgs reg ident dg tehlogi manaj info sist.
- Dispenda kelola pik pd aspek prosperity.
- Aspek security blm sentuh.
- Polri terkendala dlm beri info ranmor.

POLRI

Permasalahan

Bgmn Strategi pembenahan database kendaraan bermotor dlm pengungkapan tindak pidana di Polda Metro Jaya?

Database samsat saat ini

Strength	Weakness
UU No.2th2002 . KepMen PAN :63/kep/m.pam/7/03. Bijak strategi kapolri.	Kualitas Sdm. Database dikelola dispenda. Bim terwjd kpastian hkrn. Krg adanya akuntabi.
Opportunities	Threats
Tumbuhnya parmas thd kinerja Polri. Database dpt memenhi kebut masy dlm dptkn info ranmor.	Globalisasi dampak krim kat. Sdm memerikn wkt dlm kat puan. Dispenda krg kung thd database.
Kelemahan	Pembenahan

Database samsat yg dlhrpkan

S T R A T E G I

Kadek
Kadang
Kajang

Database bermanfaat untk TP

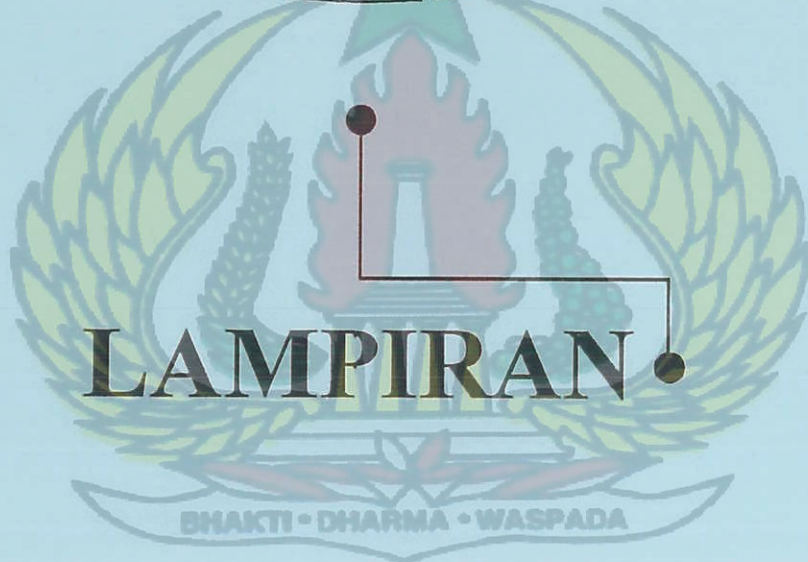
DAFTAR PUSTAKA

1. UU No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan.
2. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
3. Kep Men PAN No : 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang standar mutu pelayanan publik.
4. INPRES RI No : INS/07/VI/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.
5. INBERS No :24/INS/03/M/X/1999. Tentang pelaksanaan SAMSAT
6. Strategi bijak Kapolri 2002 – 2004 tentang Visi dan Misi.
7. Action Plan Kapolda Metro Jaya.
8. David Gordon B, *Management Informasi System*, di-Indonesia oleh Onong UE, Mandar Maju, Bandung, 1996.
9. Nainggolan Partogi Potlak, *terorisme dan Tata Dunia Baru*, P3I DPR RI, Jakarta, 2002.
10. Suharto, *Microsoft Acces*, Widyaloka, Jakarta, 1995.
11. Terry George R, *Principles Of Management*, Alumni, Bandung, 1979.
12. Kaufan, *Peningkatan Pelayanan Masyarakat*, seminar Polri, Jakarta, 1993.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- N a m a : R. Nurhadi Yuwono, S.IK, M.Si.
- Tempat / Tgl. Lahir : Malang, 15 Mei 1967.
- Pendidikan :
- Umum : - SMA I Malang, Lulus 1985
- Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, lulus 2002.
- Kepolisian : - Akademi Kepolisian, Lulus 1989 .
- PTIK, Lulus 2000.
- Lanpa Dikmas Lantas, Lulus 1991.
- Sussarpa Intel Strat ABRI, Lulus 1997.
- Post Blast Investigations Louisiana State Police Academy USA, Lulus 2001.
- Penugasan : - Paur Ops Sat Pol Air Polda Riau.
- Kaur Ops Sat Pol Air Polda Riau.
- Wakasat Lantas Polres Bengkalis.
- Kasat Lantas Polres Bengkalis.
- Kasat Lantas Polres Kampar.
- Kasat Lantas Polres Kepri Timur.
- Ka Korsis SPN Pekanbaru.
- Kasubbag Bin Ops Subdit Intelkrim Dit Intel Pam Polri (Mabes Polri).
- Kanit II Pammasbang Dit IPP Polda Metro Jaya.
- Kapolsek Metro Gambir Polres Jakarta Pusat.
- Kasi STNK Polda Metro Jaya.



LAMPIRAN

BHAKTI • DHARMA • WASPADA

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
DIREKTORAT LALU LINTAS
Jl. Jend. Sudirman No. 55, Jakarta Selatan

*Belum finish Bu
B3M
dari user ke Romi
Lufan*

*17/ 32/P/IX/03/STNK
21-09-2002*

LEMBAR - DISPOSISI

AGENDA NO. POL : **B/586/IX/03/STNK**

TANGGAL : **15/9/03**

DARI

PERJALANAN

*Pemberitahuan pert
kend. bermotor*

TANGGAL

A/H PT. BAUER PRA

DIKIRIM KE

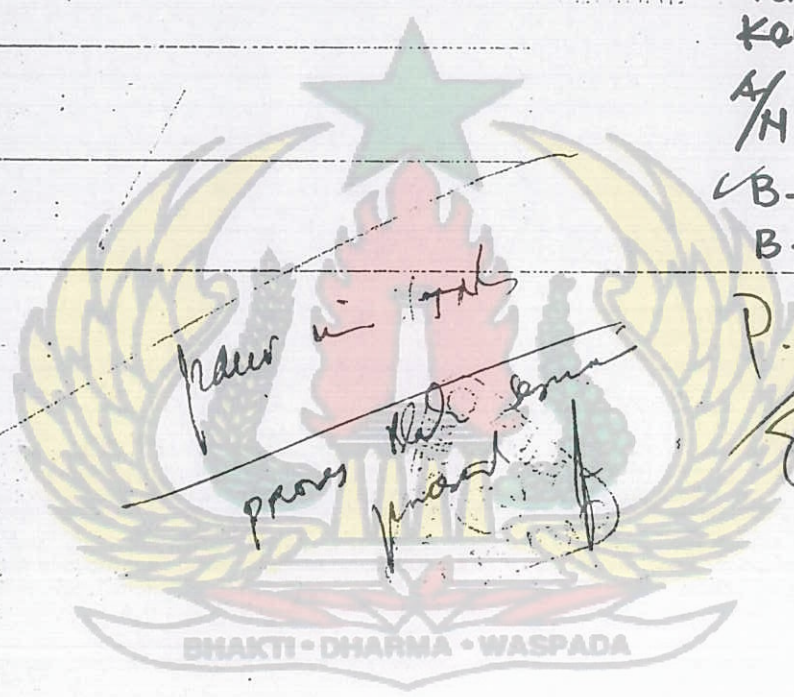
B-1947 - X

B-1652 - RB

DISPOSISI

11/9/03

*110
111*



*Bauer in tank
proses klaim
pemeriksaan*

*P. Kusno
87 Panin
S. Blabg*

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

✓

LEMBAR DISPOSISI

AGENDA NO. POL. : B/1697 NN/03/R1 : TANGGAL : 4. 8. 2003.

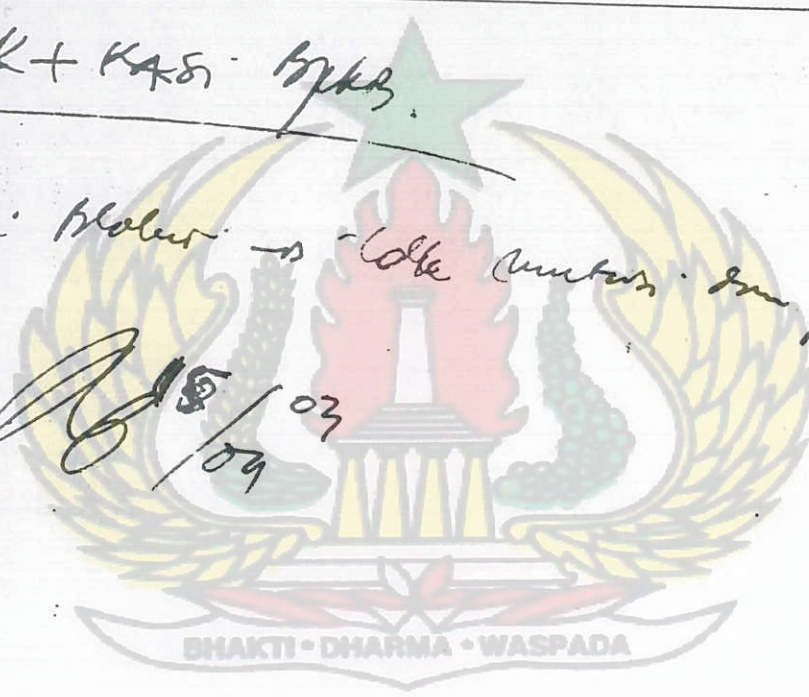
DARI : PERIHAL : Pemberitahuan Pen
TANGGAL : taan Ranmor (Barang)

DIKIRIM KE : KASUBDIT REG IDENT

KASISITAK + KASISIPKAS

Atensi: Malar -> Cate Amutan dan Jendal Tanjung

15/03/04



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH VII DJP JAKARTA RAYA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING LIMA

Jl. Menara Sate Lantai 9-10
Jl. MT. Haryono Kavling 29-30 Jakarta Selatan 127
Homepage DJP: <http://www.pajak.go.id>

Telepon : (021) 79186483-85
Faksimili : (021) 79186487
E-mail : kpp_pmalina@centrin.net.id

Nomor : S-1991/WPJ.07/KP.0608/2003
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Pemberitahuan Penyitaan Kendaraan Bermotor
dan PT Bauer Pratama Indonesia

30 Juli 2003

Yth. Kapolda Metro Jaya
U.p. Kaditlantas
Jalan Gatot Subroto
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2003 atas harta bergerak milik Penanggung Pajak PT Bauer Pratama Indonesia NPWP: 01.070.648.9-058.000, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, dengan ini disampaikan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BAS-30/WPJ.07/KP.0608/2003 tanggal 22 Juli 2003, dengan obyek sita berupa kendaraan bermotor yaitu:
 - ✓ Satu buah Sedan Suzuki Baleno warna hitam dengan nomor polisi B 1947 X tahun pembuatan 1997, nomor rangka MHDESYAIGND-102582, nomor mesin G16B-ID-602582.
 - Satu buah Minibus Toyota Kijang warna biru metalik dengan nomor polisi B 1652 RB tahun pembuatan 1994, nomor rangka MHF21KF4001162299, nomor mesin SK-9220900.Terlampir disampaikan pula copy STNK dan BPKB kedua kendaraan tersebut diatas.
2. Dimohon bantuan Saudara agar kedua kendaraan bermotor tersebut diatas tidak diproses apabila pemilikinya melakukan pemindahtanganan / balik nama ke pihak ketiga sampai dengan tunggakan pajaknya dilunasi.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



Drs. Didik Budi Waluyo, M. Bus.
NIP 060068510

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

NOMOR: BAS-30/KP.07/KP.0603/2003

Pada hari ini Selasa tanggal 22 bulan Juli tahun 2003, atas kekuatan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor 39/WPJ.07/KP.0603/2003 tanggal 16 Juli 2003 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini memilih domisili di kantornya di Kantor Pelayanan Pajak Ditjen Pajak No. 79/KP-07/2003 tanggal 21-30 berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal 20/07/2003 Nomor 310 yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut di bawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak tersebut, bertempat tinggal di dengan dibantu 2 (dua) orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu:

- 1 pekerjaan
- 2 pekerjaan

telah datang di rumah tempat kegiatan usaha/perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama PT. Easar Pratama Indonesia
 NPWP 01.171.142.9-055.000
 Alamat Jalan Cikupa KM 6 Cidua Ekar
 RT 01/ RW 02 Desa Cidua Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak sebagaimana tersebut di bawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding ³⁾	Jumlah tunggakan pajak (Rp)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

- Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita adalah sebagai berikut:

I. Jenis barang bergerak : Terletak di : Taksiran harga :

 Rp.
 Jilid + Surat berharga B-1947X K 60E B-206 Rp.
 21 volume ... C-1 52 K 60E B 206 Rp.

 Rp.

II. Jenis barang bergerak : Terletak di : Taksiran harga :

 Rp.

 Rp.

 Rp.

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
DIRTEKTORAT LALU LINTAS

ENV: B/14/P/14/03/S70-11C

29.04.2003

LEMBAR DISPOSISI

Jan. 29 04 2003

AGENDA NO. POL. : B/747/14/03/RI : TANGGAL : 16.4.2004

DARI :

PERihal :

Permintaan Pem.

Kiran Ranmor B.906

TANGGAL :

DIKIRIM KE :

KASUBDITIPOL - DI.

Kasi SMLK + Kasi B.906

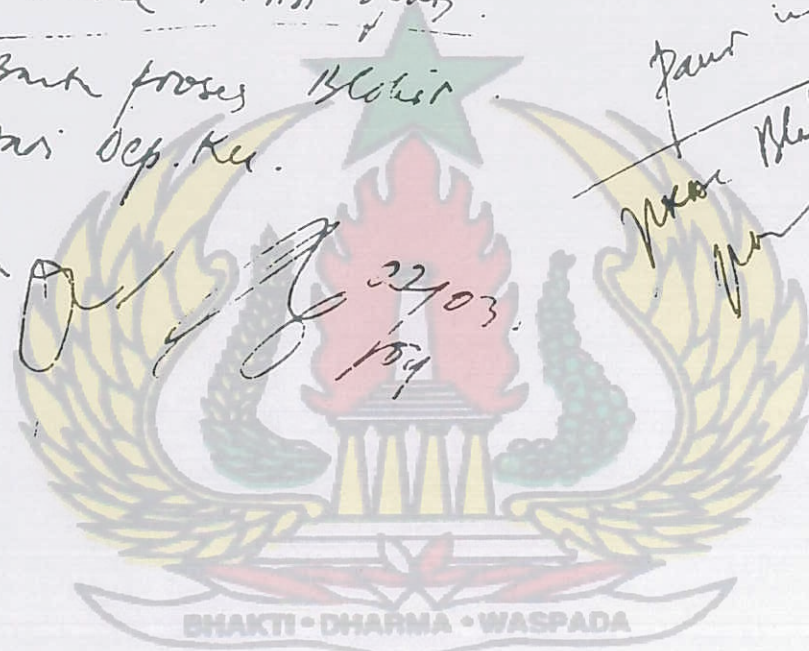
Bantu proses Blahit

Baris Dep. Ke.

Paur in soal

Masa Blahit

12/06/03 Blahit



BHAKTI • DHARMA • WASPADA

29
F. Kusno

Blahit

22/03
104

14

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH I DJPLN MEDAN
KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA PADANG

Jl. Nipah No.52 Padang
Kode Pos 25118

Telp. 0751 - 2829
Faks. 0751 - 2130

Nomor : S. 416/WPL.01/KP.0603/2003
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Pemblokiran.

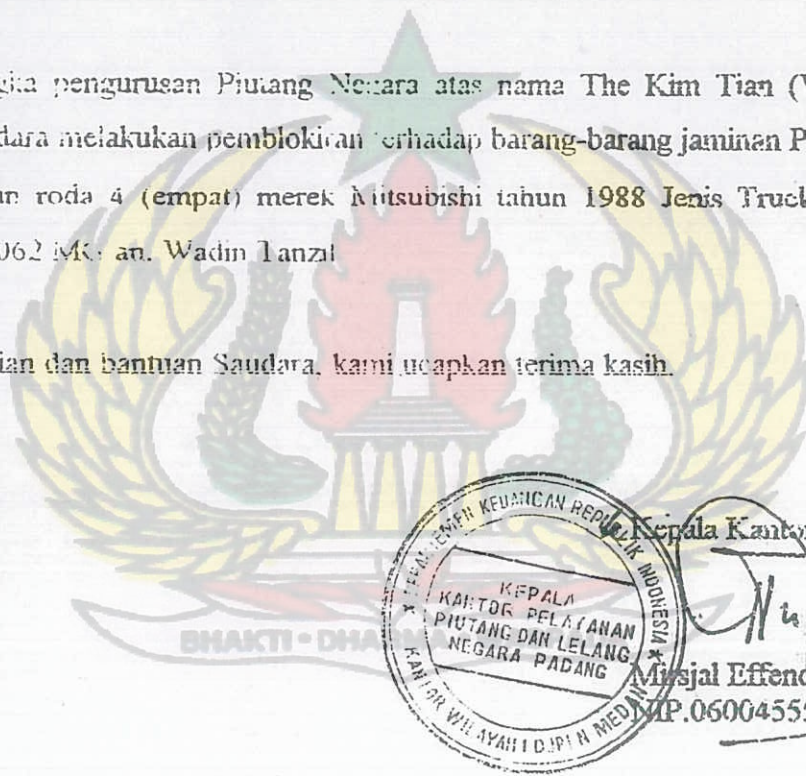
07 APR 2003

Yth. Kadit Lantas Polda Metro Jaya C.p. Kabag Reg. Ident. Lantas
Di Jakarta

Dalam rangka pengurusan Piutang Negara atas nama The Kim Tian (Welly) , dengan ini kami
minta bantuan Saudara melakukan pemblokiran terhadap barang-barang jaminan Penanggung Hutang:

- Sebuah kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi tahun 1988 Jenis Truck BPKB No. 8198884
nomor polisi B 9062 MK an. Wadin Tanzil

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. BPD Sumbar Cabang Utama Padang;
2. Kasi Informasi dan Hukum;
3. Kasi Piutang Negara;
4. Kasi Pengelolaan Barang Jaminan.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
Jl. Soekarno Hatta No. 748 Bandung

Sukabumi, 29 Agustus

No. Pol. : B/ 20 /VIII/2002/Dit Serse
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pemblokiran
Surat-surat kendaraan
R-4.

Kepada

1. KEPALA POLISI DAERAH
DAERAH METRO JAYA

di

J a k a r t a

U.p Kadit Lintas.

1. Dasar Laporan Polisi No. Pol. : L.P/R/394/VIII/02 Ptm, tanggal 19 Agustus 2002, tentang telah terdinya tindak Pidana Perbuatan dan atau Penid sebagaimana dimaksud dalam Pasal UU No. 48 Pasal Tahun 1998, Pasal 374, 375 KUHPidana.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersan ini dimohon agar KA dapat kiranya melakukan pemblokiran terhadap Surat-surat Kendaraan Bermotor Empat (R-4) No. Pol. (Terlampir).
3. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon kabar

AN. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
KEPALA DIREKTORAT RESERSE
U.S
B E S I T
SELAKU PENYIDIK

Charles
Drs. CHARLES MARPAUNG
A.K.B.P. NRP 56050642

Tembusan :

1. Kapolda Metro Jaya.
2. Kapolda Jabar.
3. Irpolda Jabar.
4. Kadit IPP Polda Jabar.

**DATA KENDARAAN BERMOTOR
MELALUI PENCARIAN NAMA PEMILIK : AKBAR TANJUNG**

NOMOR POLISI : B-1779-HP
MERK / TAHUN : PEUGEOT 505 GR / 1987
JENIS / WARNA : SEDAN / COKLAT
NOMOR RANGKA : 1937229
NOMOR MESIN : 1937229
NAMA PEMILIK : IR. AKBAR TANJUNG
ALAMAT : JL. WIDYA CHANDRA III/10 RT.7/1, JS

NOMOR POLISI : B-1286-BQ
MERK / TAHUN : TIMOR S 515-I / 1998
JENIS / WARNA : SEDAN / BIRU TUA METALIK
NOMOR RANGKA : KNAFA3232V5690049
NOMOR MESIN : B5326300
NAMA PEMILIK : IR. AKBAR TANJUNG
ALAMAT : JL. WIDYA CHANDRA III RT.7/1, JS

NOMOR POLISI : B-900-M
MERK / TAHUN : B.M.W. 530.I / 1995
JENIS / WARNA : SEDAN / HITAM METALIK
NOMOR RANGKA : BH25148
NOMOR MESIN : 2514J859
NAMA PEMILIK : IR. AKBAR TANJUNG
ALAMAT : JL. WIDYA CHANDRA III RT.7/1, JS

NOMOR POLISI : B-8677-VG
MERK / TAHUN : T.LC.VXHD / 1999
JENIS / WARNA : JEEP L.C.HDTP / ABU ABU METALIK
NOMOR RANGKA : MHF11TJ8009004120
NOMOR MESIN : 1HD0182241
NAMA PEMILIK : IR. AKBAR TANJUNG
ALAMAT : JL. WIDYA CHANDRA III/10 RT.7/1, JS

NOMOR POLISI : B-2522-RF
MERK / TAHUN : T.KIJ SPR KF80 LGN / 1997
JENIS / WARNA : MINIBUS / BIRU METALIK
NOMOR RANGKA : MHF11KF8000005702
NOMOR MESIN : 7K0125985
NAMA PEMILIK : IR. AKBAR TANJUNG
ALAMAT : JL. WIDYA CHANDRA III/10 RT.7/1, JS

Ta kampil R. NURHADI Y, S. Ik, M. Si.

DATA KENDARAAN BERMOTOR
MELALUI PENCARIAN NAMA PEMILIK : AKBAR TANDJUNG

NOMOR POLISI : B-8805-KF
MERK / TAHUN : VOLVO 90T.6 / 2004
JENIS / WARNA : JEEP / HITAM METALIK
NOMOR RANGKA : YV1CZ91G844084679
NOMOR MESIN : B6294TA021914
NAMA PEMILIK : IR. AKBAR TANDJUNG
ALAMAT : JL. WIDYA CHANDRA III/10 RT.7/1, JS

NOMOR POLISI : B-1160-XM
MERK / TAHUN : VOLVO 960 AT / 1992
JENIS / WARNA : SEDAN / BIRU TUA
NOMOR RANGKA : YV1964986N025259
NOMOR MESIN : B6304F41703
NAMA PEMILIK : IR. AKBAR TANDJUNG
ALAMAT : JL. WIDYA CHANDRA III/10 RT.7/1, JS

NOMOR POLISI : B-8536-LT
MERK / TAHUN : BMW 530i / 2000
JENIS / WARNA : SEDAN / HITAM
NOMOR RANGKA : BY51011
NOMOR MESIN : 5101J100
NAMA PEMILIK : IR. AKBAR TANDJUNG
ALAMAT : JL. WIDYA CHANDRA III/10 RT.7/1, JS

NOMOR POLISI : B-2369-PS
MERK / TAHUN : PEUGEOT 405-TI / 1997
JENIS / WARNA : SEDAN / BIRU TUA
NOMOR RANGKA : 0220567
NOMOR MESIN : 0220567
NAMA PEMILIK : IR. AKBAR TANDJUNG
ALAMAT : JL. WIDYA CHANDRA III/10 RT.7/1, JS

DATA KENDARAAN BERMOTOR
MELALUI PENCARIAN NAMA PEMILIK : KRISNINA

NOMOR POLISI : B-8006-DE
MERK / TAHUN : VOLVO S 80 2.3T / 2002
JENIS / WARNA : SEDAN / SILVER METALIK
NOMOR RANGKA : YV1TS57K924276466
NOMOR MESIN : B5234T7A018244
NAMA PEMILIK : KRISNINA AKBAR TANJUNG
ALAMAT : JL. WIDYA CHANDRA III/10 RT.7/1, JS

NOMOR POLISI : B-1415-HO
MERK / TAHUN : MITSUBISHI PAJERO / 1995
JENIS / WARNA : JEP S.C.HDTP / HIJAU SILVER
NOMOR RANGKA : V43WGN000177
NOMOR MESIN : 6G72L81797
NAMA PEMILIK : NY. KRISNINA AKBAR TANJUNG
ALAMAT : JL. WIDYA CHANDRA III/10 RT.7/1, JS

NOMOR POLISI : B-6005-ZX
MERK / TAHUN : SUZUKI RC-100/ 1994
JENIS / WARNA : SPD. MOTOR / HITAM
NOMOR RANGKA : MHDRC110DRJ156012
NOMOR MESIN : E1071D856398
NAMA PEMILIK : KRISNINA AKBAR TANJUNG
ALAMAT : JL. WIDYA CHANDRA III/10 RT.7/1, JS

NOMOR POLISI : B-6372-ST
MERK / TAHUN : H. ASTREA C800M5 / 1995
JENIS / WARNA : SPD. MOTOR/ HITAM
NOMOR RANGKA : MH1GG000SSK002537
NOMOR MESIN : GGE1002554
NAMA PEMILIK : KRISNINA AKBAR TANJUNG
ALAMAT : JL. WIDYA CHANDRA III/10 RT.7/1, JS

NOMOR POLISI : B-8830-LW
MERK / TAHUN : T. KIJANG LUX LONG / 2002
JENIS / WARNA : MINIBUS / BIRU METALIK
NOMOR RANGKA : MHF11UF8120020204
NOMOR MESIN : 1RZ7020143
NAMA PEMILIK : KRISNINA AKBAR TANJUNG
ALAMAT : JL. WIDYA CHANDRA III/10 RT.7/1, JS

NOMOR POLISI : B-6265-P
MERK / TAHUN : H.ASTREA C100 / 2000
JENIS / WARNA : SPD.MOTOR / HITAM
NOMOR RANGKA : MH1NFGC13YK046160
NOMOR MESIN : NFGCE1046188
NAMA PEMILIK : KRISNINA AKBAR TANJUNG
ALAMAT : JL. WIDYA CHANDRA III/10 RT.7/1, JS

NOMOR POLISI : B-8162-AH
MERK / TAHUN : N.INFINITI 30-FL / 2000
JENIS / WARNA : SEDAN / KUNING METALIK
NOMOR RANGKA : CLHUREAA32A91888
NOMOR MESIN : VQ30763144A
NAMA PEMILIK : KRISNINA AKBAR TANJUNG
ALAMAT : JL. WIDYA CHANDRA III/10 RT.7/1, JS

NOMOR POLISI : B-5079-AE
MERK / TAHUN : HONDA NF 100 D / 2002
JENIS / WARNA : SPD.MOTOR / HITAM
NOMOR RANGKA : MH1KEV8162K557601
NOMOR MESIN : KEV8E1555623
NAMA PEMILIK : KRISNINA AKBAR TANJUNG
ALAMAT : JL. WIDYA CHANDRA III/10 RT.7/1, JS



DATA-DATA RANMOR

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	KETERANGAN
1.	ISUZU PANTER MERAH	B. 8846 ZP	RAMLAN BASKARA
2.	OPEL BLAZER	B. 8954 RY	RAMLAN BASKARA
3	SUZUKI ESCUDO	B. 1883 UD	RAMLAN BASKARA
4	TOYOTA KIJANG ABU-ABU M	B. 2073 AL	H. AMIR
5	ISUZU PANTER HIJAU	B. 8091 TO	RAMLAN BASKARA
6	TOYOTA KIJANG ABU-ABU	B. 1457 MZ	HIDAYAT
7.	TAFT RANGER ABU-ABU M	B. 8898 PB	H. ZAENAL
8.	ISUZU PANTER HIJAU	B. 7878 TH	HABIB
9.	TOYOTA KIJANG ABU-ABU	B. 9729 RU	CIKAWUNG
10	TAFF FICK UP BIRU	B. 9472 ZO	CIKAWUNG
11	TAFF FICK UP PUTIH	B. 9945 RO	CIKAWUNG
12	TAFF FICK UP BIRU	B. 2686 NE	CIKAWUNG
13	TAFF RANGER PUTIH	B.	CIKAWUNG
14	SUZUKI CARRY FICK UP	B.8826 UF	CIKAWUNG
15	SUZUKI CARI FICK UP	B. 9203 QI	CIKAWUNG
16	TAFT BRAVO HIJAU	B. 2614 OF	CIKAWUNG
17	HYUNDAI BOX DOUBLE	B. 9751 HH	CIKAWUNG
18	HYUNDAI BOX ENKLE	B. 9752 HH	CIKAWUNG
19	ISUZU BOX ENKLE	B. 9607 PI	CIKAWUNG
20	MITSUBISHI CANTER BAK	B. 9988 AR	CIKAWUNG
21	MITSUBISHI COLT DIESEL BAK	B. 8796 AK	CIKAWUNG
22	ISUZU BOX KACA C.E.E.	B. 9474 RY	CIKAWUNG
23	ISUZU BOX KACA C.S.E.	B. 9073 XV	CIKAWUNG
24	TOYOTA RINO BAK DOUBLE	8491 UG	CIKAWUNG
25	TOYOTA RINO BAK DOUBLE	B 8490 UG	CIKAWUNG
26	NISAN TRUCK BAK ENKLE	B 9851 FA	CIKAWUNG

..

DATA KENDARAAN YANG DIAMBIL INVESTOR UNTUK JAMINAN DANA INVESTASI

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	KETERANGAN
1.	FORD RANGER	B 9338 VG	H. NASIR
2.	TAFT GT PUTIH	B 8991 PF	H. NASIR
3	HYUNDAY BOX DOUBLE	B 9358 AN	H. NASIR
4	HYUNDAY BOX DOUBLE	B 9554 AN	H. NASIR
5	COLT DIESEL BOX C. S. D.	B 9800 PI	H. NASIR
6	COLT DIESEL BOX C.S.D.	B 9230 QK	H. NASIR
7	TOYOTA RINO BOX C.S.D.	F 8327 UG	H. NASIR
8	COLT DIESEL BOX ENKLE	B 9260 SW	H. NASIR
9	ISUZU BOX C.S. ENKLE	B 9829 TO	H. NASIR
10	SUZUKI CARRY MINI BUS	F 1464 UE	IBU YEYEN
11	SUZUKI CARRY MINI BUS	F 1258 UE	SOMANTRI
12	SUZUKI CARRY MINI BUS	F 1295 UE	SOFIAN
13	FUSO BOX ENKLE	F 8187 UG	SOFIAN
14	PERKASA BAK ENKLE	F 8678 UG	SOFIAN
15	COLT DIESEN BAK DOUBLE	B 9958 JW	SOFIAN
16	SUZUKI CARRY MINI BUS	F 1485 UE	HJ. OOM
17	TAFT RANGER BIRU	B 2925 ND	HERU SETIAWAN
18	TAFT RANGER BIRU	B 2139 XF	KORAMIL
19	TAFT GT. HITAM	B 1678 TR	SUKOCO/FKI
20	TAFT FICK UP BIRU	B 9155 PA	SUKOCO/FKI
21	FAFT RANGER MERAH	F 1159 UE	SUKOCO/FKI
22	COLT DIESEL BAK DOUBLE	B 9954 KA	IBU SUWARDI
23	ISUZU MINIMUS ¾	B 7279 PS	IBU SUWARDI
24	COLT DIESEL BAK ENKLE	F 8369 UF	MUHAIMIN
25	FUSO BAK ENKLE	F 8140 UG	POLRES SUKABUMI
26	FUSO BAK ENKLE	F 8220 UG	POLRES SUKABUMI
27	FUSO BAK ENKLE	F 8232 UG	POLRES SUKABUMI
28	FUSO BAK TRONTON	F 8952 UF	POLRES SUKABUMI
29	NISSAN BAK ENKLE	B 9852 FA	POLRES SUKABUMI
30	HINO BAK ENKLE	B 9326 PU	DERY
31	TAFT RANGER HIJAU	B 2396 DB	NURSAL
32	TAFT FICK UP PUTIH	B 9352 L	SUWARNO/OPIK
33	TAFT FICK UP BIRU	B 9070 BB	SUWARNO/OPIK
34	TOYOTA RINO BAK ENKLE	F 8407 UG	SUWARNO/OPIK
35	BUILT UP WING BOX	B 9222 AR	MARZUKI
36	COLT DIESEL BOX C.S.D.	B 9223 BO	MARZUKI
37	COLT DIESEL BOX C.S.E.	B 9207 ZO	MARZUKI
38	COLT DIESEL BOX DOUBLE	F 8186 UJ	MARZUKI
39	COLT L.300 BOX	B 9338 GI	MARZUKI
40	COLT L.300 BAK	F 8279 UG	MARZUKI
41	COLT L.300 BAK	F 8278 UG	LINDA
42	COLT DIESEL BAK ENKLE	B 9474 TN	BULUS DISITA PASI
43	HYUNDAY BAK DOUBLE	B 9801 AN	DODI SUDARSONO
44	TAFT GT. HITAM	B 2943 DB	POLRES SUKABUMI

DATA-DATA RANMOR

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	KETERANGAN
1.	TAFT PICK UP	B 9727 HH	
2.	TAFT PICK UP	B 9723 HH	
3	TAFT PICK UP	B 9729 HH	
4	TAFT PICK UP	B 9730 HH	
5	TAFT PICK UP	B 9731 HH	
6	TAFT PICK UP	B 9732 HH	
7.	TAFT PICK UP	B 9735 HH	
8.	TAFT PICK UP	B 9736 HH	
9.	TAFT PICK UP	B 9737 HH	
10	TAFT PICK UP	B 9741 HH	
11	RANGER	B 8726 JN	
12	RANGER	B 8727 JN	
13	RANGER	B 8728 JN	
14	RANGER	B 8729 JN	
15	RANGER	B 8730 JN	

- Jumlah kantor pusat : 50 unit
- Jumlah kantor cabang : 18 unit
- Jumlah kendaraan sarana kebun : 10 unit
- Jumlah kendaraan truck cabang : 38 unit
- Jumlah kendaraan truk pusat : 37 unit
- Jumlah kendaraan CS pusat : 49 unit
- Jumlah kendaraan CS cabang : 14 unit
- Jumlah dump truk : 15 unit
- Jumlah operasional kantor : 1 unit
- Jumlah kendaraan pariwisata : 52 unit
- Jumlah kendaraan baru : 12 unit
- Jumlah keseluruhan : 298 unit

DATA KENDARAAN YANG DIAMBIL INVESTOR UNTUK JAMINAN DANA INVESTASI

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	KETERANGAN
1.	BUS MERCEDES BENZ	D 7655 VB	
2.	BUS MERCEDES BENZ	D 7874 ND	
3.	BUS MERCEDES BENZ	D 7875 ND	
4.	BUS MERCEDES BENZ	B 7834 ND	
5.	BUS MERCEDES BENZ	D 7712 VB	
6.	BUS MERCEDES BENZ	D 7882 ND	
7.	BUS MERCEDES BENZ	BE 3292 AB	
8.	BUS MERCEDES BENZ	BE 3326 AB	
9.	BUS MERCEDES BENZ	D 7854 AC	
10.	BUS MERCEDES BENZ	D 7856 AC	
11.	BUS MERCEDES BENZ	D 7852 AC	
12.	BUS MERCEDES BENZ	D 7803 AC	
13.	BUS MERCEDES BENZ	D 7861 AC	
14.	BUS MERCEDES BENZ	D 7545 WD	
15.	BUS MERCEDES BENZ	B 7129 WB	
16.	BUS PERKASA	F 7084 UA	
17.	BUS PERKASA	F 7085 UA	
18.	GRAND ELSA L 300	B 8987 ZN	
19.	GRAND ELSA L 300	B 8398 MS	
20.	ISUZU MINI BUS	B 7009 PO	
21.	ISUZU MINI BUS	B 7009 PI	
22.	ISUZU MINI BUS	B 7089 PO	
23.	MIKRO BUS 3/4	F 7072 UA	
24.	MIKRO BUS ¾	F 7073 UA	
25.	MIKRO BUS ¾	B 7279 PS	
26.	MIKRO BUS ¾	B 7552 SA	
27.	MIKRO BUS ARMADA	B 7157 XE	
28.	MIKRO BUS HINO AC	B 7115 PO	
29.	MIKRO BUS HINO AC	B 7116 PO	
30.	MIKRO BUS HINO AC	B 7126 BO	
31.	MIKRO BUS HINO AC	B 7127 BO	
32.	MIKRO BUS HINO AC	B 7095 BO	
33.	MIKRO BUS HINO AC	B 7096 BO	
34.	MIKRO BUS HINO AC	B 7097 BO	
35.	MIKRO BUS HINO AC	B 7098 BO	
36.	MIKRO BUS MITSUBISHI AC	B 7108 PO	
37.	MIKRO BUS MITSUBISHI AC	B 7109 PO	
38.	MIKRO BUS MITSUBISHI AC	B 7110 PO	
39.	PRONA	F 7074 UA	
40.	PRONA	F 7079 UA	
41.	PRONA	F 7075 UA	
42.	PRONA	F 7078 UA	
43.	PRONA	B 8464 ZR	
44.	PRONA	B 8465 ZR	
45.	PRONA	B 8466 ZR	
46.	PRONA	B 8467 ZR	
47.	STAR WAGON L 300	B 7065 UA	
48.	STAR WAGON L 300	B 8074 ZR	
49.	STAR WAGON L 300	B 8075 ZR	
50.	STAR WAGON L 300	F 7068 UA	
51.	STAR WAGON L 300	F 7069 UA	
52.	STAR WAGON L 300 EKSEKUTIF	F 7083 UA	

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	DRIVER	KETERANGAN
1.	ISUZU ELF BOX PUTIH	B 9607 PI		AR SUKABUMI
2.	ISUZU ELF BOX PUTIH	B 9701 TN		AR SUKABUMI
3.	ISUZU ELF BOX PUTIH	B 9793 RU		AR SUKABUMI
4.	ISUZU ELF D CABIN	B 9702 TN		AR SUKABUMI
5.	L300 BOX CS COKLAT	B 9343 ZH		AR SUKABUMI
6.	TOYOTA RHINO CS	B 8326 BS		AR SUKABUMI
7.	TOYOTA RHINO PS D CS	B 8322 BS		AR SUKABUMI
8.	TOYOTA RHINO PS D CS	B 9425 RY		AR SUKABUMI
9.	TOYOTA RHINO BOX MERAH	B 6422 RY		AR SUKABUMI
B	KENDARAAN CS CABANG			

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	DRIVER	KETERANGAN
1.	COLT 100 PS ENGKEL KUNING	B 9468 BB		JAKARTA
2.	COLT D 120 PS CS KUNING	B 9834 YY		JAKARTA
3.	COLT BOX DOUBLE	B 9374 BB		JAKARTA
4.	COLT D BOX ENGKEL	B 8189 QI		JAKARTA
5.	COLT DIESEL BOX CS KUNING	B 9371 CC		JAKARTA
6.	COLT DIESEL BOX CS	B 9274 DI		JAKARTA
7.	ISUZU ELF 88 PS CS KACA	B 9443 AS	HUSEN	KALTIM
8.	ISUZU ELF 88 PS CS KACA	B 9964 ER		KALIMANTAN
9.	ISUZU ELF 88 PS CS KACA	B 9825	ALIMUDIN	MAKASSAR
10.	ISUZU ELF 88 PS CS KAC	B 9774 I		MAKASSAR
11.	ISUZU ELF 88 BOX CS PUTIH	B 8767 AI		KALTIM
12.	TOYOTA RHINO 100 PS E CS	B 9504 QI		BENGGULU

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	DRIVER	KETERANGAN
A.	DUMP TRUK			
1.	NISAN DUM TRUK	B 9982 GG		
2.	NISAN DUM TRUK	B 9979 GG		
3.	NISAN DUM TRUK	B 9979 GG		
4.	NISAN DUM TRUK	B 9975 GG		
5.	NISAN DUM TRUK	B 9976 GG		
6.	NISAN DUM TRUK	B 9978 GG		
7.	NISAN DUM TRUK	B 9974 GG		
8.	NISAN DUM TRUK	B 9969 GG		
9.	NISAN DUM TRUK	B 9939 GG		
10.	NISAN DUM TRUK	B 9984 GG		
11.	NISAN DUM TRUK	B 9983 GG		
12.	NISAN DUM TRUK	B 9985 GG		
13.	NISAN DUM TRUK	B 9971 GG		
14.	NISAN DUM TRUK	B 9980 GG		
15.	NISAN DUM TRUK	B 9981 GG		

**DAFTAR INVENTARISASI KENDARAAN CS
PT. "QURNIA SUBUR ALAM RAYA" FEBRUARI 2001**

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	DRIVER	KETERANGAN
A.	Kendaraan Cs Pusat			
1.	BILL UP CS	B 9102 AR		AR SUKABUMI
2.	COLT D 100 PS D CS KUNING	B 9707 JO		AR SUKABUMI
3.	COLT D 100 PS D CS KUNING	B 9557 BP		AR SUKABUMI
4.	COLT D 100 PS D CS KUNING	B 9776 A		AR SUKABUMI
5.	COLT D 100 PS D CS PUTIH	B 9338 JR		AR SUKABUMI
6.	COLT D 100 PS ENKLE	B 9202 PY		AR SUKABUMI
7.	COLT D 100 PS D CS KUNING	B 9060 TB		AR SUKABUMI
8.	COLT D 100 PS D CS KUNING	B 9999 HW		AR SUKABUMI
9.	COLT D 100 PS KACA KUNING	B 9228 SS		AR SUKABUMI
10.	COLT D BOX CS	B 9093 UI		AR SUKABUMI
11.	COLT D BOX CS	B 9934 UF		AR SUKABUMI
12.	COLT D BOX CS	B 9207 ZO		AR SUKABUMI
13.	COLT D BOX CS	B 9223 BO		AR SUKABUMI
14.	COLT D BOX CS	B 9800 PI		AR SUKABUMI
15.	COLT D BOX CS	B 9230 QK		AR SUKABUMI
16.	COLT D BOX CS	B 9236 QO		AR SUKABUMI
17.	COLT D BOX DOUBLE	B 9186 UG		AR SUKABUMI
18.	COLT D BOX ENKLE	B 9093 UG		AR SUKABUMI
19.	COLT D BOX ENKLE	B 9260 SW		AR SUKABUMI
20.	COLT D BOX ENKLE	B 9279 RG		AR SUKABUMI
21.	COLT D BOX ENKLE KUNING	B 9431 ZO		AR SUKABUMI
22.	COLT D BOX ENKLE KUNING	B 9474 TN		AR SUKABUMI
23.	COLT D BOX ENKLE KUNING	B 9574 M		DIJUAL RUSAK
24.	COLT DIESEL	B 9707 YP		AR SUKABUMI
25.	COLT L300 BOX	B 9510 SS		AR SUKABUMI
26.	COLT L300 BOX COKLAT	B 9338 QI		AR SUKABUMI
27.	HYUNDAI BOX ALM	B 9751 HH		AR SUKABUMI
28.	HYUNDAI BOX ALM	B 9752 HH		AR SUKABUMI
29.	HYUNDAI BOX KACA	B 9748 HH		AR SUKABUMI
30.	ISUZU BOX KACA	B 9028 UG		AR SUKABUMI
31.	ISUZU ELF 88 E PUTIH	B 9449 QV		AR SUKABUMI
32.	ISUZU ELF 88 E ENKLE	B 9390 H		AR SUKABUMI
33.	ISUZU ELF 88 PS CS KACA	B 9474 RY		AR SUKABUMI
34.	ISUZU ELF 88 PS CS KACA	B 9829 ZO		AR SUKABUMI
35.	ISUZU ELF 88 PS CS KACA	B 9073 XV		AR SUKABUMI
36.	ISUZU ELF 88 PS CS KACA	B 9447 XV		AR SUKABUMI
37.	ISUZU ELF 88 PS CS KACA	B 9799 XB		AR SUKABUMI
38.	ISUZU ELF 88 PS CS KACA	B 9794 RY		AR SUKABUMI
39.	ISUZU ELF 88 PS CS KACA	B 9746 L		AR SUKABUMI
40.	ISUZU ELF 88 PS CS KACA	B 9240 BZ		AR SUKABUMI

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	DRIVER	KETERANGAN
A.	Kendaraan Truck cabang			
1.	COLT D BAK D	D 8958 CE		AR LEMBANG
2.	COLT D BAK D	D 8937 CF		AR LEMBANG
3.	COLT D BAK D COKLAT MUDA	B 9460 TL		AR PELEMBANG
4.	COLT D BAK D KUNING	F 8419 UF		AR KALSEL
5.	COLT D D KUNING	F 8493 UF		AR KALTIM
6.	COLT D D KUNING	F 8084 UG		AR BENGKULU
7.	COLT D D KUNING	BM 8796 AK		AR PEKAN BARU
8.	COLT D D KUNING	F 8102 UG		AR PADANG
9.	COLT D D KUNING	F 8218 UG		AR PADANG
10.	COLT D E KUNING	B 9774 BE		AR PELABUANRT
11.	COLT L 300 PU	F 8374 UF		AR BENGKULU
12.	COLT L 300 PU	BM 8801 AK		AR PEKANBARU
13.	COLT L 300 PU COKLAT	DD 8823 N		AR MAKASSAR
14.	COLT L 300 PU COKLAT	BA 8426 HA		AR PADANG
15.	COLT 300 PU COKLAT TUA	BG 9882 DF		AR BENGKULU
16.	COLT 300 PU COKLAT TUA	KT 8451 AL		AR KALTIM
17.	FUSO BAK ENKLE	F 8187 UG		AR BANJARMASIN
18.	FUSO BAK ENKLE	F 8542 UG		AR PADANG
19.	L 300 PICK UP	L 7444 NA		ARPROBOLINGGO
20.	L 300 PICK UP COKLAT	F 8278 UG		AR LAMPUNG
21.	L 300 PICK UP COKLAT	F 8279 UG		AR JOGYAKARTA
22.	L 300 PICK UP COKLAT	F 8398 UG		AR LEMBANG
23.	TAFT PU BIRU	B 9744 GG		AR SULSEL
24.	TAFT PU BIRU	B 9155 PA		AR PALEMBANG
25.	TAFT PU PUTIH	BM 8294 AM		AR PALEMBANG
26.	TAFT PU PUTIH	B 9005 PA		AR PALEMBANG
27.	TAFT PU PUTIH	B 9905 DA		AR PALEMBANG
28.	TAFT PU PUTIH	B 9031 BY		AR JAMBI
29.	TAFT PU PUTIH	B 9115 BE		AR PLBHNRTU
30.	TAFT PU PUTIH	B 9992 HI		AR PELEMBANG
31.	TAFT PU PUTIH	B 9472 ZO		AR JAMBI
32.	TAFT ROCKY PUTIH	B 8792 BB		AR PALEMBANG
33.	TOYOTA DYNA BY 43 MERAH	F 8490 UG		AR SULSEL
34.	TOYOTA DYNA BY 43 MERAH	F 8491 UG		AR PALEMBANG
35.	TOYOTA DYNA BY 43 MERAH	F 8492 UG		AR PALEMBANG
36.	TOYOTA RINO BAK DOUBLE	F 8493 UF		AR PALEMBANG
37.	TRUCK ISUZU ELF	DD 9746 L		AR MAKASSAR
38.	TRUCK COLT DIESEL KUNING	KT 8839 AI		AR BANJARMASIN

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	DRIVER	KETERANGAN
A.	Kendaraan Truck Pusat			
1.	COLT D BAK	B 9954 K	SUKMAWIJAYA	AR SUKABUMI
2.	COLT D BAK	B 9958 JW	TIMA	AR CIJANGKAR
3.	COLT D BAK	F 8083 UG	DIM	AR SUKABUMI
4.	COLT D BAK	F 8219 UG	UJANG	AR SUKABUMI
5.	COLT D BAK	F 8369 UF	DIMYATI	AR SUKABUMI
6.	COLT D BAK	F 8140 UG	JAJA	AR SUKABUMI
7.	FUSO BAK ENKLE	F 8220 UG	AZIS	AR SUKABUMI
8.	FUSO BAK ENKLE	F 8323 UG	USEP	AR SUKABUMI
9.	FUSO BAK TORONTON	B 9952 UF	USEP	AR SUKABUMI
10.	HINO HIJAU	B 9326 PU	PUSAT	AR SUKABUMI
11.	HINO HIJAU	B 9327 PU	PUSAT	AR SUKABUMI
12.	ISUZU HIJAU	B 9098 PV	SODIKIN	RUSAK
13.	ISUZU HIJAU	B 9962 ZR	ECE SEMBLING	
14.	ISUZU ELF BAK D PUTIH	B 9233 PM		RUSAK
15.	L 300 BOX	B 9059 SS		AR JAKARTA
16.	L 300 PIC UP COKLAT	F 8392 UG		AR SUKABUMI
17.	NISSAN DIESEL UD	B 9851 FA	WAHYU	RENTAL
18.	NISSAN DIESEL UD	B 9852 FA	KADARUSMAN	RENTAL
19.	TAFT GT HITAM	B 9945 RO	MARNA	AR CIJANGKAR
20.	TAFT GT HITAM	B 9867 JD	TIMUR	AR SUKABUMI
21.	TAFT GT PUTIH	B 9678 TR		BENGKEL
22.	TAFT GT HILYNE F. 69	B 9991 PF	PUSAT	AR SUKABUMI
23.	TAFT GT HILYNE F. 69	F 1727 FK	SAEPUDIN	AR SUKABUMI
24.	TAFT GT HILYNE F. 70	B 9396 DB	SURATMAN	AR SUKABUMI
25.	TAFT GT HILYNE F. 69	B 9557 KN	IWAN	AR SUKABUMI
26.	TAFT PU MERAH	N 992 NA	EDRUS	AR SUKABUMI
27.	TAFT PU PUTIH	B 9577 RY	BRET	AR SUKABUMI
28.	TAFT PU PUTIH	B 9352 L	SOLIHIN	AR SUKABUMI
29.	TAFT PU PUTIH	B 9089 ZT	ENDANG	AR SUKABUMI
30.	TAFT PU RANGER	B 9351 XB	USEP	AR SUKABUMI
31.	TAFT PU RANGER	B 9070 BB	ASEP Y	AR SUKABUMI
32.	TAFT ROCKY MERAH	B 9249 ZO	ARIF	AR SUKABUMI
33.	TOYOTA DYNA BY 34 MERAH	F 8407 UG	ASEP S	AR SUKABUMI
34.	TOYOTA DYNA BY 34 MERAH	F 8489 UG	ELLIH	AR SUKABUMI
35.	TOYOTA RINO BAK E	F 8438 UG		BANDUNG
36.	TOYOTA RINO BAK MERAH	F 8326 UG	JAKIR	AR SUKABUMI
37.	TRUK MISUBHISI DIESEL	F 8893 UF		AR

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	DRIVER	KETERANGAN
1.	TAFT GT HITAM	B 1867 JD		AR SUKABUMI
2.	TAFT GT HITAM	B 1678 TR		AR SUKABUMI
3.	TAFT GT HITAM	B 2943 DB		AR SUKABUMI
4.	TAFT GT HITAM	B 8991 PF		AR SUKABUMI
5.	TAFT GT HITAM	B 2249 ZO		AR SUKABUMI
6.	TOYOTA CROWN	B 2812 SN		AR SUKABUMI
7.	TOYOTA CROWN	B 2291 RB		AR SUKABUMI
8.	TOYOTA KIJANG ABU-ABU	B 7878 TH		AR SMI
9.	TOYOTA KIJANG ABU-ABU M	B 2073 AL		AR JAKARTA
10.	TOYOTA KIJANG MERAH	B 1104 KI		AR MINERAL
11.	VOLVO HITAM	B 1444 BW		AR JAKARTA

Jumlah sementara kendaraan operasional kantor pusat : 51 unit

A.	Kendaraan Cabang			
1.	CHEVROLET TROOPER HIJAU	B 8804 AA		AR LEMBANG
2.	HILINE RANGER PUTIH	B 1832 WB		AR BENGKULU
3.	ISUZU PANTHER	B 8091 TO		AR BANDUNG
4.	ISUZU PANTHER	B 8715 ZP		AR BDN JAKARTA A
5.	ISUZU PANTHER BIRU M	B 8714 ZP		AR BDN JAKARTA A
6.	ISUZU PANTHER HIJAU	B 8898 PE		AR PEKAN BARU
7.	ISUZU PANTHER IV 25	DD 185SC		AR MAKASSAR
8.	ISUZU PANTHER V 25 BIRU	KT 2151 AK		AR KALTIM
9.	RANGER ABU M	B 1474 MK		AR KALTIM
10.	RANGER ABU M	B 1457 MZ		AR LAMPUNG
11.	RANGER ABU TUA	B 2521 BB		AR MEDAN
12.	RANGER ABU M	B 1214 JH		AR PALEMBANG
13.	RANGER COKLAT	B 1072 LP		AR BENGKULU
14.	RANGER MERAH	B 1459 UE		AR PALEMBANG
15.	RANGER PUTIH	B 1832 BB		AR BENGKULU
16.	TAFT ROCKY PUTIH GAMA	B 8792 BB		AR PALEMBANG

Jumlah sementara kendaraan operasional kantor cabang : 16 Unit

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	DRIVER	KETERANGAN
1.	MOTOROLA HIJAU			Untuk sarana kebun
2.	HAND TRACTOR MERAH	101421		
3.	TRACTOR RODA 4 MERAN			
4.	TRACTOR RODA 2			
5.	TRACTOR RODA 2			
6.	TRACTOR RODA 2			
7.	TRACTOR RODA 2			
8.	TRACTOR RODA 2			
9.	TRACTOR RODA 2			
10.	TRACTOR RODA 2			

**DAFTAR INVENTARISASI KENDARAAN KANTOR
PT "QURNIA SUBUR ALAM RAYA PERIODE FEBRUARI 2002**

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	DRIVER	KETERANGAN
A.	PUSAT			
1	CARNIVAL	B 7777 ZH		
2	CARRY MB FUTURA BIRU	B 1464 UE		AR MAJLIS TA'LIM
3	CARRY MB FUTURA BIRU	B 1465 UE		AR KOPERASI
4	CARRY MB FUTURA HIJAU	B 1258 UE		AR SUKABUMI
5	CARRY MB FUTURA MERAH	B 1295 UE		AR SUKABUMI
6	CARRY MB FUTURA PUTIH	B 1485 UE		AR YAYASAN
7	CARRY PUTIH PICK UP	BH 9657 AF		AR SUKABUMI
8	CARRY PUTIH PICK UP	F 8826 UF		AR TRADING
9	CHEVROLET TROPER HIJAU	B 1023 D		AR MAGADIK, SH
10	CORANDO	B 2367 AR		AR SMI
11	ISUZU PANTHER BIRU M	B 8843 ZP		AR PETERNAKAN
12	ISUZU PANTHER BIRU M	B 8847 ZP		AR SMI
13	ISUZU PANTHER COKLAT M	B 8221 ZS		JAKARTA IBU HAJI
14	ISUZU PANTHER COKLAT M	B 8222 ZS		AR SUKABUMI
15	ISUZU PANTHER MERAH	B 1750 PK		AR JAKARTA
16	ISUZU PANTHER MERAH	B 8844 ZP		BEKASI
17	ISUZU PANTHER MERAH M	B 1254 KI		AR TABLOID
18	ISUZU PANTHER MERAH M	B 8846 ZP		AR GREEN APEL
19	ISUZU PANTHER MERAH M	B 1861 VI		BAROS
20	JEEP MERCY	B 1502		AR SMI
21	JEEP MERCY 280 OE HITAM	B 1886 XY		JKT IBU HAJI
22	JEEP MERCY 280 OE HITAM	B 94 G		AR JAKARTA
23	MERCY BENZ HITAM	B 106 KW		JAKARTA
24	NISSAN PATROL	B 2QS		JAKARTA
25	NISSAN TERANO	B 11 AQ		AR SUKABUMI
26	OPEL BLAZER	B 8954 RY		AR SUKABUMI
27	RANGER BIRU	B 2868 NE		AR SUKABUMI
28	RANGER BIRU M	B 2925 ND		AR SUKABUMI
29	RANGER BIRU M	B 2139 XE		AR SUKABUMI
30	RANGER BRAVO HIJAU	B 2614 QF		AR SUKABUMI
31	RANGER HIJAU	B 1996 TR		AR SUKABUMI
32	RANGER HITAM	B 8706 ZL		AR SUKABUMI
33	RANGER PUTIH	B 1410 QA		AR SUKABUMI
34	RANGER PUTIH	B 1557 KN		AR SUKABUMI
35	RANGER PUTIH	B 1784 AR		AR SUKABUMI
36	SEDAN HYUNDAI HITAM	B 8789 DS		AR JAKARTA
37	SEDAN TOYOTA CRONT	B 2812 SN		AR SMI
38	SEDAN TOYOTA CRONT	B 2291 RB		AR SMI
39	SUZUKI ESCUDO HIJAU	B 1883 UD		AR SUKABUMI
40	SUZUKI ESCUDO HIJAU	B 1879 UD		AR JAKARTA

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	DRIVER	KETERANGAN
1	BUS MERCEDES BENZ	D 7655 PB		
2	BUS MERCEDES BENZ	D 7874 ND		
3	BUS MERCEDES BENZ	D 7875 ND		
4	BUS MERCEDES BENZ	D 7712 VB		
5	BUS MERCEDES BENZ	D 7882 ND		
6	BUS MERCEDES BENZ	D 7292 AB		
7	BUS MERCEDES BENZ	BE 3326 AB		
8	BUS MERCEDES BENZ	BE 2354 AC		
9	BUS MERCEDES BENZ	D 7856 AC		
10	BUS MERCEDES BENZ	D 7852 AC		
11	BUS MERCEDES BENZ	D 7852 AC		
12	BUS MERCEDES BENZ	D 7883 AC		
13	BUS MERCEDES BENZ	D 7861 AC		
14	BUS MERCEDES BENZ	D 7515 WD		
15	BUS MERCEDES BENZ	B 7 129 WB		
16	BUS PERKASA	F 7084 UA		
17	BUS PERKASA	F 7085 UA		
18	GRAND ELSA L 300	B 8987 ZN		
19	GRAND ELSA L 300	B 8398 MS		
20	ISUZU MINI BUS	B 7009 PO		
21	ISUZU MINI BUS	B 7009 PI		
22	ISUZU MINI BUS	B 7089 PO		
23	MICRO BUS ¾	F 7072 UA		
24	MICRO BUS ¾	F 7073 UA		
25	MICRO BUS ¾	B 7279 PS		
26	MICRO BUS ¾	D 7552 SA		
27	MICRO BUS ARMADA	B 7157 XE		
28	MICRO BUS HINO AC	B 7115 PO		
29	MICRO BUS HINO AC	B 7116 PO		
30	MICRO BUS HINO AC	B 7120 BC		
31	MICRO BUS HINO AC	B 7127 BO		
32	MICRO BUS HINO AC	B 7093 BO		
33	MICRO BUS HINO AC	B 7096 BO		
34	MICRO BUS HINO AC	B 7097 BO		
35	MICRO BUS HINO AC	B 7698 BO		
36	MICRO BUS MITSUBISI AC	B 7108 PO		
37	MICRO BUS MITSUBISI AC	B 7109 PO		
38	MICRO BUS MITSUBISI AC	B 7110 PO		
39	PRONA	F 7071 UA		
40	PRONA	F 7079 UA		
41	PRONA	F 7075 UA		
42	PRONA	F 7078 UA		
43	PRONA	B 8164 ZR		
44	PRONA	B 8462 ZR		
45	PRONA	B 8466 ZR		
46	PRONA	B 84 67 ZR		
47	STAR WAGON L 300	F 7065 UA		
48	STAR WAGON L 300	B 8074 ZR		
49	STAR WAGON L 300	B 8075ZR		
50	STAR WAGON L 300	F 7058 UA		
51	STAR WAGON L 300	F 7069 UA		
52	STAR WAGON L 300 EXECUTIVE	F 2083 UA		

Parawisata

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI		
1	TAFT PICK UP	B 9736HH		
2	TAFT PICK UP	B 9737HH		
3	TAFT PU BIRU	B 9741HH		
4	TAFT PU BIRU	B 9155 PA		
5	TAFT PU MERAH	B 9744 CC		
6	TAFT PU PUTIH	B 2992 NA		
7	TAFT PU PUTIH	B 9577 RY		
8	TAFT PU PUTIH	B 9352 L		
9	TAFT PU PUTIH	B 9089 ZT		
10	TAFT PU PUTIH	BM 8294 AM		
11	TAFT PU PUTIH	B 9005 PA		
12	TAFT PU PUTIH	B 9031 BY		
13	TAFT PU PUTIH	B 9115 BE		
14	TAFT PU PUTIH	B 9992 HI		
15	TAFT PU PUTIH	B 9472 ZQ		
16	TAFT PU RANGER	B 9070		
17	TAFT PU RANGER	B 9351 XB		
18	TAFT ROCKY MERAH	B 2294 ZO		
19	TAFT ROCKY PUTIH	B 8792 BB		
20	TOYOTA DYNA BY 34 MERAH	F 8407 UG		
21	TOYOTA DYNA BY 34 MERAH	F 8491 UG		
22	TOYOTA DYNA BY 34 MERAH	F 8490 UG		
23	TOYOTA DYNA BY 34 MERAH	F 8492 UG		
24	TOYOTA DYNA BY 34 MERAH	B 7878 TM		
25	TOYOTA KIJANG ABU-ABU	B 2037 AL		
26	TOYOTA KIJANG ABU-ABU M	B 1104 KI		
27	TOYOTA RHINO CS	F 8326 UG		
28	TOYOTA RHINO 100 PS E CS	B 9504 QI		
29	TOYOTA RHINO 100 PS E CS	B 9475 RY		
30	TOYOTA RHINO BAK DOUBLE	F 8493		
31	TOYOTA RHINO BAK DOUBLE	F 8493 UF		
32	TOYOTA RHINO BAK DOUBLE	F 8489 US		
33	TOYOTA RHINO BAK E	F 8438 US		
34	TOYOTA RHINO BAK MERAH	F 8326 UU		
35	TOYOTA RHINO BOX E	F 8327 UG		
36	TRACTOR RODA 2			
37	TRACTOR RODA 2			
38	TRACTOR RODA 2			
39	TRACTOR RODA 2			
40	TRACTOR RODA 2			
41	TRACTOR RODA 2			
42	TRACTOR RODA 4 MERAH			
43	TRACTOR RODA 4 MERAH			
44	TRUCK COLT DIESEL KUNING	KT 8839 AR		
45	TRUCK ISUZU ELF	DD 9746 L		
46	TRUCK MITSUBHISI DIESEL	F 8893 UF		
47	VOLVO HITAM	B 1444 BW		

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI		
1	PRONA	B 7078 UA		
2	PRONA	B 8464 ZR		
3	PRONA	B 8465 ZR		
4	PRONA	B 8466 ZR		
5	PRONA	B 8467 ZR		
6	RANGER	B 8726 ZN		
7	RANGER	B 8727		
8	RANGER	B 8728 ZN		
9	RANGER	B 8729 ZN		
10	RANGER	B 8730 ZN		
11	RANGER ABU M	B 1457 MZ		
12	RANGER ABU M	B 1474 MK		
13	RANGER ABU TUA	B 2521 BB		
14	RANGER BIRU M	B 2686 NE		
15	RANGER BIRU M	B 2925 ND		
16	RANGER BIRU M	B 1214 JH		
17	RANGER BIRU M	B 2139 XF		
18	RANGER BRAVO HIJAU	B 2614 QF		
19	RANGER COKLAT	B 1027 LP		
20	RANGER HIJAU	B 1996 PR		
21	RANGER HIJAU	B 2325 MZ		
22	RANGER HITAM	B 8706 ZI		
23	RANGER MERAH	B 1459 UF		
24	RANGER PUTIH	B 1410 QA		
25	RANGER PUTIH	B 1784 AR		
26	RANGER PUTIH	B 1557 KN		
27	RANGER PUTIH	B 1832 BB		
28	SEDAN HYUNDAI HITAM	B 8789 DS		
29	SEDAN TOYOTA CRONT	B 2812 SN		
30	SEDAN TOYOTA CRONT	B 2291 RB		
31	STAR WAGON L 300	B 7065 UA		
32	STAR WAGON L 300	B 8074 ZR		
33	STAR WAGON L 300	B 8075 ZR		
34	STAR WAGON L 300	B 7068 UA		
35	STAR WAGON L 300	B 7069 UA		
36	STAR WAGON L 300 EKSEKUTIF	B 7083 UA		
37	SUZUKI ESCUDO HIJAU	B 1883 UD		
38	SUZUKI ESCUDO HIJAU	B 1879 UD		
39	TAFT GT BIRU	B 9945 RO		
40	TAFT GT HITAM	B 1867 JD		
41	TAFT GT HITAM	B 1678 TR		
42	TAFT GT HITAM	B 2943 DB		
43	TAFT GT PUTIH	B 8991 PF		
44	TAFT HILINE F 69	B 1727 FK		
45	TAFT HILINE F 69	B 2396 DB		
46	TAFT PICK UP	B 9729 RD		
47	TAFT PICK UP	B 9722 HH		
48	TAFT PICK UP	B 9728 HH		
49	TAFT PICK UP	B 9729 HH		
50	TAFT PICK UP	B 9730 HH		
51	TAFT PICK UP	B 9784 HH		
52	TAFT PICK UP	B 9752 HH		
53	TAFT PICK UP	B 9733 HH		

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI		
1	JEEP MERCY	B 1502		
2	JEEP MERCY 280 OF HITAM	B 886 XY		
3	JEEP MERCY 280 OF HITAM	B 4 G		
4	L 300 BOX	B 059 SS		
5	L 300 BOX	B9443 ZH		
6	L 300 PICK UP	B 7414 NA		
7	L 300 PICK UP COKLAT	B 8892 UG		
8	L 300 PICK UP COKLAT	F 8278 UG		
9	L 300 PICK UP COKLAT	B 8279 UG		
10	L 300 PICK UP COKLAT	B 8398 UG		
11	MERCY BENZ HITAM	B 106 KW		
12	MICRO BUS ¾	B 7072 UA		
13	MICRO BUS ¾	B 7073 UA		
14	MICRO BUS ¾	B 7229 PS		
15	MICRO BUS ¾	B 7552 SA		
16	MICRO BUS ARMADA	B 7157 XE		
17	MICRO BUS HINO AC	B 7115 PO		
18	MICRO BUS HINO AC	B 7116 PO		
19	MICRO BUS HINO AC	B 7126 BO		
20	MICRO BUS HINO AC	B 7127 BO		
21	MICRO BUS HINO AC	B 7095 BO		
22	MICRO BUS HINO AC	B 7096 BO		
23	MICRO BUS HINO AC	B 7097 BO		
24	MICRO BUS HINO AC	B 7098 BO		
25	MICRO BUS MITSUBHISI	B 7108 PO		
26	MICRO BUS MITSUBHISI	B 7109 PO		
27	MICRO BUS MITSUBHISI	B 7110 PO		
28	MOTOROLA HIJAU			
29	NISAN DUMP TRUCK	B 9982 GG		
30	NISAN DUMP TRUCK	B 9970 GG		
31	NISAN DUMP TRUCK	B 9979 GG		
32	NISAN DUMP TRUCK	B 9975 GG		
33	NISAN DUMP TRUCK	B 9976 GG		
34	NISAN DUMP TRUCK	B 9978 GG		
35	NISAN DUMP TRUCK	B 9974 GG		
36	NISAN DUMP TRUCK	B 9969 GG		
37	NISAN DUMP TRUCK	B 9939 HH		
38	NISAN DUMP TRUCK	B 9984 GG		
39	NISAN DUMP TRUCK	B 9983 GG		
40	NISAN DUMP TRUCK	B 9985 GG		
41	NISAN DUMP TRUCK	B 9971 GG		
42	NISAN DUMP TRUCK	B 9980 GG		
43	NISAN DUMP TRUCK	B 9981 GG		
44	NISAN DUMP DIESEL UD	B 9851 FA		
45	NISAN DUMP DIESEL UD	B 9852 FA		
46	NISAN PATROL	B 2 QS		
47	NISAN TERANO	B 11 AQ		
48	OPEL BLAZER	B 8227 CH		
49	PERKASA BAK 'D	B 8678 UG		
50	PERKASA BOX	B 8692 UG		
51	PRONA	B 7074 UA		
52	PRONA	B 7079 UA		
53	PRONA	B 7075 UA		

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI		
1	GRAND ELSA L 300	B 8398 MS		
2	HAND TRACTOR MERAH	101421		
3	HAND TRACTOR MERAH	B 1832 BB		
4	HILINE RANGER PUTIH	B 93 26 PU		
5	HINO BAK E HIJAU	B 9327 PU		
6	HINO BAK E HIJAU	B 9801 AN		
7	HYUNDAI BOX D	B 9752 HH		
8	HYUNDAI BOX D	B 9748 HH		
9	HYUNDAI BOX KACA	B 9751 HH		
10	HYUNDAI BOX D	B 9554 AN		
11	HYUNDAI BOX D	B 9438 AN		
12	HYUNDAI BOX D	B 9802 AN		
13	HYUNDAI BOX D	B 9389 CC		
14	ISUZU BOX E KACA	B 9852 F		
15	ISUZU BOX E KACA	B 9028 UG		
16	ISUZU BOX KACA	B 9449 XV		
17	ISUZU BOX ELF 88 E PUTIH	B 9390 H		
18	ISUZU BOX ELF 88 E	B 9474 RY		
19	ISUZU BOX ELF PS E CS KACA	B 9073 XV		
20	ISUZU BOX ELF PS E CS KACA	B 9449 XV		
21	ISUZU BOX ELF PS E CS KACA	B 9799 XB		
22	ISUZU BOX ELF PS E CS KACA	B 9794 RY		
23	ISUZU BOX ELF PS E CS KACA	B 9964 ER		
24	ISUZU BOX ELF PS E CS KACA	DD 9746 L		
25	ISUZU BOX ELF PS E CS KACA	B 9443 AS		
26	ISUZU BOX ELF PS E CS KACA	DD 9774 L		
27	ISUZU BOX ELF PS E CS KACA	B 9098 PV		
28	ISUZU BOX ELF BAK	B 9233 FM		
29	ISUZU BOX ELF BAK E PUTIH	B 9962 ZR		
30	ISUZU BOX ELF BAK D PUTIH	B 8767 AE		
31	ISUZU BOX ELF BOX CS PUTIH	B 9240 BZ		
32	ISUZU BOX ELF BOX CS PUTIH	B 9793 RU		
33	ISUZU BOX ELF BOX CS PUTIH	B 9607 PI		
34	ISUZU BOX ELF BOX CS PUTIH	B 9703 TN		
35	ISUZU BOX ELF BOX CS PUTIH	B 9702 TN		
36	ISUZU BOX ELF CABIN	B 7009 PO		
37	ISUZU MINI BUS	B 7009 PJ		
38	ISUZU MINI BUS	B 7089 PO		
39	ISUZU MINI BUS	B 8091 TO		
40	ISUZU MINI BUS	B 8715 ZP		
41	ISUZU PANTHER BIRU M	B 8843 ZP		
42	ISUZU PANTHER BIRU M	B 8847 ZP		
43	ISUZU PANTHER BIRU M	B 8714 ZP		
44	ISUZU PANTHER BIRU M	B 8221 ZS		
45	ISUZU PANTHER COKLAT	B 8222 ZS		
46	ISUZU PANTHER COKLAT	B 8898 PB		
47	ISUZU PANTHER HIJAU	DD 185 SC		
48	ISUZU PANTHER LV 25 BIRU	KT 2451 AK		
49	ISUZU PANTHER LV 25 BIRU	B 1750 PK		
50	ISUZU PANTHER MERAH	B 8844 ZP		
51	ISUZU PANTHER MERAH M	B 1254 KI		
52	ISUZU PANTHER MERAH M	B 8846 ZP		
53	ISUZU PANTHER MERAH M	B 1862 VI		

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI		
1	CARNIVAL	B 7777 ZH		
2	BUILT UP / TANK BOX	B 9989 AR		
3	BUILT UP / TANK BOX	B 9061 AR		
4	BUILT UP BOX CS	B 9102 AR		
5	BUILT UP BOX CS	B 9099 AR		
6	BUILT UP WING BOX	B 9222 AR		
7	BUS MERCEDES BENZ	D 7695 VB		
8	BUS MERCEDES BENZ	D 7874 ND		
9	BUS MERCEDES BENZ	D 7875 ND		
10	BUS MERCEDES BENZ	B 7834 ND		
11	BUS MERCEDES BENZ	D 7712 VB		
12	BUS MERCEDES BENZ	D 7882 ND		
13	BUS MERCEDES BENZ	BE 3292 AB		
14	BUS MERCEDES BENZ	BE 3326 AB		
15	BUS MERCEDES BENZ	D 7854 AC		
16	BUS MERCEDES BENZ	D 7856 AC		
17	BUS MERCEDES BENZ	D 7852 AC		
18	BUS MERCEDES BENZ	D 7803 AC		
19	BUS MERCEDES BENZ	D 7861 AC		
20	BUS MERCEDES BENZ	D 3245 ZD		
21	BUS MERCEDES BENZ	B 3122 WB		
22	BUS PERKASA	D 7981 UA		
23	BUS PERKASA	D 1955 UA		
24	CENTER BAK	B 8988 AR		
25	CARRY MINI BUS FUTURA BIRU	B 4464 UE		
26	CARRY MINI BUS FUTURA BIRU	B 1465 UE		
27	CARRY MINI BUS FUTURA HIJAU	D 1254 UB		
28	CARRY MINI BUS FUTURA MERAH	B 1295 UF		
29	CARRY MINI BUS FUTURA PUTIH	B 1485 UE		
30	CARRY PUTIH PICK UP	BB 9657 AF		
31	CARRY PUTIH PICK UP	F 8826 UF		
32	CARRY PUTIH PICK UP	F 8827 UF		
33	CHEVROLET TROPER HIJAU	B 1023 D		
34	CHEVROLET TROPER HIJAU	B 8804 AA		
35	COLT D 100 PS	B 9707 ZO		
36	COLT D 100 PS CS KUNING	B 9575 P		
37	COLT D 100 PS CS KUNING	B 9557 BP		
38	COLT D 100 PS CS KUNING	B 9776 A		
39	COLT D 100 PS ENKLE	B 9202 PY		
40	COLT D 100 PS ENKLE KUNING	B 9060 TB		
41	COLT D 100 PS ENKLE KUNING	B 9999 HW		
42	COLT D 100 PS ENKLE KUNING	B 9768 RB		
43	COLT D 100 PS ENKLE KUNING	B 9833 BY		
44	COLT D 100 PS KACA	B 9228 SS		
45	COLT D 100 CS KUNING	B 9337 SN		
46	COLT D BAK RANGKA	B 9522 PB		
47	COLT D BAK RANGKA D	B 9735 AR		
48	COLT D BAK RANGKA D	D 8959 AR		
49	COLT D BAK RANGKA D	D 8937 CE		
50	COLT D BAK RANGKA D BESI	B 9229 CE		
51	COLT D BAK D	B 9998 CE		